



**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM
SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)
PADA MATA PELAJARAN EKONOMI
DI SMA NEGERI 1 BANTARSARI**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Muni Lestari

NIM. 7101415237

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 2 September 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Ahmad Nurkhin, S.Pd., M. Si.
NIP. 198201302009121005

Pembimbing



Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M. Si.
NIP. 197510101999031001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 September 2019

Penguji I



Dr. Margunani, M. P.
NIP. 195703181986012001

Penguji II



Kardiyem, S. Pd., M. Pd.
NIP. 198712282015042001

Penguji III



Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si.
NIP. 197510101999031001

Mengetahui,



Dr. Heri Yanto, MBA., PhD.
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muni Lestari

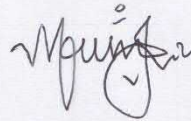
NIM : 7101415237

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 25 Mei 1997

Alamat : Desa Bulaksari RT.04 RW.07, Bantarsari, Cilacap

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, September 2019



Muni Lestari

7101415237

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (QS. Al-Insyiroh: 5-8).

Persembahan

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Wagimun dan Tumini.
2. Adik-adikku, Prayogi Kurniawan, Prayoga Kurniawan, Ridho Prasetyo, dan Hari Mukti Wibowo.
3. Teman-teman Pendidikan Akuntansi B dan Pendidikan Akuntansi BC 2015.
4. Teman-teman PPL SMA Negeri 2 Ungaran 2018 dan KKN Unnes Desa Jolotigo 2018.
5. Kelurga besar DPM KM Unnes periode kepengurusan tahun 2016/2017 dan 2017/2018.
6. Keluarga besar Pondok Pesantren Hufadzul Quran Al-Asror Semarang.
7. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Implementasi Program Sistem Kredit Semester (SKS) pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (satu) untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang senantiasa membuat penulis tetap konsisten dan percaya diri dalam menulis. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA, Ph. D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang dengan kebijaksanaannya memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M. Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang dengan kebijaksanaannya memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
4. Dr. Margunani, M. P., dosen penguji I yang telah memberikan arahan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Kardiyem, S. Pd., M. Pd., dosen penguji II yang telah memberikan arahan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Dr. Muhammad Khafid, S. Pd., M. Si., dosen penguji III sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang atas semua bekal ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Segenap civitas akademika SMA Negeri 1 Bantarsari yang telah bersedia menjadi objek penelitian.
9. Teman-teman Pendidikan Akuntansi B dan Pendidikan Akuntansi BC 2015 Universitas Negeri Semarang atas kebersamaannya selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan. Masukan yang diberikan berupa kritik maupun saran yang membangun sangat dibutuhkan dalam penyempurnaan tulisan ini.

Semarang, September 2019

Penulis

SARI

Lestari, Muni. 2019. “Analisis Implementasi Program Sistem Kredit Semester (SKS) pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Muhammad Khafid, S. Pd., M. Si.

Kata kunci: Implementasi, Program Sistem Kredit Semester, SKS, Mata Pelajaran Ekonomi, SMA Negeri 1 Bantarsari

Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyebutkan bahwa “Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau Sistem Kredit Semester.” SMA Negeri 1 Bantarsari merupakan salah satu satuan pendidikan penyelenggara SKS yang juga terintegrasi dengan kurikulum 2013. SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari baru diterapkan selama dua tahun pembelajaran terakhir yakni tahun 2017/2018 dan 2018/2019 pada peserta didik kelas X dan XI. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari khususnya pada mata pelajaran ekonomi dengan menggunakan model evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Bantarsari dan teknik pengambilan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi. Informan pada penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, waka kurikulum, guru ekonomi, dan peserta didik kelas X serta XI jurusan IPS. Pengujian terhadap keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan program SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari pada aspek *context* sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kebijakan yang ditentukan pemerintah; aspek *input* sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala dalam hal sarana prasarana, pemahaman guru terhadap program, dan kualitas *input* peserta didik; aspek *process* sudah berjalan sesuai dengan rencana namun peserta didik terkendala dengan buku pelajaran lanjutan untuk KD berikutnya; aspek *product* berupa ketercapaian tujuan program SKS belum terpenuhi namun SMA Negeri 1 Bantarsari memutuskan untuk melanjutkan program tersebut dengan berusaha memperbaiki kendala-kendala yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya SMA Negeri 1 Bantarsari melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap program SKS. Hal yang perlu diperbaiki adalah dalam hal sarana prasarana, serta pemahaman guru terhadap program SKS dan penggunaan teknologi.

ABSTRACT

Lestari, Muni. 2019. "Analysis of the Implementation of the Semester Credit System (SCS) Program in Economic Subjects at Senior High School 1 Bantarsari". Essay. Department of Economic Education. Economics Faculty. Universitas Negeri Semarang. Advisor: Dr. Muhammad Khafid, S. Pd., M. Si.

Keywords: Implementation, Semester Credit System Program, SCS, Economic Subjects, Senior High School 1 Bantarsari

Based on Permendikbud No. 22 of 2006 concerning Content Standards states that "educational units at all types and levels of education carry out educational programs using the package system or Semester Credit System." Senior High School 1 Bantarsari is one of education units organizing SCS that is also integrated with the 2013 curriculum. SCS at Senior High School 1 Bantarsari was implemented during the last two years of learning namely 2017/2018 and 2018/2019 in students of class X and XI. This study aims to evaluate the implementation of SCS at Senior High School 1 Bantarsari especially in economic subject using the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model.

This research is an evaluative descriptive study using a qualitative approach. The location chosen in this study was Senior High School 1 Bantarsari and the data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The informants in this research consisted of the school principals, curriculum administrators, and economic teacher and also grade X and XI students majoring in social studies. Testing of validity of the data is done by techniques triangulation and sources triangulation.

The results showed that the implementation of SCS program at Senior High School 1 Bantarsari in the context aspect was in accordance with the needs of schools and policies determined by the government; the input aspect has been going well, although there are still some obstacles in terms of infrastructure, teachers' understanding of the program, and the quality of students input; aspect of the process are going according to plan but the students are constrained by advanced textbooks for the next lessons; the product aspect in achievement of program objectives has not been met but Senior High School 1 Bantarsari decided to continue the program by trying to improve existing constraints.

Based on the research results, it is better for Senior High School 1 Bantarsari to improve and develop the SCS program. What needs to be improve is in terms of infrastructure, as well as teachers' understanding of the SCS program and the use of technology.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Cakupan Masalah	14
1.3. Rumusan Masalah	15
1.4. Tujuan Penelitian.....	15
1.5. Manfaat Penelitian.....	16
1.6. Orisinalitas Penelitian	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
2.1. Teori Pembelajaran Konstruktivisme.....	20
2.2. Teori Pembelajaran Humanistik.....	21
2.3. Evaluasi Kurikulum.....	22
2.3.1. Pengertian Evaluasi Kurikulum	22
2.3.2. Tujuan Evaluasi Kurikulum	25
2.3.3. Fungsi Evaluasi Kurikulum.....	25
2.3.4. Prinsip-prinsip Evaluasi Kurikulum.....	26
2.3.5. Model Evaluasi Kurikulum	28
2.4. Implementasi Kurikulum.....	36
2.4.1. Definisi Implementasi Kurikulum.....	36
2.4.2. Prinsip-prinsip Implementasi Kurikulum.....	37
2.4.3. Tahap-tahap Implementasi Kurikulum.....	38
2.4.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum	40
2.5. Sistem Kredit Semester (SKS)	41
2.5.1. Pengertian Sistem Kredit Semester (SKS)	41
2.5.2. Prinsip Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS)	42
2.5.3. Beban Belajar	43
2.5.4. Persyaratan Penyelenggaraan SKS.....	46
2.5.5. Mekanisme Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS)	46
2.6. Kurikulum	49
2.7. Kurikulum 2013	51
2.7.1. Pengertian Kurikulum 2013	51
2.7.2. Karakteristik Kurikulum 2013	51
2.7.3. Landasan Pengembangan Kurikulum 2013.....	52

2.7.4. Penilaian Autentik dalam Kurikulum 2013.....	54
2.8. Kerangka Teoritis.....	55
2.9. Kerangka Berpikir.....	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
3.1. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	66
3.2. Fokus dan Lokasi Penelitian.....	67
3.3. Sumber Data Penelitian.....	67
3.3.1. Sumber Data Primer.....	67
3.3.2. Sumber Data Sekunder.....	68
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.5. Teknik Keabsahan Data.....	72
3.6. Teknik Analisis Data.....	72
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	75
4.1. Gambaran Umum Sekolah.....	75
4.2. Gambaran Umum Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Bantarsari.....	75
BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DARI	
ASPEK CONTEXT.....	78
5.1. Kebijakan Pemerintah.....	79
5.2. Identifikasi Kebutuhan.....	83
5.3. Kesesuaian Isi Program dengan Masyarakat.....	85
5.4. Kesesuaian Program dengan Kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan	
Teknologi).....	86
BAB VI PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DARI	
ASPEK INPUT.....	90
6.1. Rencana Pelaksanaan Program.....	90
6.2. Mekanisme Pelaksanaan Program.....	102
6.3. Sumber Daya Manusia.....	106
6.4. Pembiayaan.....	113
6.5. Sarana dan Prasarana.....	114
6.6. Layanan Kesiswaan.....	118
BAB VII PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DARI	
ASPEK PROCESS.....	124
7.1. Perencanaan Pembelajaran.....	124
7.2. Pelaksanaan Pembelajaran.....	127
7.3. Penilaian Hasil Pembelajaran.....	133
BAB VIII PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DARI	
ASPEK PRODUCT.....	137
8.1. Ketercapaian Tujuan Program Sistem Kredit Semester (SKS).....	137
8.2. Keberlanjutan Program Sistem Kredit Semester (SKS).....	140
BAB IX PENUTUP.....	147
9.1. Kesimpulan.....	147
9.2. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA.....	149
LAMPIRAN.....	154

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas Penyelenggara SKS di Indonesia Tahun 2016	9
Tabel 2. 1. Jenis Evaluasi Model CIPP dalam Pembelajaran	33
Tabel 2. 2. Struktur Kurikulum 2013	43
Tabel 2. 3. Jumlah Beban Belajar Berdasarkan Capaian IP (Indeks Prestasi) pada Jenjang Pendidikan SMA	45
Tabel 2. 4. Ranah Penilaian Autentik.....	54
Tabel 3. 1. Informan dan Tema Wawancara	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir	65
Gambar 3. 1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	154
Lampiran 2. Matriks Penelitian.....	159
Lampiran 3. Agenda Wawancara	163
Lampiran 4. Agenda Observasi.....	164
Lampiran 5. Laporan Verbatim Hasil Wawancara	165
Lampiran 6. Dokumen RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)	209
Lampiran 7. UKB (Unit Kegiatan Belajar)	226
Lampiran 8. Kalender Pendidikan SMA Negeri 1 Bantarsari.....	235
Lampiran 9. Jadwal Pelajaran SMA Negeri 1 Bantarsari	236
Lampiran 10. Data Informan.....	237
Lampiran 11. Surat Izin Penelitian.....	239
Lampiran 12. Surat Keterangan Penelitian	240
Lampiran 13. Dokumentasi.....	241

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut tercantum di dalam UU No. 20 Tahun 2003 bab 2 pasal 3. Maka, agar tujuan pendidikan nasional tersebut dapat tercapai, diperlukan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, atau antar peserta didik yang dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal dengan menggunakan media tertentu (Rifa'i & Anni, 2015). Proses pembelajaran di sekolah selalu mengalami perkembangan agar dapat memberikan keterampilan yang cukup kepada peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri dan bertahan menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat di abad ke-21 saat ini.

Menurut Zubaidah (2016) “pembelajaran abad ke-21 memiliki prinsip pokok bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa, bersifat kolaboratif, kontekstual, dan terintegrasi dengan masyarakat”. Kegiatan pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah dan berpusat pada guru, melainkan dibutuhkan partisipasi aktif dari peserta didik agar terjadi pembelajaran dua arah serta diharapkan peserta didik mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Berbagai pengetahuan maupun keterampilan yang dibutuhkan peserta didik diajarkan melalui pembelajaran di sekolah. Keterampilan yang dimaksud yaitu empat pilar pendidikan menurut UNESCO yang mencakup *learning to know*, *learning to do*,

learning to be dan *learning to live together*. Masing-masing keterampilan tersebut mengandung keterampilan khusus yang perlu diberdayakan dalam kegiatan belajar, seperti keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, metakognisi (kemampuan untuk mengontrol ranah atau aspek kognitif), keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi dan kreasi, literasi informasi, dan berbagai keterampilan lainnya (Zubaidah, 2016).

Pola pembelajaran yang baik hendaknya juga memperhatikan penerapan teknologi dikarenakan pada abad ke-21 ini, perkembangan teknologi sangatlah cepat. Teknologi telah hampir digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat untuk menunjang aktivitas atau kegiatan mereka. Dunia pendidikan juga harus menyesuaikan perubahan ini dan mengaplikasikannya didalam kegiatan pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan sumber belajar maupun media pembelajaran berbasis teknologi. Penggunaan teknologi dalam pengetahuan dan keterampilan merupakan suatu kebutuhan dasar (Garba, Byabazaire, & Busthami, 2015). Teknologi dapat mempermudah guru mengakses informasi yang berguna untuk membantu dalam perencanaan pembelajaran; mengembangkan teknik-teknik dan metode mengajar; dan memperbarui pengetahuan mereka tentang pedagogik. Peserta didik juga dapat mengakses informasi untuk membantu mereka dalam memahami suatu materi, selain itu adanya forum media sosial *online* juga akan mempermudah komunikasi guru dalam menyampaikan informasi akademik kepada peserta didik. Penggunaan media teknologi yang efektif dan inovatif dapat memusatkan perhatian peserta didik serta membuat pembelajaran menjadi lebih

menyenangkan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk menunjang ketercapaian tujuan pendidikan dikarenakan peserta didik dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung.

Pembelajaran yang saat ini diterapkan di Indonesia yaitu menggunakan kurikulum 2013, setelah sebelumnya menggunakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 2006. Direktur Pembinaan SMA dalam sambutannya mengatakan bahwa kurikulum 2013 mulai diterapkan sejak tahun ajaran 2013/2014 di 1.270 SMA dan mulai dilaksanakan di seluruh kelas X dan XI SMA pada tahun 2014/2015. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 dilakukan penataan kembali dalam implementasinya dikarenakan masih ada beberapa kendala teknis dalam praktek di lapangan. Pemerintah kemudian menerapkan kurikulum 2013 secara bertahap di satuan pendidikan mulai semester genap tahun pelajaran 2014/2015 sampai dengan tahun pelajaran 2018/2019.

Perubahan kurikulum dari KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013 bukan tanpa alasan, melainkan karena beberapa permasalahan yang ada pada KTSP 2006 dimana KTSP 2006 sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Beberapa permasalahan yang muncul dalam KTSP 2006 diantaranya:

- (i) konten kurikulum yang masih terlalu padat; (ii) belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; (iii) kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan; (iv) belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global; (v) standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran

yang rinci dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru; (vi) standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala; dan (vii) KTSP memerlukan dokumen yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir (Anwar, 2014).

Menurut Mukminan (2014) alasan lain yang mengharuskan perubahan kurikulum disebabkan karena perkembangan ilmu, teknologi, dan seni (ITS); perubahan sosial; serta perubahan tatanan kehidupan global. Tilaar (2006) berpendapat bahwa manusia Indonesia haruslah cerdas dan mempunyai orientasi terhadap perubahan global. Salah satu tuntutan perubahan global yang harus dipenuhi ialah memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menjadi manusia mandiri yang memiliki kemampuan intelegensi yang terasah. Berbekal dengan kemampuan tersebut diharapkan masyarakat Indonesia dapat berpikir kreatif, mandiri, dan tidak bergantung dengan orang lain sehingga nantinya mampu bersaing dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Lebih lanjut lagi, Tilaar juga menyebutkan bahwa hal tersebut hanya dapat dicapai melalui kualitas pendidikan yang tinggi. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut salah satunya dilakukan dengan perbaikan kurikulum oleh pemerintah. Pemerintah selalu melakukan evaluasi dan mengupayakan perbaikan terhadap kurikulum yang digunakan agar dapat relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menghasilkan lulusan sekolah yang berdaya saing global.

Kurikulum 2013 merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP 2006. Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi ke tingkat berikutnya. Pendidikan karakter pada kurikulum 2013 bertujuan untuk

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan (Laely, 2016). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mendukung implementasi kurikulum 2013 melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memprogramkan kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi guru yang akan melaksanakan kurikulum 2013. Pembinaan implementasi kurikulum 2013 tersebut dilakukan melalui pengembangan naskah pendukung implementasi kurikulum 2013 berupa modul pelatihan, pedoman, panduan, dan model-model yang telah dikembangkan pada tahun 2016 dan 2017. Salah satu naskah pendukung implementasi kurikulum 2013 adalah pedoman penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS).

Penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung di Indonesia saat ini kebanyakan masih menggunakan sistem paket (konvensional). Sistem paket merupakan sistem yang umum digunakan dimana setiap peserta didik diberikan beban belajar yang sama untuk setiap semester. Padahal dalam UU No. 20 Tahun 2003 diamanatkan bahwa “peserta didik dalam mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, serta menyelesaikan program pendidikan dengan kecepatan belajar”. Penerapan sistem paket membuat peserta didik yang memiliki kecepatan belajar yang cepat harus menyesuaikan dan menunggu peserta didik yang kecepatannya lambat. Situasi tersebut tidak menguntungkan dan sangat tidak efektif bagi peserta didik pembelajar cepat karena peserta didik lambat akan menjadi jenuh dengan pembelajaran yang tak kunjung usai. Sebaliknya, peserta didik dengan kecepatan belajar lambat justru

akan merasa kesulitan ketika harus mengimbangi peserta didik dengan pembelajar cepat. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Sadiyah (2012) yang menyatakan bahwa “bagi peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan yang lebih amat membuang-buang waktu, sedangkan peserta didik yang lemah dalam intelektual dan keterampilannya akan sulit mengikuti peserta didik yang berkemampuan tinggi”. Selain itu, sistem paket dianggap kurang memberikan ruang bagi pengembangan potensi peserta didik dan kurang aspiratif ketika dihadapkan pada realitas peserta didik yang majemuk baik dari sisi *intelligence quotient* (IQ) maupun minat dan bakatnya (Muhlis, 2016). Kelemahan lain dari sistem paket ini yaitu adanya peserta didik yang tinggal kelas dan harus mengulang mata pelajaran selama setahun.

Berlawanan dengan penyelenggaraan pendidikan dalam sistem paket, terdapat suatu program penyelenggaraan pendidikan yang mengedepankan perbedaan peserta didik. Program tersebut adalah Sistem Kredit Semester (SKS) yang bisa dijadikan sebagai inovasi baru dalam kegiatan pembelajaran di Indonesia. Dasar hukum penerapan SKS dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik dan ayat 2 menegaskan bahwa beban belajar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester. Selain itu, Permendikbud No. 22 Tahun 2006 tentang

Standar Isi menyebutkan bahwa “Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau Sistem Kredit Semester”. SKS ini merupakan suatu program yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang memungkinkan peserta didik menyelesaikan keseluruhan beban belajar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajarnya. Pemerintah kemudian menyusun pedoman penyelenggaraan SKS yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Karakteristik peserta didik yang beraneka ragam harus menjadi perhatian yang penting agar tujuan pendidikan nasional nantinya dapat dicapai dengan baik. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Dantes dalam (Nafia, 2017) yang menyatakan bahwa penerapan SKS didasarkan oleh kenyataan bahwa kecepatan belajar seseorang (siswa) adalah tidak sama disebabkan oleh potensi *ability* mereka tidak sama sehingga potensi belajar mereka tidak sama juga. Minat siswa terhadap mata pelajaran pun tidak sama, sehingga kesuksesan siswa dalam menempuh studi akan sangat besar dipengaruhi oleh hal tersebut.

Pola pembelajaran dalam Sistem Kredit Semester (SKS) diselenggarakan dengan prinsip fleksibel, keunggulan, maju berkelanjutan, dan keadilan. Selain itu, pembelajaran dilakukan secara terdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik yang berbeda kecepatan belajarnya sehingga diperlukan layanan pendidikan yang mengacu kepada konsep pembelajaran tuntas (*mastery learning*). Pembelajaran tuntas merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan prinsip

ketuntasan secara individual. Pembelajaran tuntas tersebut mempersyaratkan peserta didik untuk menguasai secara tuntas seluruh kompetensi inti maupun kompetensi dasar pada mata pelajaran. Konsep yang seperti itu dapat memberikan kesempatan dan kualitas pengajaran yang berbeda kepada peserta didik. SKS memungkinkan peserta didik menentukan sendiri jumlah beban belajar yang akan diambil pada tiap semester dan memungkinkan peserta didik dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu 4 semester dan paling lambat yakni 8 semester. Jumlah beban belajar yang diambil peserta didik pada semester 2 ditentukan oleh perolehan Indeks Prestasi (IP) pada semester sebelumnya, begitu seterusnya. Konsep SKS ini mirip seperti program akselerasi karena peserta didik dapat menyelesaikan studinya lebih cepat dari waktu normal. Inovasi program SKS tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu upaya terobosan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia melalui prestasi-prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

Menurut Wahid (2016) peningkatan kualitas pendidikan banyak terkait dengan masalah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan peserta didik, maka untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dibutuhkan pelayanan yang prima kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik kecerdasan dan bakat masing-masing. Beberapa sekolah tertentu telah mengadakan program akselerasi yang kemudian berkembang menjadi sekolah mandiri yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) guna memberikan pelayanan terhadap peserta didik. Selain itu, sebuah penelitian yang berjudul “Manajemen Kurikulum Sistem Kredit Semester dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Probolinggo”

menunjukkan hasil bahwa SKS meningkatkan nilai-nilai yang diperoleh siswa SMA Negeri 1 Probolinggo dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Moesthafa, 2018).

Program Sistem Kredit Semester (SKS) dinilai dapat memperbaiki kekurangan dalam sistem paket, namun faktanya belum banyak sekolah yang menerapkan sistem tersebut. Berikut ini disajikan data jumlah sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas atau sederajat yang sudah menerapkan SKS dari beberapa propinsi di Indonesia pada tahun 2016:

Tabel 1. 1 Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas Penyelenggara SKS di Indonesia Tahun 2016

Propinsi	Jumlah Sekolah Penyelenggara SKS	Propinsi	Jumlah Sekolah Penyelenggara SKS
Bali	2	Kalimantan Utara	1
Banten	3	Lampung	10
DKI Jakarta	7	Maluku Utara	1
Jawa Barat	8	NTB	1
Jawa Tengah	18	NTT	6
Jawa Timur	37	Riau	1
Kalimantan Selatan	1	Sulawesi Selatan	2
Kalimantan Timur	4	Sulawesi Utara	2
Jumlah	80	Jumlah	24
Total			104

Sumber: gerbangkurikulum.psma.kemdikbud.go.id/sks

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sekolah yang telah menerapkan SKS pada jenjang pendidikan menengah atas di Indonesia yaitu sebanyak 104 sekolah. Fakta tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi SKS di sekolah, yang dalam hal ini fokus penelitiannya mengenai analisis keberlangsungan program tersebut. Jika dirasa SKS merupakan suatu program yang kurang baik, maka wajar jika penyelenggara SKS masih sedikit. Jika program tersebut adalah program penyelenggaraan

pendidikan yang baik namun hanya sedikit satuan pendidikan yang menerapkan program tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab hal tersebut dapat terjadi. Melalui kegiatan analisis program, maka nantinya dapat diketahui jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut.

SMA Negeri 1 Bantarsari merupakan sekolah di Cilacap Barat yang sudah menerapkan program Sistem Kredit Semester dan terintegrasi dengan kurikulum 2013 selama dua tahun ajaran terakhir. Tahun pertama yaitu tahun ajaran 2017/2018 pada peserta didik kelas X, sedangkan pada tahun kedua yaitu tahun ajaran 2018/2019 pada peserta didik kelas X dan XI, jadi untuk saat ini terdapat dua tingkat yang pembelajarannya menerapkan SKS yaitu kelas X dan kelas XI. Sementara untuk peserta didik kelas XII pada tahun ajaran 2018/2019 masih menggunakan sistem paket dan KTSP 2006. Sebenarnya di kabupaten Cilacap sendiri baru ada 2 sekolah yang menerapkan SKS, yakni SMA Negeri 1 Maos dan SMA Negeri 1 Bantarsari. Selanjutnya dalam implementasi SKS, pihak SMA Negeri 1 Bantarsari menerima pendampingan dari pemerintah propinsi dan sebelumnya telah melakukan studi banding ke sekolah yang telah terlebih dahulu menerapkan SKS yaitu SMA Negeri 1 Maos yang sudah meluluskan peserta didik melalui SKS. Selain itu, tujuan sekolah menerapkan SKS adalah sebagai salah satu upaya pengembangan sekolah.

Program Sistem Kredit Semester (SKS) pada dasarnya merupakan program pengganti akselerasi. Awalnya program SKS digalakkan bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan program akselerasi dan sekolah yang dahulu adalah RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) sebagai sekolah percontohan dalam

penyelenggaraan SKS. Seiring berjalannya waktu, regulasi pemerintah mengenai sekolah yang berhak menyelenggarakan SKS berubah. Berdasarkan pedoman penyelenggaraan SKS yang dikeluarkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) pada tahun 2010, disebutkan bahwa sekolah yang sudah terakreditasi A boleh menyelenggarakan SKS. Sekolah-sekolah di Indonesia kemudian mencoba menerapkan SKS dan hingga tahun 2016 terdapat 104 sekolah menengah atas yang sudah menyelenggarakan SKS. SMA Negeri 1 Bantarsari ini merupakan sekolah terakreditasi A yang menerapkan SKS sejak tahun ajaran 2017/2018. Hal yang menarik adalah sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang belum lama berdiri karena baru didirikan pada tahun 2009 namun mau menerapkan SKS. Padahal di kabupaten Cilacap sendiri banyak sekolah-sekolah unggulan yang dahulu merupakan RSBI tetapi belum berani menerapkan SKS. Hal tersebut dikarenakan SKS merupakan program baru dan masih asing sehingga sekolah-sekolah tersebut merasa belum siap untuk menyelenggarakan SKS. Kondisi inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari yang merupakan sekolah yang belum lama didirikan dan bukan merupakan salah satu sekolah unggulan di kabupaten Cilacap.

Analisis implementasi SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi program SKS di sekolah tersebut. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diketahui tingkat ketercapaian program dibandingkan dengan Pedoman Penyelenggaraan SKS yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan SMA pada tahun 2017 sebagai pedoman penyelenggaraan

SKS di seluruh Indonesia. Melalui analisis tersebut juga dapat diketahui kendala, serta alternatif-alternatif solusi yang akan diambil untuk kemudian hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan terkait keberlangsungan program SKS di sekolah tersebut. Apakah sekolah akan menghentikan implementasi program, memperbaiki pelaksanaan program, ataukah tetap menjalankan program tersebut.

Sukmadinata (2009) mengemukakan bahwa program evaluasi kurikulum tidak hanya mengevaluasi hasil belajar siswa dan proses pembelajarannya, tetapi juga mengevaluasi desain dan implementasi kurikulum, kemampuan dan unjuk kerja guru, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana dan prasarana, fasilitas, sumber-sumber belajar, dan lain lain. Peneliti melakukan analisis terhadap penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari dengan menggunakan salah satu model evaluasi dari Stufflebeam. Model tersebut merupakan model evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP) yang mana tidak hanya berfokus pada hasil, melainkan mempertimbangkan proses dari suatu kegiatan yang dievaluasi. Jadi, model ini dapat memberikan informasi yang detail mengenai pelaksanaan suatu program. Evaluasi kurikulum dengan menggunakan model CIPP juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam penelitiannya.

Penelitian pertama yaitu penelitian Winarni et al. (2014) yang menyatakan bahwa komponen *context* yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), peserta didik, manajemen, dukungan pemimpin, struktur kurikulum, standar kompetensi, beban belajar, isi kurikulum, dan dukungan pemerintah perlu diperbaiki. Komponen *input* yang terdiri dari target capaian pembelajaran, kemampuan

dosen, sarana dan prasarana, kecukupan waktu pembelajaran, sumber informasi pengembangan kurikulum, serta kualitas calon mahasiswa ternyata belum memadai. Komponen *process* yang terdiri dari koherensi pembelajaran, keterlaksanaan program, perumusan kurikulum, pemilihan strategi pembelajaran, pengorganisasian kurikulum, prosedur evaluasi, suasana akademik masih kurang baik. Sedangkan komponen *product* yang terdiri dari kualitas kemampuan mahasiswa dan dampak perubahan kurikulum juga belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam komponen *context*, *input*, *process*, dan *product* serta penyusunan kurikulum inti, penguatan mata kuliah, dan penguatan *soft skills* untuk meningkatkan kualitas lulusan bidan.

Penelitian berikutnya adalah penelitian Baysha dan Astuti yang tidak menggunakan model CIPP secara utuh, melainkan hanya menggunakan aspek *Input*, *Process*, *Product* (IPP). Hamid Hasan dalam (Baysha & Astuti, n.d.) mengemukakan bahwa kombinasi evaluasi dapat dilakukan karena evaluasi *context* sebagai evaluasi mandiri, sedangkan evaluasi *input*, *process*, dan *product* harus dilakukan dalam satu rangkaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan evaluasi IPP, penerapan kurikulum sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapannya, namun kesulitan-kesulitan tersebut masih dapat ditanggulangi oleh pihak sekolah.

Penelitian lainnya sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena fokus pada penelitian ini yaitu evaluasi pada proses pembelajaran, bukan pada kurikulumnya. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui hasil belajar

peserta didik pada bidang studi IPA serta mengetahui keefektifan proses pembelajaran IPA. Penggunaan model CIPP pada evaluasi proses pembelajaran IPA karena: (a) dapat dilakukan perbandingan yang mendasar antara data di lapangan dengan standar yang ditentukan; (b) dapat membuat evaluasi dan penilaian tentang pelaksanaan pembelajaran IPA dilihat dari indikator konteks, input, proses, dan produk (Bhakti, 2017). Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk mengambil judul “Analisis Implementasi Program Sistem Kredit Semester (SKS) pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari”.

1.2. Cakupan Masalah

Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan suatu program pembelajaran yang mengedepankan kepada pelayanan peserta didik yang memiliki potensi dan kecepatan belajar yang berbeda. Program SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari terintegrasi dengan kurikulum 2013, karena memang kurikulum yang diterapkan disana adalah kurikulum 2013. Peneliti dalam hal ini memberikan batasan pada penelitian dengan berfokus kepada analisis implementasi SKS yang sudah berjalan selama dua tahun di SMA Negeri 1 Bantarsari dengan menggunakan model evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP). Model CIPP dipilih karena model tersebut tidak hanya terfokus pada hasil, melainkan juga mempertimbangkan konteks dan proses program yang dievaluasi. Informasi yang diperoleh dari evaluasi CIPP dapat digunakan sebagai *judgement* (pertimbangan) untuk menentukan keberlanjutan pelaksanaan program yang dievaluasi. Komponen *process* dalam penelitian ini lebih menekankan kepada kegiatan

pembelajaran, baik sebelum maupun saat pembelajaran berlangsung dan didalamnya terdapat unsur kurikulum 2013 sebagai salah satu pokok bahasan. Aspek *process* yang termasuk kurikulum 2013 ini berupa format penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), metode pembelajaran, mekanisme penilaian pembelajaran, dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pembelajaran yang berlangsung menggunakan konsep kurikulum 2013. Selain pembahasan kurikulum 2013, peneliti juga lebih memfokuskan penelitian pada mata pelajaran ekonomi dikarenakan disiplin ilmu ekonomi lebih banyak diterapkan pada kehidupan sehari-hari.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari ditinjau dari aspek *context*?
2. Bagaimana implementasi program Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari ditinjau dari aspek *input*?
3. Bagaimana implementasi program Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari ditinjau dari aspek *process*?
4. Bagaimana implementasi program Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari ditinjau dari aspek *product*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penyelenggaraan program Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari dilihat dari aspek *context*.
2. Mendeskripsikan penyelenggaraan program Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari dilihat dari aspek *input*.
3. Mendeskripsikan penyelenggaraan program Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari dilihat dari aspek *process*.
4. Mendeskripsikan penyelenggaraan program Sistem Kredit Semester (SKS) pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari dilihat dari aspek *product*.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara akademis berkepentingan untuk mengkaji dan menguji penyelenggaraan program Sistem Kredit Semester (SKS) dalam kurikulum 2013 di satuan pendidikan khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas sesuai dengan model evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP). Penelitian ini bermanfaat untuk bahan pengembangan teori maupun regulasi yang berkaitan dengan program SKS dan kurikulum 2013. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian atau informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis peneliti melalui penelitian karya ilmiah dan penerapan teori-teori yang selama ini telah peneliti terima pada masa perkuliahan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pengelolaan pendidikan di SMA Negeri 1 Bantarsari sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran peserta didik di sekolah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan pendidikan dalam hal kurikulum dan regulasi-regulasi yang bersangkutan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan sekolah dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif sehingga mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan melalui program SKS.

1.6. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai evaluasi Sistem Kredit Semester (SKS) sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti sebenarnya mencoba untuk mengembangkan penelitian terhadap SKS dengan menggunakan penelitian sebelumnya sebagai referensi. Orisinalitas pada penelitian ini yakni terdapat pada variabel mata pelajaran ekonomi dikarenakan belum ada peneliti yang menambahkan variabel tersebut dalam meneliti SKS. Selain itu, sekolah yang menjadi objek penelitian juga memiliki karakteristik yang unik yaitu baru menyelenggarakan program SKS selama dua tahun pelajaran dan belum meluluskan peserta didik dari program SKS. Berikut ini beberapa penelitian

terdahulu mengenai SKS dan evaluasi kurikulum yang dijadikan sebagai referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

Pertama, penelitian Hardini (2016) yang melakukan penelitian terhadap evaluasi program Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Negeri 1 Salatiga dengan menggunakan *Context, Input, Process, Product* (CIPP). Indikator penelitian pada aspek konteks didasarkan atas kebutuhan yang ada pada sekolah yaitu kebutuhan untuk memfasilitasi peserta didik dengan kategori Cerdas Istimewa (CI) dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah; penyelenggaraan program SKS dari segi masukan meliputi rencana pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, guru, peserta didik, pembiayaan, sarana prasarana dan jadwal; penyelenggaraan program SKS dari segi proses meliputi persiapan guru, pelaksanaan SKS, dan penilaian hasil pembelajaran; penyelenggaraan program SKS dari segi hasil berupa ketercapaian tujuan dan keberlanjutan program.

Kedua, penelitian Nafia (2017) mengenai penerapan SKS di SMA Negeri 1 Kudus. Penelitian tersebut berfokus kepada analisis implementasi SKS di SMA Negeri 1 Kudus, serta kendala dan solusi terhadap penerapan SKS di sekolah tersebut.

Ketiga, penelitian Loko (2016) terhadap evaluasi kurikulum 2013 di SMA yang ada di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan model CIPP. Evaluasi dari aspek *context* meliputi sarana prasarana, pemahaman siswa dan guru, serta keterlibatan komite sekolah; evaluasi *input* meliputi buku pedoman guru dan siswa, pelatihan guru dan kepala sekolah, pendampingan guru, manajemen pembelajaran, serta layanan kesiswaan; evaluasi *process* meliputi

proses pembelajaran dan proses penilaian, sedangkan evaluasi *product* berupa hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang mencakup kendala serta strategi untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Pembelajaran Konstruktivisme

Teori konstruktivisme dikembangkan oleh Seymour Papert. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Melalui proses akomodasi dan asimilasi, peserta didik membangun pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Konstruktivisme seringkali dikaitkan dengan pendekatan pendidikan yang meningkatkan kegiatan belajar aktif.

Teori konstruktivisme memandang bahwa setiap peserta didik adalah individu yang bersifat unik. Keunikan tersebut berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu harus dihargai dan digunakan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Selain itu peserta didik juga harus memiliki rasa tanggung jawab dan motivasi yang kuat untuk menemukan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Berbekal dari pengalaman menyelesaikan masalah, maka peserta didik akan mampu menghadapi tantangan yang lebih kompleks di masa mendatang.

Peran pendidik di dalam pendekatan konstruktivisme adalah sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam memahami isi pelajaran. Tugas pendidik sebagai fasilitator yaitu memberikan stimulus secara dua arah kepada peserta didik agar peserta didik mampu menyimpulkan sendiri. Misalnya dengan cara memberikan pertanyaan atau menjadi konsultan diskusi.

Pendekatan pembelajaran konstruktivisme menekankan peserta didik untuk memecahkan masalah secara kompleks terlebih dahulu baru kemudian peserta didik mendapatkan keterampilan dasar yang diperlukan dengan bantuan pendidik. Kegiatan belajar dalam pendekatan konstruktivisme menekankan pada bekerja secara kelompok, misalnya dengan memecahkan masalah secara terbuka, *discovery*, dan eksperimen (Rifa'i & Anni, 2015).

2.2. Teori Pembelajaran Humanistik

Pendidikan humanistik mulai berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1960-an sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik pendidikan di sekolah yang selalu diarahkan oleh pendidik (*direct instruction*). Pendidikan yang diarahkan oleh pendidik tersebut mengutamakan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Sedangkan fokus utama pendidikan humanistik adalah hasil pendidikan yang bersifat afektif, belajar tentang cara-cara belajar (*learning how to learn*), dan meningkatkan kreativitas dan semua potensi peserta didik. Pendidikan yang menyajikan bahan belajar spesifik dan diorganisir secara ketat, penggunaan metode pembelajaran yang sistematis, memotivasi peserta didik, pengelolaan kelas, dan asesmen kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik (*direct instruction*) akan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik.

Praktik pembelajaran dalam pendekatan humanistik mengkombinasikan metode pembelajaran individual dan kelompok kecil. Namun pendekatan humanistik mempersyaratkan perubahan status pendidik dari individu yang lebih mengetahui dan terampil segala sesuatu menjadi individu yang memiliki status

kesetaraan dengan peserta didik. Pilihan materi pembelajaran yang hendak digunakan dalam proses pembelajaran merupakan hak peserta didik, dan bukan menjadi hak pendidik yang akan disampaikan kepada peserta didik, atau perancang kurikulum. Pembelajaran merupakan wahana bagi peserta didik untuk melakukan aktualisasi diri, sehingga pendidik harus membangun kecenderungan tersebut dan mengorganisir kelas agar peserta didik melakukan kontak dengan peristiwa-peristiwa yang bermakna (Rifa'i & Anni, 2015).

2.3. Evaluasi Kurikulum

2.3.1. Pengertian Evaluasi Kurikulum

Definisi mengenai evaluasi kurikulum berbeda-beda dikarenakan evaluasi kurikulum berkaitan dengan kegiatan aplikatif dalam pelaksanaan kurikulum. Berikut ini definisi evaluasi kurikulum menurut beberapa ahli berdasarkan tujuan dan ruang lingkup kajiannya (Hasan, 2008):

a. Tyler (1949)

Tyler mengemukakan bahwa evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar (*behavior*). Jadi ruang lingkup evaluasi Tyler lebih menekankan pada hasil belajar siswa yang dapat diukur melalui tes, sedangkan proses implementasi kurikulum bukan menjadi kepedulian evaluasi. Oleh karena itu, konsep evaluasi Tyler seringkali disebut dengan istilah *black box*.

b. Orient M (1993)

Menurut Orient, evaluasi lebih mementingkan kepada tujuan untuk memberikan pertimbangan (*judgement*). Pertimbangan yang dimaksud adalah

proses intrapolasi yang harus dilakukan evaluator antara apa yang diinginkan oleh kriteria dengan data yang dikumpulkan. Jika data memenuhi apa yang diinginkan oleh kriteria, maka objek evaluasi dapat dikatakan berhasil. Orient tidak mempersoalkan ruang lingkup evaluasi sebagai sesuatu yang penting untuk dijadikan batasan dalam rumusan definisi. Tidak adanya pembatasan atau spesifikasi ruang lingkup tersebut membuat definisi evaluasi yang dikemukakan oleh Orient memiliki aplikasi yang lebih luas.

c. Stufflebeam dkk

Stufflebeam bersama dengan kelompoknya yang bernama Phi Delta Kappa (PDK) menempatkan evaluasi sebagai suatu kegiatan yang menjadi bagian dari manajemen. Evaluasi bertujuan untuk merumuskan apa yang harus dilakukan, mengumpulkan informasi, dan menyajikan informasi yang berguna bagi menetapkan alternatif keputusan.

d. Cronbach (1980)

Evaluasi menurut Cronbach yakni memusatkan perhatian pada *systematic examination* terhadap peristiwa yang terjadi pada waktu suatu kurikulum dilaksanakan dan akibat dari pelaksanaan pengembangan kurikulum tersebut, dan tidak menuntut evaluator untuk melakukan *judgement* ataupun memberikan keputusan.

e. Meyer (1980)

Pendapat Meyer mengenai evaluasi hampir sama dengan pendapat Cronbach. Meyer juga memandang suatu evaluasi dari segi pelaksanaan kurikulum dan dampak yang ditimbulkan dari ruang lingkup evaluasi kurikulum. Bedanya,

Meyer berpendapat bahwa evaluasi harus memberikan pemahaman mengenai apa yang dievaluasi.

f. Guba dan Lincoln (1980)

Menurut Guba dan Lincoln, evaluasi adalah usaha untuk menjelaskan objek/subjek yang dievaluasi dan kemudian memberikan pertimbangan tentang *merit* (keunggulan/nilai) dan *worth* (arti). *Merit* (nilai) lebih berkenaan pada keunggulan intrinsik suatu kurikulum, sedangkan *worth* lebih mengarah kepada makna atau pengaruh/dampak evaluasi kurikulum terhadap lingkungan.

g. Longstreet dan Shane (1993)

Longstreet dan Shane memandang evaluasi kurikulum pada *merit* dan *success*. Pandangan tersebut hampir sama dengan pendapat Guba dan Lincoln, yang membedakan adalah evaluasi oleh Longstreet dan Shane dilakukan untuk memberikan pertimbangan terhadap kurikulum. Keberhasilan kurikulum berkaitan dengan *design*, *content*, dan implementasi.

h. Hamid Hasan (2008)

Evaluasi kurikulum adalah usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam konteks tertentu. Konteks yang dimaksud adalah konteks ruang, waktu, peserta didik, filsafat dan teori. Bahwasanya pandangan kurikulum dalam setiap konteks berbeda, maka dalam perumusan kurikulum hendaknya memperhatikan masing-masing konteks tersebut agar dapat relevan dengan ruang lingkungannya.

Berdasarkan definisi evaluasi menurut beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai kurikulum dengan tujuan tertentu serta menyajikan informasi tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan.

2.3.2. Tujuan Evaluasi Kurikulum

Tujuan evaluasi kurikulum berbeda-beda bergantung dari pandangan filosofis seseorang tentang posisi evaluasi sebagai suatu bidang kajian dan bidang profesi. Secara umum, tujuan evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pengembangan dan implementasi kurikulum sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
- b. Menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan kurikulum.
- c. Mengembangkan alternatif pemecahan masalah dalam upaya perbaikan kurikulum.
- d. Memahami dan menjelaskan karakteristik dan pelaksanaan kurikulum (Hasan, 2008).

2.3.3. Fungsi Evaluasi Kurikulum

Scriven (1967) dalam (Hasan, 2008) mengemukakan bahwa fungsi evaluasi kurikulum ada dua, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Kedua fungsi tersebut akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Fungsi Formatif

Fungsi formatif digunakan untuk memberikan informasi dan pertimbangan yang berhubungan dengan upaya untuk memperbaiki kurikulum (*curriculum improvement*). Perbaikan tersebut dapat dilakukan pada waktu konstruksi

kurikulum (yang menghasilkan dokumen kurikulum) dan implementasi kurikulum. Fungsi formatif ini hanya dapat dilakukan ketika kurikulum masih dalam proses pengembangan, yang mana evaluasi dapat digunakan sebagai pemberian masukan secara langsung kepada para pengembang kurikulum mengenai aspek pengembangan yang sudah ataupun belum memenuhi kriteria. Fungsi formatif ini merupakan evaluasi yang lebih menekankan kepada proses dibandingkan hasil. Jadi, informasi yang dihasilkan dari evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki proses pada waktu konstruksi maupun implementasi kurikulum.

b. Fungsi Sumatif

Berbeda dengan konsep fungsi formatif, maka fungsi sumatif ini tidak diterapkan ketika kurikulum masih dalam proses. Jadi fungsi sumatif ini lebih ditekankan untuk digunakan sebagai bahan pemberian pertimbangan terhadap hasil pengembangan kurikulum. Hasil pengembangan kurikulum dapat berupa dokumen kurikulum, hasil belajar, ataupun dampak kurikulum terhadap sekolah maupun masyarakat. Berdasarkan fungsi sumatif ini, evaluator dapat memberikan pertimbangan mengenai tindak lanjut kurikulum (dihentikan/dilanjutkan) dan menilai relevansi kurikulum dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2.3.4. Prinsip-prinsip Evaluasi Kurikulum

Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan tertentu, artinya evaluasi kurikulum mengarah kepada pencapaian tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan tersebut

menjadi pijakan berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum.

- b. Bersifat objektif, maksudnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang andal.
- c. Bersifat komprehensif, artinya mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum harus mendapat perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
- d. Kooperatif dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan. Pelaksanaan dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa itu sendiri, disamping merupakan tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan.
- e. Efisien, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang. Oleh karena itu, harus diupayakan agar hasil evaluasi lebih tinggi, atau paling tidak berimbang dengan materiil yang digunakan.
- f. Berkesinambungan. Hal ini diperlukan mengingat tuntutan dari dalam dan luar sistem sekolah, yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Oleh karena itu, peran guru dan kepala sekolah sangatlah penting, karena mereka yang paling mengetahui pelaksanaan, permasalahan, dan keberhasilan kurikulum (Hamalik, 2009a).

2.3.5. Model Evaluasi Kurikulum

Model evaluasi muncul karena adanya usaha eksplanasi secara kontinu yang diturunkan dari perkembangan pengukuran dan keinginan manusia untuk berusaha menerapkan prinsip-prinsip evaluasi pada cakupan yang lebih abstrak termasuk pada bidang ilmu pendidikan, perilaku, dan seni. Evaluasi kurikulum maupun evaluasi sistem bervariasi sesuai dengan pilihan dari evaluator itu sendiri. Berikut ini macam-macam model evaluasi menurut Sukardi (2009a):

2.3.5.1. Model Tyler

Model Tyler secara konsep menekankan adanya proses evaluasi secara langsung didasarkan atas tujuan instruksional yang telah ditetapkan bersamaan dengan persiapan mengajar, ketika seorang guru berinteraksi dengan para siswanya menjadi sasaran pokok dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dikatakan berhasil menurut para pendukung model Tyler, apabila para siswa yang mengalami proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses belajar mengajar.

Usaha memahami tujuan hidup seorang siswa dalam proses belajar tidaklah mudah. Hal ini karena pada diri seorang siswa pada prinsipnya akan selalu terjadi perubahan, seiring dengan umur, hasil belajar dan tingkat pengalaman hidup seorang anak manusia. Tujuan perlu direncanakan dalam proses pembelajaran oleh seorang guru, dengan prinsip bahwa untuk menentukan hasil perubahan yang diinginkan dalam bentuk perilaku siswa, seorang guru perlu melakukan evaluasi.

Melalui evaluasi ini diharapkan seorang guru dapat menentukan derajat atau tingkat perubahan perilaku siswa yang terjadi, sebagai akibat perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswa. Pendekatan ini merupakan pendekatan sistematis, elegan, akurat, dan secara internal memiliki rasional yang logis dibanding dengan model evaluasi lainnya. Kesederhanaan model Tyler juga merupakan kelebihan tersendiri dan merupakan kekuatan konstruk yang elegan serta mencakup evaluasi kontingensi.

Secara rasional Tyler telah menggambarkan bahwa evaluasi berfokus pada penyaringan kurikulum dan program sebagai sentral kepercayaan evaluasi. Fokus model Tyler pada prinsipnya adalah lebih menekankan perhatian pada sebelum dan sesudah perencanaan kurikulum. Model Tyler juga menekankan bahwa perilaku yang diperlukan diukur minimal dua kali, yaitu sebelum dan sesudah perlakuan (*treatment*) dicapai oleh pengembang kurikulum.

2.3.5.2. Model Countenance Stake

Model ini secara garis besar memiliki dua kelengkapan utama yang tercakup dalam “data matrik”, yaitu deskripsi dan matrik keputusan. Setiap matrik dibagi menjadi dua kolom, yaitu kolom tujuan dan kolom pengamatan. Pada kolom ini mencakup deskripsi matriks dan deskripsi standar, sedangkan pada deskripsi keputusan berisi matrik pertimbangan (*judgement matrix*). Kedua matrik dibagi menjadi tiga baris yang secara vertikal atau dari atas ke bawah, disebut sebagai baris: awal (*antecedent*), transaksi (*transaction*), dan hasil (*outcomes*).

Tugas evaluator dalam kaitannya dengan data *matrix countenance* adalah menentukan masukan untuk tujuan kolom pada tiga tingkatan. Baris *antecedent*

merupakan informasi tentang kondisi yang hidup sebelum proses belajar mengajar yang mungkin menentukan atau berkaitan dengan *outcomes*; baris *transaction* diisi dengan suatu fenomena yang ditemui yang turut menentukan hasil proses belajar mengajar; resultan pengajaran atau disebut juga terminologi faktor-faktor *output* merupakan tujuan kondisi kontekstual untuk perilaku guru. Ketika ketiga tingkatan tujuan di atas telah dijabarkan dan dijustifikasi dalam rasionalisasi yang jelas, maka tugas seorang evaluator untuk menspesifikasi tujuan dapat dikatakan selesai.

Kegiatan berikutnya yang juga termasuk penting bagi seorang evaluator, adalah mengumpulkan data untuk kolom pada matriks deskripsi yang mana pada setiap tujuan dispesifikasi dalam kolom. Sedangkan data yang perlu dikumpulkan adalah data yang akan menunjukkan keadaan dimana tujuan yang akan dicapai. Pada tingkat *outcomes*, proses ini masih sama seperti model yang diajukan oleh Tyler. Informasi yang ada pada model *countenance* lebih menunjukkan apakah kondisi sebelum atau *antecedent* dapat terpenuhi, seperti yang telah ditentukan dalam proses belajar mengajar.

Jika hasil yang diinginkan tidak tercapai, model *countenance* masih dimungkinkan bagi para evaluator untuk menyusun beberapa acuan dasar guna mengajukan uji hipotesis tentang penyebab kegagalan dengan melihat data *antecedent* dan data transaksi. Perbedaan yang muncul pada ketiga tingkatan umumnya dapat dimaknai sebagai rujukan baku dalam kolom pertama dari matriks keputusan.

2.3.5.3. Model CIPP

Model *Context, Input, Process, Product* (CIPP) merupakan hasil kerja para tim peneliti yang tergabung dalam suatu organisasi komite Phi Delta Kappa USA yang ketika itu diketuai oleh Daniel Stufflebeam. Model CIPP ini juga termasuk model yang tidak terlalu menekankan pada tujuan suatu program. Evaluasi dengan model CIPP ini, pada prinsipnya mendukung proses pengambilan keputusan dengan mengajukan pemilihan alternatif dan penindaklanjutan konsekuensi dari suatu keputusan.

Evaluasi model CIPP pada garis besarnya melayani empat macam keputusan yaitu, 1) perencanaan keputusan yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan tujuan khusus, 2) keputusan pembentukan atau *structuring*, yang kegiatannya mencakup pemastian strategi optimal dan desain proses untuk mencapai tujuan yang telah diturunkan dari keputusan perencanaan, 3) keputusan implementasi, dimana pada keputusan ini para evaluator mengusahakan sarana-prasarana untuk menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan atau eksekusi, rencana, metode, dan strategi yang hendak dipilih, dan 4) keputusan pemutaran (*recycling*) yang menentukan, jika suatu program diteruskan, diteruskan dengan modifikasi, dan atau diberhentikan secara total atas dasar kriteria yang ada.

Ada empat macam fokus evaluasi untuk melaksanakan empat macam keputusan tersebut, yaitu a) evaluasi konteks, menghasilkan evaluasi tentang macam-macam kebutuhan yang telah diatur prioritasnya, agar tujuan dapat diformulasikan; b) evaluasi input, menyediakan informasi tentang masukan yang terpilih, butir-butir kekuatan dan kelemahan, strategi, dan desain untuk merealisasikan tujuan; c) evaluasi proses menyediakan informasi untuk para

evaluator melakukan prosedur monitoring terpilih yang mungkin baru diimplementasikan sehingga butir yang kuat dapat dimanfaatkan dan butir yang lemah dapat dihilangkan; d) evaluasi produk, mengakomodasi informasi untuk meyakinkan dalam kondisi apa tujuan dapat dicapai dan juga untuk menentukan, jika strategi yang berkaitan dengan prosedur dan metode yang diterapkan guna mencapai tujuan sebaiknya berhenti, modifikasi, atau dilanjutkan dalam bentuk yang seperti sekarang.

Tseng, Ray Diez, Lou, & Tsai (2010) berusaha mengeksplorasi tahapan pembelajaran dengan menggunakan model CIPP. CIPP ini adalah pedoman yang menyediakan struktur sistematis untuk evaluasi program. Evaluasi *context* berhubungan dengan apakah kurikulum meliputi fokus, tujuan dan sasaran kurikulum, yang berarti parameter organisasi. Hal ini juga menilai lingkungan dimana evaluasi berlangsung. Data agregat dan informasi yang dikumpulkan berfungsi sebagai dasar untuk keputusan kurikulum dan perkembangan tujuan selanjutnya. Evaluasi konteks meliputi kebijakan, lingkungan, dan penilaian kebutuhan.

Evaluasi *input* berupa ujian pembelajaran (keterampilan atau strategi belajar siswa), dan hal ini berkaitan dengan menentukan sumber daya dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan kurikulum. Selain itu, tujuan evaluasi *input* harus mendukung pemilihan sumber daya. Oleh karena itu, evaluasi *input* harus menyertakan rencana kerja, peralatan, dana, dan sumber daya manusia.

Evaluasi *process* berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran. Berdasarkan hasil uji coba atau evaluasi, evaluasi *process* diperlukan untuk menggambarkan

kebutuhan siswa untuk merekonstruksi program. Tujuannya adalah untuk meramalkan kesalahan desain, untuk memberikan informasi untuk keputusan, dan untuk menjamin prosedur rencana. Melalui evaluasi *process*, dapat diketahui rencana awal, menemukan proses, melacak perubahan rencana, dan menyediakan bahan untuk menjamin efisiensi dan prestasi. Evaluasi *process* dapat berupa penggunaan ukuran perilaku guru, peringkat guru, langkah-langkah pencapaian standar.

Evaluasi *product* adalah penilaian hasil pembelajaran. Tujuan evaluasi *product* adalah untuk mengetahui apakah ide yang direncanakan membawa perubahan terhadap siswa. Evaluasi *product* dapat berupa keputusan apakah kurikulum harus diperbaiki, dilanjutkan ataukah dihentikan dan juga mengevaluasi *output* yang dihasilkan kurikulum. Berdasarkan uraian mengenai CIPP di atas kemudian dapat diringkas dalam tabel jenis evaluasi model CIPP berikut:

Tabel 2. 1. Jenis Evaluasi Model CIPP dalam Pembelajaran

	<i>Context</i>	<i>Input</i>	<i>Process</i>	<i>Product</i>
Tujuan	Mendiagnosa masalah dan menilai kebutuhan	Menilai kemungkinan perubahan	Memastikan perubahan yang disarankan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaannya	Mengetahui apakah program instruksional atau ide benar-benar membawa perubahan
Metode yang digunakan	Wawancara kelas, tes diagnostik, dan analisis karya tulis siswa	Pencarian literatur, mengunjungi program percontohan, uji coba	Pemantauan proses perubahan dengan mengamati dan merekam	Wawancara dengan siswa, tes kelas, dan analisis karya tulis

	<i>Context</i>	<i>Input</i>	<i>Process</i>	<i>Product</i>
		percontohan, ide dari guru di lapangan	kegiatan yang berlangsung, baik hasil yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan	siswa
Pembuatan keputusan	Menyediakan dasar untuk perubahan keputusan yang dibutuhkan	Menemukan perubahan yang paling mendukung dan menemukan solusi yang paling memungkinkan	Menyediakan data yang dapat digunakan untuk menafsirkan dampak perubahan	Memutuskan apakah perubahan harus dilanjutkan, dihentikan, atau diubah

Sumber: (Tseng et al., 2010)

2.3.5.4. Model Bebas Tujuan

Evaluasi model bebas tujuan ini diajukan oleh Sctieven pada tahun 1972. Menurut Sctieven dan pendukungnya, seorang evaluator harus menghindari tujuan dan mengambil setiap tindakan pencegahan. Sctieven juga beranggapan bahwa evaluasi program dapat dilakukan tanpa mengetahui tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, evaluasi perlu menilai pengaruh nyata tentang profil kebutuhan yang dilanjutkan dengan tindakan dalam pendidikan.

Pelaksanaan evaluasi dengan model bebas tujuan memerlukan dua item informasi, yaitu a) penilaian tentang pengaruh nyata (*actual effects*), dan b) penilaian tentang profil kebutuhan yang hendak dinilai. Jika suatu produk mempunyai pengaruh yang dapat ditunjukkan secara nyata dan responsif terhadap suatu kebutuhan, ini berarti bahwa suatu produk yang direncanakan berguna dan secara positif perlu dikembangkan; dan interpretasi sebaliknya terjadi, jika suatu produk, termasuk kegiatan belajar mengajar, tidak mempunyai pengaruh nyata

pada para siswanya. Model bebas tujuan merupakan titik perkembangan evaluasi program, dimana objek yang dievaluasi tidak perlu terkait dengan tujuan dari objek atau subjek tersebut, tetapi langsung kepada implikasi keberadaan program apakah bermanfaat atau tidak objek tersebut atas dasar penilaian kebutuhan yang ada.

2.3.5.5. Model Connoisseurship atau Model Ahli

Model *connoisseurship* diajukan oleh Esner pada tahun 1975 dan memiliki dua karakteristik penting. Pertama, model ini merupakan salah satu model pengambilan keputusan yang menggunakan manusia sebagai instrumen pengukuran. Kedua, model ini diturunkan dari model *metaphoric* atau perumpamaan dan menggunakan kiasan kritik artistik untuk menghasilkan konsep-konsep dasar evaluasi.

Model *connoisseurship* ini juga menggunakan pengumpulan data, analisis, penafsiran atau interpretasi data yang berlangsung dalam pemikiran si pembuat keputusan. Proses ini terjadi ketika keputusan berjalan di dalam otak pembuat keputusan berdasar pada model organisator bahwa ia telah menginternalisasi berdasarkan pada pelatihan dan pengalaman. Formulasi Esner berawal dari dua konsep kembar, yaitu a) konsep ahli pendidikan, dan b) konsep kritik pendidikan. Kedua konsep kembar tersebut merupakan batasan yang dipinjam dari domain kritik artis yang menyamakan antara praktik pendidikan dengan kerja seorang seniman.

Model *connoisseurship* tidak lain adalah usaha menggambarkan penyimpangan dari metodologi yang telah dieksploitasi oleh para praktisi

evaluasi. *Connoisseurship is the art of appreciation*, sedangkan *criticism is the art of disclosure* dan Esner menambah satu lagi prinsip tentang tujuan kritik. Menurutnya kritik bukan hanya menerangkan sifat-sifat dan kualitas menyusun objek atau peristiwa, tetapi juga menyerahkan dalam batasan linguistik. Kritik berbicara dan menulis tentang apa yang ditemui sehingga kritik harus memberikan pencerahan kualitas yang mencakup kegiatan, signifikansi dan kualitas pengalaman, ketika seorang evaluator berinteraksi dengan yang dievaluasi yaitu para siswa (Sukardi, 2009).

2.4. Implementasi Kurikulum

2.4.1. Definisi Implementasi Kurikulum

Berikut ini diuraikan beberapa pendapat mengenai definisi implementasi kurikulum:

a. Oxford Advance Learner's Dictionary

Implementasi adalah "*put something into effect*" atau penerapan sesuatu yang memberikan efek (Hamalik, 2009a).

b. Miller dan Seller (1985)

Miller dan Seller dalam (Mulyasa, 2009) memandang bahwa "*in some cases implementation has been identified with instruction...*". Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah.

c. Oemar Hamalik (2009)

Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya (Hamalik, 2009a).

d. Mulyasa (2009)

Implementasi kurikulum adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk pembelajaran. Maksudnya, implementasi kurikulum merupakan hasil terjemahan guru terhadap kurikulum yang dijabarkan ke dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai rencana tertulis (Mulyasa, 2009).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum merupakan pelaksanaan konsep, ide, maupun rencana kurikulum yang telah dirancang sebelumnya ke dalam praktik pembelajaran di sekolah dan dapat menimbulkan efek tertentu terhadap pembelajaran.

2.4.2. Prinsip-prinsip Implementasi Kurikulum

Terdapat prinsip-prinsip yang dapat menunjang implementasi kurikulum yaitu sebagai berikut:

a. Perolehan kesempatan yang sama

Maksud dari prinsip ini adalah seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menerima pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajarnya, tanpa memandang latar belakang peserta didik

(kaya/miskin, pintar/kurang pintar, rajin/malas, dan sebagainya). Jadi seluruh peserta didik berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama agar dapat memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya.

b. Berpusat pada anak

Prinsip implementasi kurikulum yang dipusatkan pada anak dimaksudkan agar peserta didik dapat mandiri dalam hal belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri sehingga mampu membangun kemauan, pemahaman, dan pengetahuannya. Hal tersebut dapat dicapai melalui pengembangan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

c. Pendekatan dan kemitraan

Pendekatan dalam pengorganisasian pengalaman belajar berfokus pada variasi kebutuhan peserta didik dan mengintegrasikan berbagai bidang ilmu. Dibutuhkan kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah, perguruan tinggi, dunia kerja dan industri, orang tua, dan masyarakat agar pengalaman belajar peserta didik dapat dicapai.

d. Kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan

Pusat menyusun standar kompetensi kemudian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Standar kompetensi dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun kurikulum berdiversifikasi, berdasarkan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik, serta bertaraf internasional (Hamalik, 2009a).

2.4.3. Tahap-tahap Implementasi Kurikulum

Oemar Hamalik dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum” mengemukakan bahwa tahapan implementasi kurikulum ada 3, yang akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan Implementasi

Tahap perencanaan bertujuan untuk merumuskan visi dan misi yang akan dicapai. Porter (1996) mengemukakan bahwa dalam tahap perencanaan perlu dipertimbangkan berbagai alternatif yang akan digunakan dalam proses implementasi kurikulum. Alternatif-alternatif tersebut antara lain: (1) identifikasi masalah yang dihadapi/tujuan yang akan dicapai; (2) pengembangan setiap alternatif metode, evaluasi, personalia, anggaran, dan waktu; (3) evaluasi setiap alternatif tersebut; dan (4) penentuan alternatif yang paling baik. Ketika menentukan alternatif-alternatif yang akan digunakan tersebut, digunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) agar dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap alternatif serta disesuaikan dengan peluang dan hambatan yang mungkin akan dihadapi. Hasil nyata dari tahap implementasi adalah *blue print* (cetak biru) yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kurikulum.

b. Tahap Pelaksanaan Implementasi

Tahap pelaksanaan kurikulum merupakan suatu kegiatan untuk merealisasikan *blue print* yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh suatu tim terpadu menurut departemen masing-masing atau gabungan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Hasil dari

kegiatan ini adalah tercapainya tujuan-tujuan kegiatan yang telah ditetapkan yang dapat meningkatkan pemanfaatan dan penerapan kurikulum.

c. Tahap Evaluasi Implementasi

Tahap evaluasi berfungsi untuk mengetahui dua hal penting. Pertama, melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai fungsi kontrol dan fungsi perbaikan. Kedua, yakni untuk melihat hasil akhir yang telah dicapai dari implementasi kurikulum. Hasil akhir tersebut diperbandingkan dengan perencanaan yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian penerapan kurikulum. Evaluasi dilaksanakan menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, anggaran personal, dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan.

2.4.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum

Marsh (1980) dalam (Hamalik, 2009a) mengemukakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu: (a) dukungan kepala sekolah, (b) dukungan rekan sejawat guru, dan (c) dukungan internal di dalam kelas. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, guru merupakan faktor utama penentu keberhasilan kurikulum karena apabila guru tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka implementasi kurikulum tidak akan berhasil dengan baik pula.

Sementara itu faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum adalah sebagai berikut:

- a. Karakteristik kurikulum, mencakup ruang lingkup, bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya.

- b. Strategi implementasi, dapat berupa diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendorong penerapan kurikulum.
- c. Karakteristik pengguna kurikulum, meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru dalam pembelajaran (Hamalik, 2009a).

2.5. Sistem Kredit Semester (SKS)

2.5.1. Pengertian Sistem Kredit Semester (SKS)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Sistem Kredit Semester (SKS) adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar. Beban belajar setiap mata pelajaran yang diikuti dalam setiap semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), dimana beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam tugas terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur. Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan bahwa SKS diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh (Unit Kegiatan Belajar Mandiri/ UKBM) setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Unit kegiatan belajar merupakan satuan pelajaran kecil yang disusun berurutan dari yang mudah ke yang sukar. UKBM

harus memuat Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) serta strategi pembelajaran individual untuk mencapai ketuntasan belajar yang telah ditentukan (Direktorat PSMA, 2017).

2.5.2. Prinsip Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS)

Menurut Permendikbud nomor 158 tahun 2014, program Sistem Kredit Semester (SKS) diselenggarakan melalui prinsip: (a) fleksibel, merupakan penyelenggaraan SKS dengan prinsip fleksibilitas pilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri; (b) prinsip keunggulan, memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar; (c) prinsip maju berkelanjutan, memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain; dan (d) prinsip keadilan, memungkinkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perseorangan.

Menurut pedoman penyelenggaraan SKS yang dikeluarkan oleh Direktorat PSMA, satuan pendidikan penyelenggara SKS wajib menerapkan 7 (tujuh) prinsip penyelenggaraan SKS yaitu: (a) SKS ditujukan untuk melayani semua kelompok peserta didik pembelajar cepat, pembelajar normal, dan pembelajar lambat; (b) transformasi pengalaman belajar melalui pembelajaran tatap muka, terstruktur, dan mandiri; (c) pemberian layanan yang optimal dalam setiap mata pelajaran sesuai

dengan kecepatan belajar peserta didik agar dapat mencapai ketuntasan belajar; (d) penilaian hasil belajar menggunakan penilaian acuan patokan berbasis kompetensi dan dilakukan penilaian sumatif pada setiap semester; (e) bahan belajar dan pembelajaran berbentuk Buku Teks Pelajaran (BTP) dan/atau modul berbentuk Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) berbasis KD; (f) program pendidikan sepenuhnya menggunakan Struktur Kurikulum 2013 dan tidak boleh ada pemampatan ke dalam program kurang dari enam semester; dan (g) guru harus menyelenggarakan pembelajaran klasikal, pembelajaran kelompok kecil, dan pembelajaran individual.

2.5.3. Beban Belajar

Berdasarkan Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013, beban belajar dinyatakan sebagai keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pelajaran. Beban belajar tersebut terdiri dari: (a) kegiatan tatap muka, dinyatakan dalam jumlah jam pembelajaran per minggu dengan durasi 45 menit setiap jam pelajaran; (b) kegiatan terstruktur, beban belajar kegiatan terstruktur paling banyak 60% dari waktu kegiatan tatap muka yang bersangkutan; dan (c) kegiatan mandiri yang jumlah beban belajarnya sama dengan kegiatan terstruktur yakni 60% dari waktu kegiatan tatap muka. Berikut ini disajikan tabel penjabaran beban belajar masing-masing kelas X, XI dan XII dalam kurikulum 2013.

Tabel 2. 2. Struktur Kurikulum 2013

No.	Mata Pelajaran	Beban Semester	Jumlah
-----	----------------	----------------	--------

		1	2	3	4	5	6	
Kelompok A (Umum)								
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3	3	3	3	18
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2	12
3	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4	24
4	Matematika	4	4	4	4	4	4	24
5	Sejarah Indonesia	2	2	2	2	2	2	12
6	Bahasa Inggris	2	2	2	2	2	2	12
Kelompok B (Umum)								
7	Seni Budaya	2	2	2	2	2	2	12
8	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	3	3	3	3	3	3	18
9	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2	2	2	2	12
Kelompok C (Peminatan)								
10	Mata Pelajaran 1	3	3	4	4	4	4	22
11	Mata Pelajaran 2	3	3	4	4	4	4	22
12	Mata Pelajaran 3	3	3	4	4	4	4	22
13	Mata Pelajaran 4	3	3	4	4	4	4	22
14	Mata Pelajaran 5	3	3	4	4	4	4	22
15	Mata Pelajaran 6	3	3	4	4	4	4	22
Jumlah Beban Belajar (JP)		42	42	44	44	44	44	260

Sumber: (Direktorat PSMA, 2017)

Berdasarkan Permendikbud No. 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 3 ayat 3 dinyatakan bahwa pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Atas dasar itulah, pengaturan beban belajar dalam SKS merupakan pengaturan beban belajar unit pembelajaran utuh atau disebut dengan UKBM agar tercapai ketuntasan belajar dan penguasaan substansi pada UKBM. Berikut ini merupakan prinsip pengaturan beban belajar pada setiap UKBM:

- a. Beban belajar setiap UKBM diatur secara proporsional dengan jumlah pasangan KD total untuk setiap mata pelajaran SMA.

- b. Beban belajar setiap UKBM disesuaikan dengan tugas belajar (*learning task*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) yang dituntut untuk masing-masing pasangan KD dengan tetap memperhatikan satuan waktu untuk kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

Menurut Permendikbud No. 158 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 7 poin a disebutkan bahwa pengambilan beban belajar oleh peserta didik semester 1 ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai pada satuan pendidikan sebelumnya. Sedangkan poin b menjelaskan bahwa jumlah beban belajar yang diambil pada semester 2 ditentukan berdasarkan perolehan Indeks Prestasi (IP) pada semester sebelumnya. IP merupakan nilai akhir capaian pembelajaran peserta didik pada akhir semester yang mencakup nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan.

Pengaturan jumlah beban belajar yang berhak diambil oleh peserta didik berdasarkan perolehan IP dijelaskan pada Permendikbud No. 158 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 8 ayat 2 yang selanjutnya akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 3. Jumlah Beban Belajar Berdasarkan Capaian IP (Indeks Prestasi) pada Jenjang Pendidikan SMA

Indeks Prestasi	Beban Belajar (JP)
< 2,67	46
2,67 – 3,33	54
3,34 – 3,66	62
> 3,66	70

Sumber: (Direktorat PSMA, 2017)

Ada syarat lain dalam pengambilan jumlah jam pelajaran selain IP, yakni nilai kompetensi sikap peserta didik minimal mendapatkan predikat B (Baik) disamping nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang harus dipenuhi. Syarat tersebut dijelaskan pada pasal 8 ayat 4. Selanjutnya, pada pasal 9 disebutkan bahwa kegiatan tatap muka peserta didik yang mendapat IP > 3,55 berdurasi 30 menit setiap satu jam pelajaran.

2.5.4. Persyaratan Penyelenggaraan SKS

Satuan pendidikan yang dapat menyelenggarakan SKS adalah satuan pendidikan yang sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. SMP/MTs kategori standar dan kategori mandiri dapat melaksanakan SKS.
- b. SMA/MA kategori standar dapat melaksanakan SKS.
- c. SMA/MA kategori mandiri dan bertaraf internasional wajib melaksanakan SKS (BSNP, 2010).

Permendikbud No. 158 Tahun 2014 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa “Satuan pendidikan yang memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah dapat menerapkan SKS dalam penyelenggaraan pendidikan”. Ayat 2 pada pasal yang sama juga disebutkan bahwa penerapan SKS dilakukan secara bertahap mulai kelas VII pada SMP/ MTs atau kelas X pada SMA/MA/SMK/MAK.

2.5.5. Mekanisme Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS)

Mekanisme penyelenggaraan SKS secara umum meliputi tiga tahap utama seperti yang diuraikan dalam pedoman penyelenggaraan SKS yang dikeluarkan oleh Direktorat PSMA pada tahun 2017. Tahapan tersebut ialah persiapan,

pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Berikut ini diuraikan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan SKS:

a. Persiapan

Komponen yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan SKS melaksanakan perannya sesuai dengan jabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk menghasilkan *output* berupa, (1) dukungan penyelenggaraan SKS dari warga sekolah dan pemangku kepentingan lain; (2) dokumen KTSP; (3) dokumen perangkat pembelajaran dan perangkat penilaian; dan (4) dokumen perangkat layanan akademik dan bimbingan. Pada tahap persiapan ini akan dilakukan sosialisasi internal warga sekolah, verifikasi perizinan dan inventarisasi kebutuhan penyelenggaraan SKS, dan sosialisasi internal maupun eksternal. Pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan SKS adalah kepala sekolah, Tim Pengembang Kurikulum (TPK), guru, Pembimbing Akademik (PA) dan BK.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan SKS dilakukan dengan menerapkan 7 prinsip penyelenggaraan SKS, menggunakan struktur kurikulum 2013 dan menentukan beban belajar, memetakan peserta didik berdasarkan kecepatan belajarnya, menentukan peminatan peserta didik dan rombongan belajar, pengaturan jadwal kegiatan pembelajaran dan menentukan kriteria kelulusan.

c. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah dengan menggunakan Instrumen Monev atau LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan atas

koordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMA. Pengawasan dilakukan mulai dari persiapan sampai dengan kelulusan peserta didik. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh baik sekolah sebagai institusi maupun guru sebagai individu pelaksana SKS. Secara institusional, SMA pelaksana SKS dapat melakukan evaluasi diri dengan instrumen tertentu dalam pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi atau bekerjasama dengan LPMP.

Hasil evaluasi berguna untuk mendata keberhasilan atau kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan untuk dijadikan pertimbangan melakukan perbaikan dan penyempurnaan berikutnya. Informasi tersebut bermanfaat bagi sekolah penyelenggara SKS untuk menyempurnakan program yang dilakukan pada periode berikutnya. Evaluasi keterlaksanaan SKS meliputi evaluasi kinerja satuan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester, meliputi: (1) tingkat kehadiran peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan; (2) keterlaksanaan KTSP dan kegiatan ekstrakurikuler; dan (3) hasil belajar peserta didik. Hasil evaluasi selanjutnya dilaporkan kepada pemangku kepentingan, seperti Dinas Pendidikan, dan pihak lain yang memerlukan.

Terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SKS, yang terdiri dari pemerintah, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pendidikan (LPMP), pemerintah daerah, pengawas, komite sekolah, kepala sekolah, BK, pembimbing akademik (PA), dan tenaga kependidikan. Masing-masing pihak tersebut memiliki peran yang berbeda dalam mendukung terselenggaranya penerapan SKS di sekolah.

2.6. Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu dipahami konsep kurikulum agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam mengartikan pengertian kurikulum. Berikut ini disajikan pengertian kurikulum menurut beberapa sumber:

a. Pengertian Kurikulum secara Harfiah (Bahasa)

Istilah kurikulum berasal dari Bahasa Latin, yaitu “*curriculae*” yang artinya ialah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Maksudnya kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dengan kata lain, kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu (Hamalik, 2009b).

b. UU No. 20 Tahun 2003

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

c. Hilda Taba dalam bukunya yang berjudul *Curriculum Development, Theory, and Practice*

Kurikulum merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak agar berpartisipasi sebagai anggota yang produktif dalam masyarakatnya (Nasution, 2008).

d. S. Nasution (2009)

Kurikulum adalah rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar dibawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya (Nasution, 2009).

e. Oemar Hamalik (2009)

Oemar Hamalik memandang bahwa kurikulum memuat isi dan materi pelajaran, kurikulum sebagai rencana pembelajaran, dan kurikulum sebagai pengalaman belajar. Jadi pada intinya kegiatan kurikulum tidak terbatas pada ruang kelas saja, melainkan juga kegiatan-kegiatan diluar kelas, baik itu intra maupun ekstra kurikulum yang di dalamnya termasuk pengalaman belajar (Hamalik, 2009b).

f. Jarot Tri Bowo Santoso (2013)

Jarot memandang bahwa kurikulum terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: (1) seperangkat rencana, yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang dilakukan dengan proses pembelajaran; (2) pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran; (3) pengaturan cara (metode) yang digunakan; (4) sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar; (5) untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan (Santoso, 2013).

Berdasarkan beberapa definisi kurikulum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana yang berisi muatan materi dan metode mengajar tertentu yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan agar peserta didik dapat menyesuaikan diri di dalam masyarakat dan tercapai tujuan pendidikan nasional.

2.7. Kurikulum 2013

2.7.1. Pengertian Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2013/2014. Kurikulum 2013 ini menitikberatkan pada peningkatan dan keseimbangan *softskills* dan *hardskills* dimulai dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Keseimbangan *softskills* dan *hardskills* yang dimaksud meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kedudukan kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran, berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Selain itu, pembelajaran dalam kurikulum 2013 bersifat tematik integratif dalam semua mata pelajaran (Fadlillah, 2014).

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan tematik-integratif dan ilmiah/saintifik (*scientific approach*). Pendekatan tematik-integratif berarti bahwa dalam pembelajaran tersebut dibuat per tema dengan mengacu karakteristik peserta didik dan dilaksanakan secara integrasi antara satu tema dengan yang lain maupun antar mata pelajaran. Sedangkan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), menalar (*associating*), mencoba (*experimenting*), dan mengkomunikasikan (*communicating*). Kelima proses belajar saintifik tersebut diterapkan pada saat memasuki inti pembelajaran (Fadlillah, 2014).

2.7.2. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
- b. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;
- c. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- d. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran;
- e. Mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
- f. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar-mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). (Sumber: <http://gerbangkurikulum.psm.kemdikbud.go.id/profil/>)

2.7.3. Landasan Pengembangan Kurikulum 2013

Menurut Mulyasa (2014) dan Fadlillah (2014) pengembangan kurikulum 2013 dilandasi secara filosofis, yuridis, dan konseptual. Berikut penjelasan dari masing-masing landasan tersebut:

a. Landasan filosofis

Landasan filosofis adalah landasan penyusunan kurikulum yang didasarkan pada kerangka berpikir dan hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Landasan filosofis kurikulum 2013 yaitu berupa (1) Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan; (2) filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat; (3) kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi.

b. Landasan yuridis

Landasan yuridis adalah suatu landasan yang digunakan sebagai payung hukum dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Landasan yuridis yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013 antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (3) RPJMN 2010-2014 Sektor Pendidikan yang berisi tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum; (4) INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, Penyempurnaan Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran Aktif berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Bangsa untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa; (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (6) Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.

c. Landasan konseptual

Landasan konseptual adalah landasan yang didasarkan pada ide atau gagasan yang diabstraksikan pada peristiwa konkret. Landasan konseptual dalam pengembangan kurikulum 2013 antara lain: (1) relevansi pendidikan (*link and match*); (2) model kurikulum berbasis kompetensi dan karakter; (3) kurikulum lebih dari sekadar dokumen; (4) proses pembelajaran, yang meliputi aktivitas belajar, *output* belajar dan *outcome* belajar; (5) pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*); (6) pembelajaran aktif (*student active learning*); (7) penilaian, kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi dan penjenjangan penilaian.

2.7.4. Penilaian Autentik dalam Kurikulum 2013

Penilaian dalam kurikulum 2013 lebih ditekankan pada penilaian autentik. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai (Sunarti & Rahmawati, 2014). Berdasarkan lampiran Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian, penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai, mulai dari proses hingga keluaran (*output*) pembelajaran. Penilaian autentik mencakup ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 4. Ranah Penilaian Autentik

Kompetensi/Ranah	Teknik	Proses	Hasil
Sikap	Observasi	V	v
	Penilaian diri		v
	Penilaian antar teman		v
	Jurnal	V	

Kompetensi/Ranah	Teknik	Proses	Hasil
Pengetahuan	Tes tertulis		v
	Tes lisan		v
	Penugasan	V	v
Keterampilan	Unjuk kerja	V	v
	Proyek	V	v
	Portofolio	V	v

Sumber: (Sunarti & Rahmawati, 2014)

2.8. Kerangka Teoritis

Teori konstruktivisme Seymour Papert memandang bahwa peserta didik adalah individu yang bersifat unik, sehingga keunikan tersebut perlu dijadikan sebagai pertimbangan dalam memformulasikan suatu pembelajaran. Peserta didik melalui berbagai pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya diharapkan mampu memecahkan suatu masalah dari yang sederhana menuju masalah yang kompleks. Peran guru dalam pembelajaran hanya sebagai fasilitator agar peserta didik mampu menerapkan kemampuannya dalam proses pemecahan masalah melalui metode *discovery* dan eksperimen.

Teori yang memperhatikan keberagaman potensi peserta didik adalah teori humanistik. Dalam pembelajaran humanistik, peserta didik berhak menentukan materi pelajaran yang akan digunakan didalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengaktualisasikan kemampuan dan potensi dirinya melalui pembelajaran. Tujuan utama dari teori ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik melalui pembelajaran aktif dan kreatif sehingga peserta didik dapat berpikir kritis serta mampu menyelesaikan masalah secara mandiri.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif terhadap suatu penyelenggaraan pendidikan yang memperhatikan potensi dan kemampuan peserta didik sebagai individu yang unik, maka dalam proses pembelajarannya harus menggunakan

metode yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Pola pembelajaran harus menuntut keaktifan peserta didik dengan dibantu oleh guru agar tercipta pembelajaran yang aktif dan dapat dijadikan sebagai ajang aktualisasi diri peserta didik di kelas. Kegiatan pembelajaran yang demikian ini akan dapat membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis peserta didik serta mampu mengintegrasikan kompetensi yang dimilikinya dengan kehidupan nyata. Penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan deskripsi tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan program Sistem Kredit Semester (SKS) yang terintegrasi dengan kurikulum 2013. Jadi, dalam hal ini pembelajaran dilakukan dengan kontekstualisme dan tetap memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik. Berikut ini akan diuraikan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Cheung & Wong (2012) dengan penelitiannya yang berjudul “*Factors Affecting the Implementation of Curriculum Reform in Hong Kong*”. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam terhadap 150 sekolah dasar dan 120 sekolah menengah dengan 7.869 pemangku kepentingan utama termasuk kepala sekolah, para pemimpin kurikulum, guru, serta peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor yang menghambat dan memfasilitasi sekolah selama tahap pertama reformasi kurikulum (2001-2006) di Hong Kong dan mengidentifikasi strategi untuk menghadapi hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kurikulum di Hong Kong ini masih terdapat kendala dalam tahap implementasi yaitu berupa beban kerja guru yang berat, keberagaman

pembelajaran peserta didik di kelas, dan pemahaman guru terhadap kurikulum masih kurang memadai.

Penelitian Ekasari, Pitoewas, & Nuralisa (2013) yang berjudul “Pengaruh Kesiapan Sekolah terhadap Pelaksanaan Program Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013” yang merupakan penelitian deskriptif kuantitatif bertempat di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara kesiapan sekolah terhadap pelaksanaan sistem kredit semester di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Kesiapan sekolah tersebut meliputi kesiapan guru, siswa, sarana prasarana serta lingkungan terhadap program Sistem Kredit Semester.

Penelitian Hardini (2016) yang berjudul “Evaluasi Program Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Salatiga” yang merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan model evaluasi CIPP dan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut dilakukan di SMA Negeri 1 Salatiga dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut: (1) penyelenggaraan program Sistem Kredit Semester (SKS) dari segi konteks didasarkan atas kebutuhan yang ada pada sekolah yaitu memfasilitasi peserta didik dengan kategori cerdas istimewa (CI) agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya; (2) penyelenggaraan program SKS dari segi masukan meliputi rencana pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, guru, peserta didik, pembiayaan, sarana prasarana dan jadwal cukup memadai; (3) penyelenggaraan program SKS dari segi proses telah dilaksanakan sesuai perencanaan program, walaupun program SKS yang berjalan masih semi

paket karena kepentingan pemenuhan jam mengajar guru, dan keterbatasan ruang; (4) penyelenggaraan program SKS dari segi hasil sudah sesuai dengan tujuan awal program dan terdapat peningkatan hasil ujian nasional dari tahun ke tahun; dan (5) pelaksanaan program SKS berdasarkan kriteria rekomendasi kebijakan meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan kelayakan telah terpenuhi sehingga program dapat tetap dilanjutkan namun ada beberapa revisi mengenai *input* program.

Penelitian Alam & Utami (2016) yang berjudul “Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan pada Jenjang SMA di Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah sekolah yang telah menerapkan program SKS di kabupaten Sidoarjo, yaitu SMA Negeri 1 Sidoarjo, SMA Negeri 2 Sidoarjo, SMA Negeri 3 Sidoarjo, SMA 1 Krembung, SMA 1 Krian, dan SMA 1 Taman. Hasil penelitian dengan indikator 6 standar berupa standar proses, standar sarana prasarana, standar pendidik, standar biaya pendidikan, standar pengelolaan, dan standar penilaian secara keseluruhan mendapatkan nilai yang baik.

Penelitian Rostika & Zulkarnain (2016) yang berjudul “Analisis Implementasi Kurikulum 2013 dengan Sistem Kredit Semester” yang merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 dengan

SKS di SMA Negeri 1 Batu sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum maksimal. Selain itu, ditemukan pula berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap penerapan kurikulum 2013 dengan SKS di SMA Negeri 1 Batu.

Penelitian Wahid (2016) yang berjudul “Penerapan Program Sistem Kredit Semester (SKS) Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta”. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi dan lokasi penelitian dilakukan di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat menerapkan SKS dibutuhkan sekolah dengan kualifikasi tertentu. Kualifikasi tersebut yakni berupa dukungan internal dan eksternal. Dukungan internal meliputi kinerja sekolah, kurikulum, kesiapan sekolah, dan sumber daya manusia. Sedangkan dukungan eksternal meliputi dukungan komite sekolah, orang tua, peserta didik, dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta dukungan dari tenaga pendamping pelaksanaan SKS.

Penelitian Aithal & Kumar (2016) yang berjudul “*Analysis of Choice Based Credit System (CBCS) in Higher Education*”. CBCS merupakan suatu program yang memungkinkan mahasiswa dapat memilih kursus yang akan diikutinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBCS merupakan langkah untuk membawa efisiensi dan keunggulan dalam sistem pendidikan tinggi India. CBCS memungkinkan siswa melakukan mobilitas dengan mudah ke berbagai lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh dunia bersama dengan fasilitas transfer kredit yang diterima oleh siswa.

Mir (2017) dengan penelitiannya yang berjudul “*Issues and Challenges of Choice Based Credit System (CBCS): Insight from University of Kashmir*”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui masalah dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi CBCS di Universitas Kashmir yang mulai diterapkan semenjak tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBCS membatasi peran pendidikan dalam mendorong pengembangan individu dan justru meningkatkan masalah yang sudah ada di sistem pendidikan tinggi India. Hal ini dikarenakan memang CBCS tersebut belum lama diterapkan sehingga masih dalam tahap pertumbuhan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antarsemua *stake holder* dan dibutuhkan dukungan dari faktor politik, sosial, ekonomi, serta geografi agar CBCS dapat berjalan dengan baik.

Penelitian Muhlis (2017) yang berjudul “*Pengembangan Pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester Di MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Objek penelitian yaitu MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SKS dapat memunculkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dikalangan guru maupun peserta didik yang terlihat pada peningkatan mutu layanan bagi madrasah dan peningkatan kualitas diri bagi guru serta peningkatan prestasi bagi peserta didik. Namun ketersediaan buku pelajaran yang sesuai dengan karakter pembelajaran SKS tidak tersedia sehingga pihak madrasah perlu melakukan akselerasi untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar yang sesuai dengan standarisasi pengelolaan program SKS.

2.9. Kerangka Berpikir

Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan program penyelenggaraan pendidikan yang memperhatikan bakat, minat, dan kecepatan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Program tersebut sebenarnya sudah diatur sejak lama melalui Permendikbud No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi yang menyebutkan bahwa “Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau Sistem Kredit Semester.” Namun program tersebut baru mulai digalakkan oleh pemerintah sejak tahun 2013/2014 dengan menunjuk sekolah-sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) untuk mengaplikasikan SKS dalam penyelenggaraan pendidikannya. Sekolah-sekolah tersebut sekaligus dijadikan sebagai acuan atau contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam menerapkan SKS. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan SKS. Selain itu juga disusun pedoman penyelenggaraan SKS yang selalu diperbaharui, dan untuk saat ini pedoman terbaru yaitu Pedoman Penyelenggaraan SKS yang dikeluarkan oleh Dirjen PSMA (Direktur Jenderal Pendidikan Sekolah Menengah Atas) tahun 2017.

SMA Negeri 1 Bantarsari mencoba menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS) dalam pembelajarannya sejak tahun ajaran 2017/2018 dengan berdasar pada beberapa regulasi pemerintah yang mengatur tentang SKS. Penyelenggaraan pendidikan dengan SKS sebenarnya sudah dicanangkan sejak

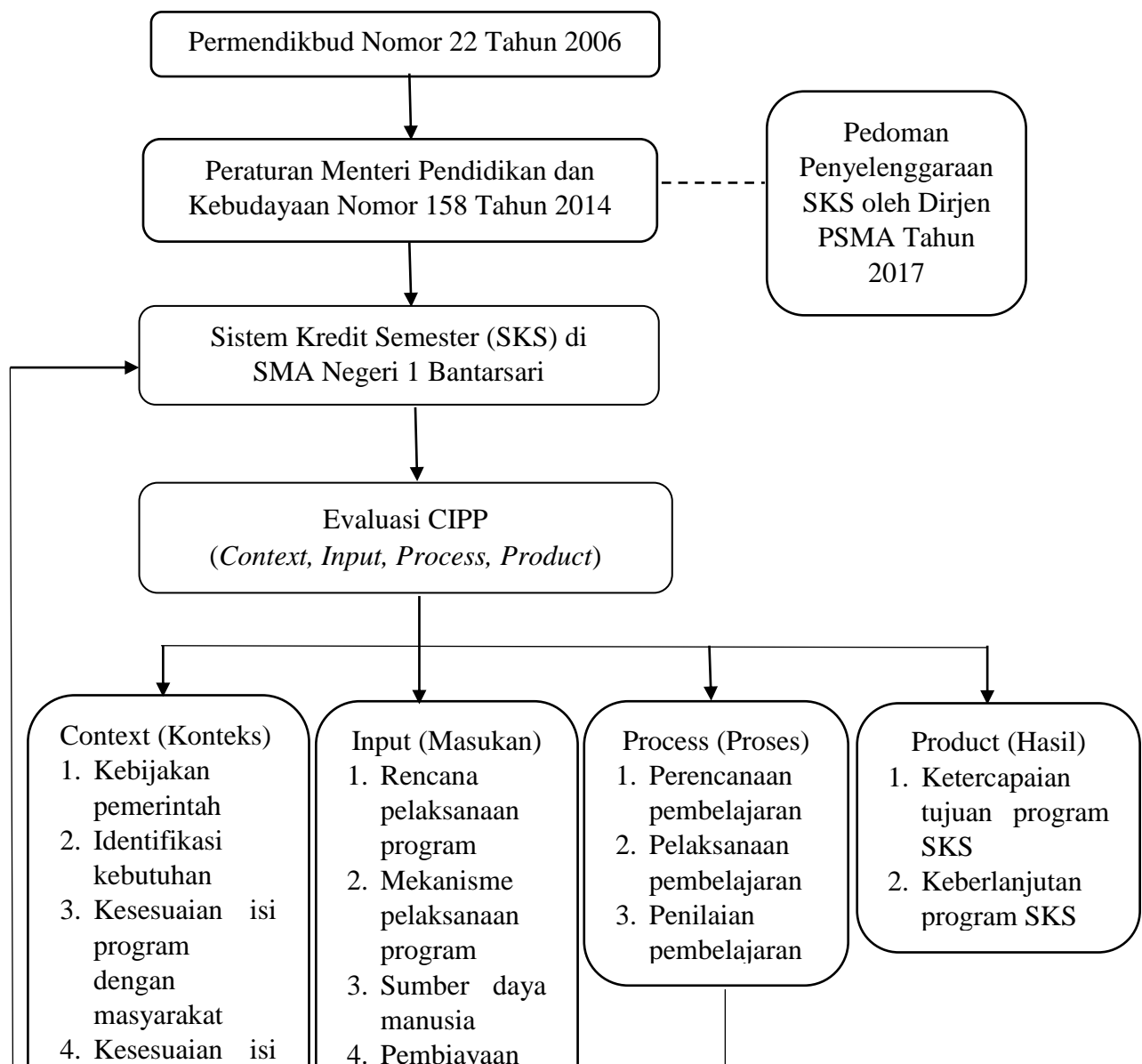
lama oleh pemerintah, namun belum banyak satuan pendidikan yang menerapkan program SKS. Evaluasi mengenai penerapan program SKS perlu dilakukan agar hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi satuan pendidikan yang ada di Indonesia untuk segera mengadopsi SKS atau tetap mempertahankan sistem paket. Evaluasi program SKS pada penelitian ini terfokus pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari. Model evaluasi yang digunakan yaitu model *Context, Input, Process, Product* (CIPP) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Penggunaan model tersebut karena dinilai dapat mengevaluasi secara komprehensif dari segi konteks, masukan, proses dan produk serta bertujuan untuk menyajikan data bagi pengambil kebijaksanaan mengenai pendidikan.

Aspek *context* digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan program. Aspek *context* pada penerapan program SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari meliputi kebijakan pemerintah, identifikasi kebutuhan, kesesuaian isi program dengan masyarakat dan kesesuaian isi program dengan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Evaluasi konteks diperlukan untuk mendiagnosis masalah dan menilai kebutuhan agar implementasi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa lulusan.

Aspek *input* meliputi rencana pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan program, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana prasarana, dan layanan kesiswaan. Evaluasi aspek *input* dimaksudkan untuk mengetahui apakah sumber daya yang dimiliki sekolah sudah mencukupi sehingga implementasi program SKS dapat berjalan dengan baik.

Aspek *process* berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran hingga proses penilaian pembelajaran. Tujuan evaluasi proses adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan yang dimaksud dalam pedoman penyelenggaraan SKS ataukah masih ada kendala yang dihadapi.

Aspek *product* berkaitan dengan ketercapaian tujuan program SKS dan keberlanjutan program Sistem Kredit Semester (SKS). Keberlanjutan program Sistem Kredit Semester (SKS) berkaitan dengan kendala yang dihadapi sekolah dalam menyelenggarakan SKS, kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi atau solusi perbaikan program agar tetap berlanjut ataukah menghentikan penyelenggaraan program SKS. Berikut ini disajikan bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir

BAB V
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)
DARI ASPEK *CONTEXT*

Evaluasi *context* (konteks) merupakan evaluasi yang berkaitan dengan dasar pertimbangan penerapan suatu program tertentu. Menurut Sukardi (2009) evaluasi konteks menghasilkan evaluasi tentang macam-macam kebutuhan yang telah diatur prioritasnya, agar tujuan dapat diformulasikan. Sedangkan Hasan (2008) mengemukakan bahwa evaluasi *context* (konteks) adalah evaluasi terhadap lingkungan dimana kurikulum tersebut dikembangkan dan akan dilaksanakan yang dapat meliputi lingkungan sosial, ekonomi, budaya, seni, politik, pelaksanaan kehidupan beragama, dan teknologi. Dalam situasi tertentu orang melakukan evaluasi konteks mengenai tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan sering disebut dengan istilah *need assessment*. Pendapat Hasan tersebut diperkuat oleh Tseng, Ray Diez, Lou, & Tsai (2010) yang menyatakan bahwa evaluasi *context* berhubungan dengan apakah kurikulum meliputi fokus, tujuan dan sasaran kurikulum, yang berarti parameter organisasi. Hal ini juga menilai lingkungan dimana evaluasi berlangsung. Data agregat dan informasi yang dikumpulkan berfungsi sebagai dasar untuk keputusan kurikulum dan perkembangan tujuan selanjutnya. Evaluasi konteks meliputi kebijakan, lingkungan, dan penilaian kebutuhan.

Aspek *context* berkaitan dengan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan sekolah sebelum memutuskan untuk menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). Pertimbangan tersebut dapat berkaitan dengan kebutuhan sekolah ataupun

tuntutan dari lingkungan diluar sekolah untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Peneliti merumuskan aspek *context* dalam penelitian ini kedalam beberapa komponen yaitu kebijakan pemerintah, identifikasi kebutuhan, kesesuaian isi program dengan masyarakat, dan kesesuaian isi program dengan kemajuan IPTEK.

5.1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk regulasi atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) menjadi salah satu bahan pertimbangan SMA Negeri 1 Bantarsari. Pertimbangan landasan yuridis pada aspek konteks penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari sesuai dengan pendapat Hasbullah dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif”. Hasbullah (2015) mengemukakan bahwa salah satu hal yang diperlukan dalam upaya implementasi kebijakan pendidikan adalah peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan. Implementasi kebijakan dijabarkan dalam produk-produk hukum atau instruksi-instruksi lainnya yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Fadlillah dan Mulyasa (2014) juga mengemukakan bahwa salah satu landasan pengembangan kurikulum adalah landasan yuridis yang berarti landasan yang digunakan sebagai payung hukum.

Kebijakan pemerintah yang menyebutkan mengenai program SKS dimuat dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun peraturan mengenai penyelenggaraan SKS tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 yang selanjutnya menjadi

dasar hukum penyelenggaraan SKS di Indonesia. Pemerintah juga membuat aturan-aturan tambahan berupa pedoman penyelenggaraan SKS yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Dirjen PSMA) tahun 2017, peraturan mengenai pembelajaran tuntas, UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri), dan lain sebagainya. SMA Negeri 1 Bantarsari kemudian memutuskan untuk menyelenggarakan SKS sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat undang-undang. Peraturan-peraturan tersebut merupakan landasan yuridis penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Mokhtar, S. Pd., M. Pd. selaku Kepala SMA Negeri 1 Bantarsari yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Yang jelas ya sistem pendidikan nasional dulu ya, UU Sistem Pendidikan Nasional itu, berikutnya adalah Permendikbud 158 tahun 2014. Lalu sekarang sudah mulai ada lagi istilahnya peraturan-peraturan lain yang mendukung, tapi Permendikbud 158 itu belum dihapus menjadi acuan, cuma belum ada perbaikan ataupun hal-hal yang diatur disitu.” (W.KS.14052019)

Dasar hukum penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) yang berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang bersifat universal. Artinya, peraturan tersebut berlaku bagi seluruh sekolah yang memenuhi kriteria yang tercantum di dalam peraturan itu berhak menyelenggarakan SKS. Ada peraturan lain yang bersifat khusus ditujukan untuk sekolah penyelenggara SKS. Peraturan tersebut ialah SK (Surat Keputusan) dari pemerintah yang memutuskan dan memberikan izin kepada sekolah untuk menyelenggarakan SKS. Kewenangan tersebut dalam hal ini dipegang oleh Dinas Propinsi Jawa Tengah, sehingga SMA Negeri 1 Bantarsari juga menerapkan SKS atas dasar tersebut. Selain surat keputusan dari propinsi, kepala sekolah sebagai pemimpin juga tentunya

mengeluarkan SK penyelenggaraan SKS. SK tersebut bersifat resmi agar program SKS tersebut dapat dilaksanakan di dalam satuan pendidikan yang dipimpinnya dan dipatuhi oleh seluruh civitas akademika yang berada di sekolah. Sekolah baru bisa mengeluarkan SK tersebut setelah mendapatkan izin dari dinas propinsi untuk menyelenggarakan SKS. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala sekolah sebagai berikut:

“Oh iya jelas. Sekolah itu sebenarnya kan SK yang utama bukan dari sekolah. Kalau sekolah menyelenggarakan ini meminta izin kepada dinas propinsi, baru mendapatkan SK bahwa sekolah itu menyelenggarakan SKS.” (W.KS.14052019)

Pada pelaksanaannya, SK dari dinas propinsi tidak bisa langsung dikeluarkan ketika sekolah akan menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS). SK tersebut baru keluar setelah sekolah menyelenggarakan SKS selama kurang lebih satu tahun, jadi dalam kurun waktu satu tahun tersebut merupakan masa uji coba atau penjajakan SKS di sekolah. Dinas propinsi perlu melihat perkembangan penyelenggaraan SKS di sekolah yang bersangkutan dan menilai apakah sekolah mampu menyelenggarakan program SKS atau tidak untuk kemudian diberikan izin secara permanen berkaitan dengan penyelenggaraan SKS. Berikut ini hasil wawancara dengan kepala sekolah yang sesuai dengan pernyataan tersebut:

“Iya. Pertama ya sebenarnya kalau menyelenggarakan tetap belum ada SK-nya lah ya. SK setelah berjalan setahun keluarnya, kemudian ada beberapa sekolah yang baru berjalan sebentar sudah jadi. Mungkin uji coba lah, kalau dinyatakan sudah siap oke menyelenggarakan kurikulumnya dalam Permendikbud itu memang ada dasar yang bisa mengarahkan sekolah yang sudah terakreditasi A. Kelihatannya perubahan yang terbaru ini tidak wajib ya, kemudian juga waktu itu heterogen, kalau yang terbaru ini boleh homogen.” (W.KS.14052019)

Pernyataan tersebut juga sama dengan pernyataan Bapak Istiawan Agus H, S. Pd. selaku waka kurikulum di SMA Negeri 1 Bantarsari. Berikut ini pernyataan waka kurikulum berkaitan dengan SK dinas propinsi tersebut:

“Belum. SK-nya baru berjalan setahun lah, baru keluar SK.”
(W.WK.24042019)

Kesimpulan dari segi *context* adalah SMA Negeri 1 Bantarsari memperhitungkan kebijakan pemerintah yang memiliki payung hukum penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS). Kebijakan tersebut berupa kebijakan yang bersifat universal dan kebijakan yang bersifat khusus ditujukan untuk sekolah penyelenggara SKS. Kebijakan universal tersebut berupa UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKS pada Pendidikan Dasar dan Menengah, Pedoman Penyelenggaraan SKS oleh Dirjen PSMA, dan peraturan pendukung lainnya. Sedangkan kebijakan khususnya ialah SK dari dinas propinsi dan SK Kepala SMA Negeri 1 Bantarsari yang menyatakan bahwa sekolah tersebut menyelenggarakan pendidikan berbasis SKS. SK tersebut digunakan sebagai bukti otentik bahwa SMA Negeri 1 Bantarsari telah mendapatkan izin penyelenggaraan dan secara resmi dapat menyelenggarakan SKS dalam satuan pendidikannya. Meskipun dalam pelaksanaannya, surat keputusan dari dinas propinsi baru dikeluarkan setelah sekolah menyelenggarakan SKS selama satu tahun.

Aspek konteks pada penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari sejalan dengan penelitian Hardini (2016) mengenai analisis implementasi SKS di SMA Negeri 1 Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu aspek

konteks yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan penerapan SKS di SMA Negeri 1 Salatiga yaitu adanya kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dijadikan sebagai dasar hukum penerapan SKS di SMA Negeri 1 Salatiga adalah Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Sekolah Menengah Atas tanggal 13 April 2010 dari Badan Standar Nasional Pendidikan serta Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKS pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

5.2. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan berkaitan dengan kesadaran sekolah dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikannya. Faktor kebutuhan ini bersinggungan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan pemerintah menyebutkan bahwa Sistem Kredit Semester (SKS) ini bukanlah program wajib yang harus dijalankan oleh seluruh sekolah, melainkan suatu program pilihan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada sekolah yang sudah terakreditasi A ataupun sekolah-sekolah rujukan yang dulunya menyandang gelar RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional). SKS ini disebut sebagai inovasi program pembelajaran selain sistem paket agar peserta didik dapat dilayani sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Oleh karena itu, SMA Negeri 1 Bantarsari akhirnya mencoba untuk menerapkan SKS, seperti yang diungkapkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Bantarsari sebagai berikut:

“Pertimbangannya salah satunya ingin ada inovasi pendidikan, melayani siswa sesuai dengan kemampuan cara belajarnya. Jadi siswa yang memiliki kecepatan belajar ya dilayani, siswa yang agak pelan ya dilayani sesuai dengan kemampuannya. Jadi mereka istilahnya fleksibel lah, jadi siswa itu yang pandai ataupun mempunyai kecepatan belajar dalam enam semester

yang ditempuh itu bisa ditempuh dalam empat semester berarti dua tahun. . .”
(W.KS.14052019)

Waka kurikulum SMA Negeri 1 Bantarsari juga mengungkapkan hal yang senada, namun beliau juga menambahkan bahwa dengan diterapkannya SKS di sekolah, maka pemerintah akan memprioritaskan bantuan-bantuan pendidikan yang akan diberikan kepada sekolah penyelenggara SKS. Berikut ini pernyataan waka kurikulum berkaitan dengan hal tersebut:

“Pertimbangannya SKS kan ya sebagai terobosan dalam pembelajaran ya, maksudnya dalam pembelajaran biar ada pembeda dengan sekolah yang lain. Kebetulan juga kalau SKS kan langsung di dirjen nasional, jadi nanti untuk bantuan-bantuan lebih mudah karena sudah diprioritaskan untuk yang SKS. Yang ketiga juga untuk siswa merasa walaupun ini enggak nyaman, tapi merasa adil. Jadi yang cepat itu bisa terlayani, terus yang sedang juga terlayani, terus yang lambat nanti bisa dipacu agar sama dengan yang sedang.” (W.WK.24042019)

Bapak Wahyu Eddy Purwoko, S. Pd. selaku guru ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari juga membenarkan pernyataan waka kurikulum tersebut bahwa sekolah penyelenggara SKS akan lebih mudah mendapatkan bantuan pendidikan. Berikut ini pernyataan yang dilontarkan oleh guru ekonomi yang menguatkan pernyataan waka kurikulum tersebut:

“Masalahnya diiming-imingi bantuan dan lain sebagainya. Jadi SKS kan nanti ada *back up*-nya. Ada bantuan besar-besaran terkait untuk mendukung program SKS, nanti ada kebijakan pemerintah yang hubungannya untuk mendukung, untuk mengelola program SKS. Jadi dananya kalau mereka enggak ada dana pendukung, sekolah-sekolah yang sudah memiliki sarana prasarana bagus nyatanya enggak mau menyelenggarakan SKS.”
(W.GE.24042019)

Kesimpulannya adalah penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Negeri 1 Bantarsari merupakan salah satu upaya pengembangan sekolah dan inovasi pendidikan dalam hal pembelajaran. SMA Negeri 1 Bantarsari

menginginkan pembelajaran di sekolah dapat melayani keberagaman peserta didik dan sebagai salah satu pembeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Motivasi lainnya yang berkaitan dengan aspek kebutuhan ini dikarenakan pemerintah akan lebih memprioritaskan bantuan-bantuan kepada satuan pendidikan penyelenggara SKS. Pertimbangan tersebut sesuai dengan evaluasi konteks yang dikemukakan oleh Tseng et al. (2010) bahwa salah satu bentuk evaluasi konteks adalah dikarenakan adanya kebutuhan.

5.3. Kesesuaian Isi Program dengan Masyarakat

Maksud dari kesesuaian isi program dengan masyarakat adalah lulusan sekolah penyelenggara SKS dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan di masyarakat. Harapannya nanti lulusan SMA Negeri 1 Bantarsari dapat memiliki keterampilan yang fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu bersaing dengan sumber daya manusia lainnya. Penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari memang belum menghasilkan lulusan dari program ini karena baru berjalan selama dua tahun ajaran sehingga pihak SMA Negeri 1 Bantarsari belum dapat memprediksi seperti apa lulusan dari program SKS ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh waka kurikulum sebagai berikut:

“Sebenarnya ya kalau tujuan pendidikan kan sama ya, kalau SKS kan hanya sistemnya saja. Insya Allah nanti ya untuk kedepannya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. . .” (W.WK.24042019)

Kepala SMA Negeri 1 Bantarsari juga memberikan komentar yang menguatkan waka kurikulum sebagai berikut:

“Saya kira kurikulum tujuannya begitu kan.” (W.KS.14052019)

Guru ekonomi SMA Negeri 1 Bantarsari juga berpendapat bahwa hasil program SKS ini belum dapat diukur karena pelaksanaannya belum maksimal dan masih diperlukan evaluasi. Berikut ini pernyataan guru ekonomi SMA Negeri 1 Bantarsari berkaitan dengan hal tersebut.

“SKS disini belum maksimal karena memang SKS itu program baru. Kita harus tahu ini lebih banyak kepada kemampuan siswa untuk mengikuti. Jadi guru ini kadang harus mewajibkan anak untuk berkompetisi. Mungkin KD (Kompetensi Dasar) ini sudah selesai, anak selesai kemudian dia belajar lagi di KD kedua terus menyampaikan apa yang dia pelajari di KD kedua. Kita harus berikan suatu rangsangan, ‘Ini di KD kedua sudah selesai apa belum? dibaca kemudian maju ke saya. Apa yang sudah kamu baca, dipahami nanti ada penilaian’. Kalau kebutuhan sekarang kita belum bisa melihat hasilnya, itu kan perlu adanya evaluasi SKS.” (W.GE.24042019)

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan kurikulum memang untuk mempersiapkan lulusan yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Begitupun dengan SMA Negeri 1 Bantarsari berharap penyelenggaraan SKS di sekolah dapat meningkatkan kualitas lulusan sekolah tersebut, namun demikian hasil tersebut belum dapat diketahui karena penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari masih tergolong baru dan membutuhkan evaluasi terkait program tersebut. Penelitian Alam & Utami (2016) mengenai SKS di SMA Negeri 1 Sidoarjo menghasilkan temuan bahwa pemberlakuan program SKS di sekolah tersebut dinilai sebagai inovasi pendidikan yang ditinjau untuk meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan. *Output* SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari memang belum dapat diketahui, namun hasil penelitian lain menunjukkan bahwa SKS merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan daya saing pendidikan.

5.4. Kesesuaian Program dengan Kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)

Penggunaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dewasa ini memang sangat penting. Dunia pendidikan berusaha menyesuaikan penyelenggaraan pendidikannya dengan menerapkan teknologi terkini, maka sekolah sebaiknya memilih program yang dapat diintegrasikan dengan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Program Sistem Kredit Semester (SKS) yang ada di SMA Negeri 1 Bantarsari sudah disesuaikan dengan kemajuan IPTEK. Hal tersebut ditandai dengan adanya pemanfaatan teknologi didalam proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan lingkungan sekolah itu sendiri seperti yang disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Bantarsari sebagai berikut:

“Insya Allah sudah masuk hampir semua mapel yah yang sebenarnya sudah menggunakan IT dan kita semaksimal mungkin. SMA Negeri 1 Bantarsari itu mungkin salah satu sekolah yang sudah mempersilahkan siswanya untuk membawa HP untuk proses pembelajaran, walaupun untuk sekolah-sekolah tertentu belum diizinkan. Kalau disini kita izinkan walaupun dengan pengawasan, seperti pemanfaatan IT ini bisa, bahkan sistem informasi pun bisa diakses. Termasuk SMA Bantarsari pengurusan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sudah tidak pakai kertas lagi, *online*. Pembelajaran pun sudah memanfaatkan laboratorium TIK, kemudian bangunan walaupun ada di desa gitu ya tapi sudah menggunakan (IT)” (W.KS.14052019)

Guru ekonomi SMA Negeri 1 Bantarsari juga memberikan pernyataan yang memperkuat pernyataan kepala sekolah bahwa proses pembelajaran di sekolah sudah memanfaatkan teknologi sebagai berikut:

“IPTEK itu sebenarnya kan program K13 mewajibkan semua guru khususnya mempunyai kemampuan untuk menggunakan IT. Seperti contohnya misalnya penggunaan LCD Proyektor untuk presentasi, terus yang kedua penggunaan HP untuk mencari informasi dari browsing misalnya, menggunakan suatu IT kan.” (W.GE.24042019)

Pemanfaatan teknologi khususnya HP (*Handphone*) ini memiliki beberapa kelemahan seperti yang disampaikan oleh guru ekonomi sebagai berikut:

“Iya. Saya sempat menggunakan HP misalnya menggunakan e-mail ataupun WA (*Whatsapp*), cuma sekarang kalau pakai HP sebenarnya bagus, cuma pada prosesnya itu ada bukti fisiknya susah, kan di WA bukti fisiknya berupa catatan saja. Proses ini lebih banyak ke hasil bukti fisiknya misalnya makalah atau misalnya laporan, nah itu kan ada bukti fisiknya. WA hanya sekedar untuk soal-soal misalnya pertanyaan-pertanyaan singkat gitu bisa.” (W.GE.24042019)

Waka kurikulum juga mengemukakan kelemahan penggunaan HP dalam pembelajaran sebagai berikut:

“...Tahun besok kurang tahu karena itu HP banyak masalah ya kemarin, ada yang hilang dan sebagainya, nggak tahu nanti tahun depan masih diterapkan atau tidak. Sebenarnya sih sangat mendukung ya, namun karena siswanya itu masih salah menggunakan, banyak yang negatif.” (W.WK.24042019)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh peserta didik kelas XI bahwa penggunaan HP memang masih sering disalahgunakan oleh peserta didik. Berikut ini pernyataan peserta didik berkaitan dengan hal tersebut:

“Sudah, tapi nggak semua mapel pakai HP, tergantung gurunya.” (W.PD2.15052019)

“Karena kan kebanyakan siswa disini tuh pemahamannya tentang penggunaan yang baik mengenai IT tuh kurang mbak.” (W.PD2.15052019)

Lebih lanjut lagi waka kurikulum mengemukakan bahwa selain penggunaan HP yang kurang sesuai di kalangan peserta didik, ternyata masih ada guru juga yang belum menguasai teknologi kendala lainnya adalah berhubungan dengan jaringan internet di sekolah. Berikut ini pernyataan waka kurikulum yang berkaitan dengan hal tersebut:

“Iya ada, dulu pernah pakai itu tapi kan keterbatasan dari gurunya untuk itu belum sampai juga. Kalau disini kan *signal*-nya agak susah, ya beberapa operator itu nggak ada *signal*-nya. Siswa nanti *browsing* juga terhambat, ya kalau terhambat itu mungkin bisa ke lab.” (W.WK.24042019)

Penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari juga sudah diintegrasikan dengan teknologi terkini yang dapat mendukung pembelajaran di sekolah.

Penggunaan teknologi tersebut dapat melatih peserta didik agar semakin terampil memanfaatkan teknologi dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin pesat meskipun penggunaan teknologi di SMA Negeri 1 Bantarsari masih terkendala banyak hal. Penelitian (Muhlis, 2017) terhadap implementasi SKS di MTs Negeri Sumber Bungur menghasilkan temuan bahwa pengembangan model pembelajaran SKS merupakan langkah inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

Berdasarkan paparan data penelitian dan pembahasan mengenai aspek *context*, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan SMA Negeri 1 Bantarsari dalam menyelenggarakan SKS didasarkan pada 4 hal yaitu kebijakan pemerintah, identifikasi kebutuhan, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat (*need assessment*), dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kebijakan pemerintah yang menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari adalah UU RI No. 20 Tahun 2003, Peremndikbud No. 158 tahun 2014 dan SK pemberian izin untuk menerapkan SKS dari Dinas Propinsi Jawa Tengah. Pertimbangan lain tentang alasan penerapan SKS mengenai kebutuhan adalah kebutuhan sekolah akan pentingnya inovasi dalam bidang pembelajaran agar berbeda dengan sekolah lainnya, kebutuhan sekolah untuk meningkatkan kualitas lulusan sekolah, dan upaya sekolah untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

DARI ASPEK *INPUT*

Evaluasi *input* berkaitan dengan menentukan sumber daya dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan kurikulum. Tujuan evaluasi *input* harus mendukung pemilihan sumber daya. Evaluasi *input* harus menyertakan rencana kerja, peralatan, dana, dan sumber daya manusia (Tseng et al., 2010). Berdasarkan pedoman penyelenggaraan SKS yang dikeluarkan oleh Direktorat PSMA, terdapat tiga tahapan dalam menyelenggarakan SKS yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi/monitoring. Evaluasi *input* ini dapat dikatakan sebagai tahap persiapan program SKS karena berusaha mengidentifikasi strategi dan sumber daya yang dimiliki sekolah untuk mencapai tujuan program. Aspek evaluasi input meliputi perencanaan pelaksanaan kurikulum, mekanisme pelaksanaan kurikulum, identifikasi sumber daya manusia yang dimiliki, melakukan pembiayaan program, melakukan identifikasi terhadap ketersediaan sarana prasarana, serta mengamati layanan kesiswaan yang diberikan pihak sekolah kepada peserta didik.

6.1. Rencana Pelaksanaan Program

Hamalik (2009a) mengemukakan bahwa tahap perencanaan implementasi kurikulum bertujuan untuk merumuskan visi dan misi yang akan dicapai dan perlu dipertimbangkan berbagai alternatif yang akan digunakan dalam proses implementasi kurikulum. SMA Negeri 1 Bantarsari mulai mempertimbangkan program Sistem Kredit Semester (SKS) setelah mendapatkan informasi terkait dengan SKS dari beberapa pihak. Pertama adalah dari kegiatan studi banding seperti yang disebutkan dalam kutipan wawancara dengan kepala sekolah sebagai berikut:

“Oh iya, jelas pertama kali ketika SMA Negeri 1 Bantarsari itu mengadakan studi banding ke SMA 3 Bandung, sana sebenarnya sudah menyelenggarakan sistem SKS. Berikutnya mencari tahu ternyata di Indonesia sendiri itu sudah banyak yang menyelenggarakan SKS, kalau tidak salah yang pertama kali menyelenggarakan itu SMA 78 Jakarta. . .” (W.KS.14052019)

Kepala SMA Negeri 1 Bantarsari juga menyebutkan selain studi banding dan studi literatur, pihak sekolah juga mendapatkan informasi dari pemerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini ialah Dinas Propinsi Jawa Tengah yang kemudian diundang untuk menjadi narasumber dalam rangka memberikan pemahaman tentang SKS kepada guru dan karyawan. Berikut ini pernyataan kepala sekolah mengenai hal tersebut:

“Iya dari studi banding, cari-cari informasi dan lain sebagainya. Satu lagi ada informasi yang diinformasikan dari Dinas Propinsi melalui bapak Drs. Sutopo ya, istilahnya mengajak ngobrol, beliau menceritakan tentang SKS dan sebagainya. Kemudian saya undang kesini untuk mempresentasikan ataupun memaparkan tentang sistem SKS itu kepada guru dan karyawan dari SMA Negeri 1 Bantarsari.” (W.KS.14052019)

Realisasi perencanaan program Sistem Kredit Semester (SKS) dilakukan dengan membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang secara khusus menangani masalah kurikulum. TPK tersebut berusaha mengkaji program SKS

berdasarkan informasi yang diperoleh dan mempertimbangkan untuk mengadopsi program tersebut atau tidak. Sebenarnya TPK ini sudah ada sebelum diselenggarakan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari seperti yang dijelaskan oleh Kepala SMA Negeri 1 Bantarsari berikut ini:

“Sudah, sudah lama. Sebelum SKS pun sudah ada di sekolah ya ataupun TPS (Tim Pengembang Sekolah). Nah tim pengembang sekolah ini biasanya melibatkan pihak luar, ada komite, ada tokoh masyarakat.” (W.KS.14052019)

Kemudian berkaitan dengan tugas TPK dijelaskan lebih rinci oleh waka kurikulum SMA Negeri 1 Bantarsari sebagai berikut:

“Tim pengembang kurikulum, ya pertama ada beberapa standar nasional dari isi, proses, penilaian dan sebagainya. Itu kan masing-masing tugasnya berbeda-beda, tidak saya terangkan karena memang tugasnya banyak sekali, soalnya banyak banget. Intinya kalau yang tugas tim pengembang kurikulum yang pertama adalah *me-review* KTSP sebelumnya. Terus membuat *draft* KTSP, membuat *draft*, setelah tadi kan *me-review*, membuat *draft*, terus nanti mangkaji ulang isinya sudah sesuai apa belum dengan kebutuhan KTSP sekarang.” (W.WK.24042019)

Selain TPK, pihak yang berperan penting dalam terselenggaranya SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari yaitu kepala sekolah. Hasil kajian SKS yang dilakukan oleh TPK menjadi bahan pertimbangan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan penetapan program SKS. Selanjutnya kepala sekolah melakukan koordinasi mengenai keputusan yang telah diambilnya kepada guru/karyawan khususnya TPK untuk dilakukan diskusi lebih lanjut terhadap program SKS. Koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui respon dan pendapat guru serta karyawan sekolah apabila program SKS diterapkan. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan kepala sekolah sebagai berikut:

“Pada dasarnya dari saya, terus saya bercerita kepada teman-teman guru, karyawan, kurikulum, terus bercerita kepada pengurus komite dan mencoba untuk dapat menerapkan SKS ini. Walaupun mungkin ada dari teman guru

ataupun karyawan yang masih ragu-ragu untuk menyelenggarakan SKS ini. *Insya Allah* sambil berjalan pelan-pelan walaupun masih ada kendala, kendala dari SDM-nya maupun dari sarana prasarananya.” (W.KS.14052019)

Waka kurikulum juga mengungkapkan hal yang menguatkan pernyataan kepala sekolah bahwa penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari merupakan inisiatif kepala sekolah. Kepala sekolah mengkoordinasikan hal tersebut kepada guru dan karyawan ketika rapat. Berikut ini kutipan wawancara dengan waka kurikulum yang menyatakan hal tersebut:

“Ya yang pertama kan perintah dari kepala sekolah kepada saya, terus ada pertemuan lah ya, rapat guru untuk mensosialisasikan SKS seperti ini dan sebagainya. Ya tidak semua itu setuju, ya sebagian besar itu setuju untuk diterapkan.” (W.WK.24042019)

Begitu pula dengan guru ekonomi yang membenarkan adanya komunikasi atau koordinasi ketika merencanakan penyelenggaraan SKS sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau SKS koordinasi jelas dilakukan, itu program pemerintah pusat. . .” (W.GE.24042019)

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan koordinasi untuk menetapkan penyelenggaraan SKS, pihak sekolah kemudian melakukan pencerdasan kepada guru dan karyawan SMA Negeri 1 Bantarsari. Tujuannya adalah agar guru dan karyawan SMA Negeri 1 Bantarsari memahami SKS secara lebih mendalam, sehingga nanti dapat mengaplikasikan SKS dengan baik. Kegiatan pencerdasan tersebut dilakukan dengan cara melakukan studi banding, diklat (pendidikan kilat), dan IHT (*In House Training*). Berikut ini pernyataan dari beberapa informan yang menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan tersebut. Mulai dari

pihak yang dilibatkan, materi pembahasan, dan tingkat intensitas kegiatan tersebut dilakukan.

Pertama yaitu pernyataan waka kurikulum yang membahas persiapan pelaksanaan program yakni dengan melakukan kegiatan studi banding dan IHT sebagai berikut:

“Ya paling persiapannya nanti ada IHT (*In House Training*) lah. *Training* motivasi dari penyelenggara SKS Jawa Tengah, Pak Topo. Sekolah studi banding ke SMA Negeri 1 Maos yang terdekat. Terus ada IHT juga, sekolah mengundang dari SMA Maos, misal bagaimana SKS itu.” (W.WK.24042019)

Lebih lanjut lagi waka kurikulum menjelaskan bahwa studi banding dilaksanakan sebanyak tiga kali sebagai berikut:

“Iya, tiga kali studi banding. Kalau yang pertama ke Maos itu guru dan karyawan ikut semua. Terus yang ke SMA Wonosobo itu cuma bapak ibu guru yang ngajar kelas X dan XI. Terus yang ke SMA 1 Bantul itu semuanya, bersama guru dan karyawan. Sekalian yang ke SMA 1 Bantul itu *refreshing* juga sih.” (W.WK.24042019)

Waka kurikulum juga mengatakan bahwa pemerintah memberikan diklat terkait dengan SKS seperti hasil wawancara berikut ini:

“Ada, setiap tahun ada, dari dirjen ada. Ya tahun kemarin di Bogor, sudah berjalan dua kali.” (W.WK.24042019)

Diklat yang diadakan pemerintah tersebut diadakan secara khusus untuk sekolah-sekolah yang akan atau sudah menyelenggarakan SKS. Berikut ini hasil wawancara dengan waka kurikulum yang menyatakan hal tersebut:

“Ya untuk SKS. Terus dari Semarang itu khusus untuk SKS dan khusus untuk sekolah yang mau menyelenggarakan SKS, akan menyelenggarakan SKS.” (W.WK.24042019)

Kedua, pernyataan kepala sekolah yang membenarkan pernyataan waka kurikulum bahwa telah dilakukan studi banding dan diklat oleh pemerintah.

Berikut ini hasil wawancara dengan kepala sekolah berkaitan dengan hal tersebut:

“Narasumber tiga kali ya. Dua kali dari Maos yang sudah diselenggarakan itu oleh bapak Supriyanto, salah satu tim SKS nasional gitu ya. Dan juga dari dinas propinsi, beliau bapak Drs. Sutopo, M. Pd merupakan sie kurikulum. Dan juga mengirimkan waka kurikulum waktu itu untuk mengikuti kegiatan pelatihan atau diklat terkait SKS, kalau nggak salah dua kali, secara nasional dan daerah, kalau daerah sering ya. Diklat nasional waktu itu di Bogor kalau nggak salah.” (W.KS.14052019)

Ketiga, pernyataan guru ekonomi yang juga memperkuat pernyataan dari kepala sekolah maupun waka kurikulum mengenai adanya diklat. Pihak yang dilibatkan dalam diklat tersebut hanya kepala sekolah dan waka kurikulum dari sekolah penyelenggara SKS. Hal tersebut dapat diketahui dari kutipan wawancara sebagai berikut:

“Iya karena Maos jadi acuan dari Semarang, dari propinsi ya. Waka kurikulum juga diundang ataupun dipanggil untuk ke Jakarta. Kegiatan *workshop*, diklat tapi hanya satu atau dua orang yaitu kepala sekolah dan kurikulum. . .” (W.GE.24042019)

Diklat mengenai SKS yang diadakan oleh pemerintah memang dikhususkan untuk sekolah penyelenggara SKS, tetapi hanya sebatas sampai kepala sekolah dan waka kurikulum. Sedangkan para dewan guru tidak mendapatkan diklat SKS, dan mereka mendapatkan pemahaman mengenai SKS itu dari kegiatan studi banding, IHT, serta MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Hal tersebut diungkapkan oleh kepala SMA Negeri 1 Bantarsari ketika wawancara yakni sebagai berikut:

“Kalau untuk guru saat ini belum ada, cuma ada pertemuan. Pertemuan semacam MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) ataupun pertemuan sekolah-sekolah yang menyelenggarakan SKS itu se-Jawa Tengah, pernah waktu itu di Wonosobo. Itu diundang semua guru yang mengajar semua

mapel istilahnya diundang di Wonosobo untuk mengikuti pelatihan penyelenggaraan SKS.” (W.KS.14052019)

Kepala sekolah menjelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan MGMP tersebut membahas mengenai UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri) yang digunakan dalam SKS. Berikut ini pernyataan kepala sekolah terkait hal tersebut:

“Pelatihan sekaligus melihat cara belajar disana dan juga peluncuran UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri). Jawa Tengah itu memberikan mandat untuk menggunakan UKBM.” (W.KS.14052019)

Pemberian pemahaman mengenai SKS sudah dilakukan, namun nyatanya masih ada beberapa guru yang belum memahami SKS. Hal ini diungkapkan oleh kepala SMA Negeri 1 Bantarsari sebagai berikut:

“Ya *Alhamdulillah* ada yang sudah memahami, namun ada yang masih belajar dan mungkin ada juga yang sudah diajari tapi masih seperti itu saja juga masih ada. Terutama yang senior-senior ya, jadi kadang-kadang belajarnya masih konvensional. Beberapa senior itu kadang malah menggunakan alatnya saja masih belum lancar.” (W.KS.14052019)

Waka kurikulum juga mengungkapkan hal yang senada dengan kepala sekolah sebagai berikut:

“Ya kalau paham sudah. Mungkin hanya ya ada beberapa terutama yang senior-senior yang kesusahan karena harus melayani siswa yang heterogen.” (W.WK.24042019)

Guru ekonomi SMA Negeri 1 Bantarsari juga menguatkan pernyataan kepala sekolah tersebut bahwa beberapa guru masih ada yang belum memahami SKS dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pencerdasan tentang SKS belum maksimal, artinya masih perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pencerdasan SKS lagi terutama untuk guru. Berikut ini kutipan wawancara dengan guru ekonomi berkaitan dengan hal tersebut:

“Ya karena belum ada sosialisasi dari pemerintah pusat, lebih banyak ke satu orang misalnya kurikulum, baru nanti menjabarkan ke guru. Tapi kan nggak maksimal, harusnya ada program diklat atau *workshop* dari pemerintah pusat untuk semua guru yang sekolahnya sudah sistem SKS biar semuanya tahu. Kita tahu lewat kurikulum, kadang-kadang kurikulum menjabarkan juga kurang jelas, jadi berjalannya banyak *gamam* (takut).” (W.GE.24042019)

Kegiatan studi banding, diklat, *workshop*, IHT (*In House Training*) agar guru maupun karyawan dapat memahami SKS sudah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Bantarsari meskipun masih ada beberapa guru yang belum memahami SKS dengan baik, khususnya guru-guru senior yang juga belum mampu untuk menggunakan perangkat teknologi sehingga belum semua mata pelajaran menerapkan program SKS. Artinya, secara umum guru-guru di SMA Negeri 1 Bantarsari masih membutuhkan kegiatan studi banding, diklat, dan *workshop* yang lebih banyak agar pemahaman terhadap program SKS semakin baik. Kondisi tersebut selaras dengan beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa kendala mengenai pemahaman guru terhadap penyelenggaraan program juga terjadi di satuan pendidikan penyelenggara program. Pertama, penelitian Rostika & Zulkarnain (2016) menemukan bahwa kendala yang menjadi kelemahan implementasi kurikulum 2013 dengan SKS di SMA N 1 Batu yaitu adanya sebagian guru yang belum siap sehingga kurikulum 2013 dirasa beban, beberapa guru senior yang kurang paham mengenai penggunaan teknologi informasi, dan masih ada guru yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) kurikulum 2013. Kedua, penelitian Cheung & Wong (2012) mengenai reformasi kurikulum (2001-2006) di Hong Kong masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan yang umum di banyak negara lain dalam tahap implementasi seperti beban kerja guru yang berat, keberagaman peserta didik, dan pemahaman guru

mengenai kurikulum. Selain itu untuk memberikan dukungan kepada guru agar dapat melaksanakan reformasi kurikulum secara efektif maka diperlukan dukungan dalam hal kursus pelatihan, seminar, dan *workshop* mengenai belajar mengajar

Persiapan selanjutnya yaitu menyusun buku pedoman penyelenggaraan SKS di sekolah. Buku pedoman ini merupakan aturan yang mengatur teknis penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari yang dapat disesuaikan dengan buku pedoman dari dirjen. Selain mempersiapkan buku pedoman, sekolah juga harus menunjuk PA (Pembimbing Akademik) yang bertugas memberikan arahan kepada peserta didik. Arahan-arahan tersebut dapat berupa saran pengambilan beban belajar, motivasi belajar, dan lain sebagainya agar peserta didik bersemangat untuk menimba ilmu di sekolah. SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari belum ada pembimbing akademik, melainkan hanya ada wali kelas. Berikut ini pernyataan dari informan yang mengungkapkan bahwa pembimbing akademik di SMA Negeri 1 Bantarsari sama seperti wali kelas dan hanya berbeda istilah saja. Pertama, pernyataan kepala sekolah sebagai berikut:

“Dulu sudah diadakan pembimbing akademik, tapi ini peraturan yang baru dikembalikan kepada wali kelas. Jadi wali kelas ini memang pembimbing akademik, terus *digodog* (dimatangkan) lagi bagaimana caranya ya jumlah gurunya untuk sekolah-sekolah seperti saya ini mungkin terbatas. Jadi misalkan PA itu harus berapa orang, kalau disini mungkin belum seluruhnya karena memang satu kelas itu wali kelas sekaligus pembimbing akademik.” (W.KS.14052019)

Kedua, pernyataan guru ekonomi sebagai berikut:

“Nah harusnya beda, PA (Pembimbing Akademik) itu nggak harus wali kelas. Misalnya ada 30 anak, lah nanti 10 anak itu PA-nya satu, jadi tiga PA, mereka harus beda lagi. Kalau wali kelas kan lebih banyak ke pengelolaan

administrasi siswa di kelas, PA itu lebih banyak bimbingan akademik.” (W.GE.24042019)

Tugas dari seorang pembimbing akademik pun pada intinya sama dengan wali kelas, sehingga wali kelas sekaligus sebagai pembimbing akademik. Hal ini disampaikan oleh waka kurikulum sebagai berikut:

“Tugasnya intinya sama, wali kelas dan pembimbing akademik. Kalau yang sekarang tidak ada pembimbing akademik. Pembimbing akademik langsung wali kelas sih, jadi sama seperti wali kelas.” (W.WK.24042019)

Kepala sekolah juga mendukung pernyataan waka kurikulum terkait persamaan tugas wali kelas dan pembimbing akademik yang dapat diketahui dari hasil wawancara berikut ini:

“Pada dasarnya ya sama. Melayani ataupun mengetahui siswa-siswa yang diampu itu, seperti dibaca ataupun tugas-tugas yang muncul mestinya penyelesaiannya ya wali kelas dengan pembimbing akademik itu sebenarnya sama sih, paling dibantu BK.” (W.KS.14052019)

Sedangkan untuk mekanisme penunjukkan pembimbing akademik atau wali kelas dijelaskan oleh waka kurikulum sebagai berikut:

“Ya penunjukannya itu berlanjut. Jadi wali kelas X berarti nanti tahun berikutnya menjadi wali kelas XI. Misalnya kelas X MIPA 1 besok ya tetap kelas itu yang menjadi wali kelasnya. Jadi kalau di SKS kan kelasnya tidak berubah, kalau pola yang sekarang kan berubah dari kelas X sampai XII kan berubah. Wali kelasnya tetap, terus nanti kalau yang sudah menjadi wali kelas kelas XII, tahun berikutnya menjadi wali kelas kelas X, jadi berkelanjutan.” (W.WK.24042019)

Secara keseluruhan, persiapan yang dilakukan untuk menyelenggarakan program Sistem Kredit Semester (SKS) tidak terlalu banyak. Hal tersebut dikarenakan SKS merupakan program pembelajaran yang terintegrasi dengan kurikulum 2013. Ketika suatu sekolah sudah melaksanakan kurikulum 2013 dan

ingin menerapkan SKS, maka hanya perlu mempersiapkan perangkat pendukung SKS saja. Berikut ini pernyataan waka kurikulum berkaitan dengan hal tersebut:

“Kalau untuk persiapan ya sebenarnya berjalan seperti adanya saja, jadi ya nggak ada persiapan khusus harus menyiapkan ini itu. Paling nggak nanti ya menyiapkan tambahan perangkat ya, perangkat misalnya kayak KRS (Kartu Rencana Studi) lah. Yah walaupun sebenarnya itu pemberian paket mata pelajaran, kalau kelas X kan masih paket walaupun kalau sekarang kan tidak ada KRS.” (W.WK.24042019)

Kepala sekolah juga memperkuat pernyataan waka kurikulum sebagai berikut:

“Persiapannya ya tidak banyak ya, sama saja. Kurikulumnya juga sama pakai kurikulum 2013, mungkin cara belajarnya paling harus bisa melayani anak-anak yang memiliki kecepatan belajar cepat itu dengan yang biasa itu. Bagaimana caranya mereka harus disiapkan wali kelas ataupun pembimbing akademik yang bisa melayani, terus disiapkan KRS (Kartu Rencana Studi), sarana penunjang. Sedangkan dasar hukumnya ya kita sudah mengusulkan mengajukan proposal kepada dinas propinsi *Alhamdulillah* bisa lancar.” (W.KS.14052019)

Waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan SKS juga cukup lama dan dilakukan secara bertahap karena memang untuk berpindah ke suatu sistem yang baru tentu membutuhkan penyesuaian. Begitu pula dengan SKS, ketika SMA Negeri 1 Bantarsari berpindah dari sistem paket menuju SKS pun dilakukan secara bertahap dan tidak langsung sempurna penerapannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh waka kurikulum dalam kutipan wawancara berikut:

“Kalau persiapannya sih ya akhir tahun 2017. Tahun 2017 ya sudah ditawarkan SKS itu apa, terus diawal ajaran baru 2017/2018 lah baru diterapkan ya. Pertama ya masih uji coba terutama untuk kelas X, kan hanya kelas X ya yang menerapkan. Kelas XI dan XII kan masih paket, jadi ya kita berjalan itu tidak langsung. Jadi secara bertahap, di awal kita menggunakan SKS tapi banyak yang masih sebenarnya seperti paket. Nanti perlahan-lahan kita gunakan SKS, jadi tidak langsung *plek* (sama) semuanya SKS. Jadi awalnya ya cuma penjajakan dulu seperti apa sih SKS diterapkan, walaupun masih banyak guru yang menerapkan paket. Nah nanti lama-lama sampai sekarang kan sudah SKS walaupun belum ada yang bisa lulus dua tahun, masih sulit untuk mencari itu. . .” (W.WK.24042019)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa SMA negeri 1 Bantarsari dalam tahap perencanaan kurikulum melakukan kajian terhadap program SKS. Diskusi atau kajian mengenai program tersebut dilakukan secara lebih mendalam oleh TPK (Tim Pengembang Kurikulum) bersama dengan kepala sekolah. TPK dan kepala sekolah menginformasikan hasil kajian tersebut guna pengambilan keputusan penetapan program. Kemudian setelah diputuskan akan menerapkan SKS, dilakukan studi banding, diklat, serta *workshop* SKS sebagai salah satu upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk memperdalam pengetahuan mengenai program SKS. Kegiatan studi banding dilakukan dengan mengunjungi satuan pendidikan yang terlebih dahulu menyelenggarakan SKS, sedangkan kegiatan diklat dan *workshop* dilakukan dengan cara mengundang narasumber atau menghadiri acara diklat/*workshop* yang diadakan oleh pemerintah. SMA Negeri 1 Bantarsari juga mengadakan IHT (*In House Training*) dengan mengundang narasumber untuk memaparkan program SKS kepada guru serta karyawan sekolah. Pihak sekolah juga mempersiapkan pembimbing akademik untuk peserta didik walaupun realisasinya pembimbing akademik tersebut adalah sama dengan wali kelas. Berdasarkan panduan penyelenggaraan SKS yang diterbitkan oleh Direktorat PSMA tahun 2017 memang tidak disebutkan adanya wali kelas pada satuan pendidikan penyelenggara SKS namun disana disebutkan adanya pembimbing akademik yang tugasnya mirip dengan wali kelas.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai program SKS menyatakan hasil yang selaras dengan persiapan atau perencanaan program yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Bantarsari. Penelitian Hardini (2016) menghasilkan

temuan bahwa perencanaan pelaksanaan program di SMA Negeri 1 Salatiga yaitu membentuk tim pengembangan kurikulum (TPK) yang kemudian mengikuti beberapa diklat, studi banding, dan kemudian membuat buku panduan program SKS yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekolah. Selanjutnya pihak sekolah mengadakan IHT (*In House Training*) dengan melibatkan seluruh guru dan staff sebagai peserta. Kedua, penelitian Rostika & Zulkarnain (2016) mengenai analisis implementasi kurikulum 2013 dengan SKS menghasilkan temuan bahwa persiapan yang dilakukan sebelum mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan SKS yaitu mengadakan rapat internal, sosialisasi kepada guru dan karyawan, mengadakan *workshop*, serta sosialisasi kepada orang tua peserta didik dan *stakeholders*. Ketiga, penelitian Cheung & Wong (2012) terhadap reformasi kurikulum periode 2001-2006 di Hong Kong menghasilkan temuan bahwa untuk memberikan dukungan kepada guru agar dapat melaksanakan reformasi kurikulum secara efektif maka diperlukan dukungan dalam hal kursus pelatihan, seminar, dan *workshop* mengenai belajar mengajar (Cheung & Wong, 2012).

6.2. Mekanisme Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program Sistem Kredit Semester (SKS) ini dimulai dengan melakukan sosialisasi dan memberikan buku pedoman mengenai SKS kepada peserta didik dan orang tua peserta didik agar mereka dapat memahami SKS. Selanjutnya yaitu pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) peserta didik yang berisi jumlah beban belajar atau jumlah Kompetensi Dasar (KD) yang akan ditempuh peserta didik selama satu semester.

Sosialisasi SKS kepada peserta didik dilaksanakan ketika kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) oleh pihak kurikulum. Hal ini dapat diketahui dari informasi yang disampaikan oleh beberapa informan ketika wawancara berlangsung.

Pertama, pernyataan guru ekonomi sebagai berikut:

“Kalau MPLS-nya iya dalam proses pengenalan SKS. Jadi misalnya pengenalan tentang SKS itu apa, kemudian mata pelajarannya, kemudian tentang proses kegiatan disana itu ada. Ya kalau nggak gitu kan saya nggak tahu, ya karena program SKS itu butuh kerjasama sih antara siswa dan guru juga. Kalau guru sudah menyampaikan tapi siswanya nggak mudeng ataupun nggak mau berkompetisi, SKS nggak berjalan.” (W.GE.24042019)

Kedua, pernyataan peserta didik kelas XI yang membenarkan adanya sosialisasi SKS kepada peserta didik sebagai berikut:

“Jadi pas itu ada waktu khusus untuk kelas X, setiap kelas bergantian dijelasin sama pak Istiawan, waktu itu di ruang serbaguna. Siswanya duduk, terus pak gurunya nyalain LCD, disitu dijelasin apa itu SKS, manfaatnya apa, terus hal apa yang harus dilakukan agar bisa mencapai SKS, terus siswa kalau belum paham bisa bertanya.” (W.PD2.15052019)

Ketiga, pernyataan peserta didik kelas X secara singkat juga mendukung pernyataan informan kelas XI sebagai berikut:

“Iya, paling SKS itu intinya bisa lulus cepat gitu kak dikasih tahunya.” (W.PD1.15052019)

Sedangkan sosialisasi terhadap orang tua peserta didik dilakukan ketika ada rapat pleno di awal masuk seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, pernyataan waka kurikulum:

“Iya kalau masa orientasi peserta didik itu pas kelas awal masuk. Nah awal masuk kan ada ke orang tua, ya disosialisasikan pas ada orang tua kesini misalnya rapat. Kalau kelas X itu kan rapatnya lebih awal, rapat komitenya. Sebelum masuk kesini sudah dirapatkan, itu nanti yang kelas X dan XI

disosialisasikan, kepada orang tua juga SKS tetap disosialisasikan.” (W.WK.24042019)

Kedua, pernyataan guru ekonomi:

“Sudah ada. Jadi kita setiap tahun ada yang namanya pleno kepada masyarakat, wali siswa. Kemudian memberitahukan tentang SKS, fungsi SKS apa, sistemnya bagaimana, pasti kita beritahu. Setiap tahun kan ada rapat pleno sebelum awal masuk, diproses program untuk pemaparan tentang SKS.” (W.GE.24042019)

Ketiga, pernyataan kepala sekolah:

“Sudah, itu malah sosialisasinya tidak hanya sekali. Ada rapat komite, langsung pihak kurikulum menyampaikan kepada masyarakat secara langsung ataupun orang tua diundang, tokoh-tokoh masyarakat, ataupun pembantu pimpinan kecamatan juga disampaikan pembelajaran sistem SKS ini.” (W.KS.14052019)

Keempat, pernyataan peserta didik kelas X:

“Biasanya pas lagi rapat orang tua kayaknya kak.” (W.PD1.15052019)

Kelima, pernyataan peserta didik kelas XI:

“Dijelasin mbak, semuanya dikasih tahu dan diberi kesempatan untuk melihat perubahan siswa kalau dirumah masing-masing. Kalau misal efeknya kurang baik, misal jadi sering sakit, usul saja ke sekolah kayak gitu mbak. Tetapi kalau memberi efek baik itu nanti diminta untuk diberi motivasi lagi agar semakin semangat belajarnya.” (W.PD2.15052019)

Berkaitan dengan pemberian buku pedoman penyelenggaraan SKS kepada peserta didik dan orang tua peserta didik ternyata tidak dilakukan oleh sekolah. Pihak sekolah hanya memberitahukan program SKS melalui sosialisasi, tanpa menginformasikan SKS lebih detail melalui buku pedoman. Hal tersebut diungkapkan oleh waka kurikulum sebagai berikut:

“Iya, tidak diberikan. Hanya saja di peraturan akademik ada.” (W.WK.24042019)

Lebih lanjut lagi waka kurikulum juga menegaskan ketika wawancara bahwa peserta didik hanya diberitahu melalui sosialisasi sebagai berikut:

“Kalau siswa ya lewat sosialisasi.” (W.WK.24042019)

Waka kurikulum juga menjelaskan bahwa materi sosialisasi SKS itu seputar pemahaman SKS, prinsip, serta kelebihan dari program SKS:

“Yang pertama ya pemahaman, pengertian, terus nanti prinsipnya seperti apa, kelebihannya bagaimana. . .” (W.WK.24042019)

Jumlah KD (Kompetensi Dasar) atau beban belajar yang akan ditempuh selama satu semester oleh peserta didik tercantum dalam KRS, namun pihak sekolah tidak memberikan kewenangan kepada peserta didik untuk menentukan jumlah beban belajar yang akan ditempuhnya sesuai dengan kecepatan belajar peserta didik itu sendiri. Beban belajar yang akan ditempuh peserta didik ditentukan oleh pihak sekolah ketika semester satu. Sedangkan untuk semester berikutnya apabila peserta didik tersebut memiliki kecepatan belajar yang lebih dan dimungkinkan bisa lulus dua tahun, maka selanjutnya akan ditawarkan paket-paket yang lebih banyak. Intinya jumlah beban belajarnya memang sudah ditentukan dalam paket-paket dengan nominal KD yang berbeda dan peserta didik tidak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri seperti SKS mahasiswa, sebagai gantinya mereka berhak memilih paket-paket KD yang sudah disediakan oleh sekolah. Berikut ini hasil wawancara dengan waka kurikulum yang menyatakan adanya paket-paket beban belajar:

“Kalau siswa sih ya tergantung dari kemampuan siswanya. Kalau misalnya siswa mampunya cuma bebannya segitu ya sesuai dengan paket atau regular. Kalau kelas X itu paket, nanti kalau di semester dua ada perkembangan cepat, nanti ditawarkan, jadi kalau kebebasan itu ya tidak ada.” (W.WK.24042019)

Guru ekonomi juga menguatkan pernyataan waka kurikulum mengenai pemberian paket KD yang diambil peserta didik seperti yang tercantum dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Nggak kayak kuliah? Iya nggak, kita sistemnya paket sih. Kalau yang namanya paket kan, kita paket semester satu, misalnya ekonomi ada 75 Kompetensi Dasar (KD), saya hitungnya jam sih, sejam misalnya berapa SKS, misalnya empat SKS. Empat SKS itu kan ada KD-KD, kalau misalnya materi itu belum terselesaikan nanti yang semester berikutnya bisa ngambil lagi, jadi sesuai karakteristiknya siswa. . .” (W.GE.24042019)

SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari memang masih semi paket dikarenakan belum ada kebebasan bagi peserta didik untuk menentukan beban belajar sendiri. Kondisi tersebut juga terjadi di MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan dalam penelitian Muhlis (2017) yang menemukan bahwa SKS yang diterapkan di MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan masih belum dapat dikatakan penuh atau tidak termasuk pada kategori SKS murni karena peserta didik belum dapat memilih sendiri mata pelajaran yang akan diambil dalam satu semester, mereka hanya menunggu perolehan SKS dari Madrasah yang mengelola sesuai dengan nilai yang telah dicapai.

6.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program Sistem Kredit Semester (SKS) di sekolah. Faktor sumber daya manusia dalam implementasi SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari ialah guru dan peserta didik. Guru sebagai pelaksana dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar tentunya harus mempunyai kompetensi keguruan yang terdiri dari empat kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik dapat diukur melalui Uji Kompetensi Guru (UKG),

kompetensi profesional diukur melalui sertifikasi, sedangkan untuk kompetensi guru secara keseluruhan tersebut juga dapat dinilai melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang dilakukan oleh kepala sekolah. Penilaian khusus dari pemerintah untuk menilai kompetensi kepribadian dan sosial guru memang tidak ada, namun masih ada penilaian guru oleh kepala sekolah. Kepala sekolah yang setiap harinya bertemu dan berinteraksi dengan para guru, tentunya lebih memahami bagaimana karakteristik kepribadian dan sosial guru di sekolah yang dipimpinnya. Selain UKG, sertifikasi, dan PKG, ternyata kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan penempatan tugas mengajarnya juga cukup penting. SMA Negeri 1 Bantarsari sudah membagi tugas mengajar guru sesuai dengan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan. Bahkan untuk pembagian tugas tambahan guru sebagai pembina ekstrakurikuler (ekskul) juga sudah disesuaikan dengan bakat masing-masing guru.

Penempatan guru mata pelajaran di SMA Negeri 1 Bantarsari sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara berikut ini dengan waka kurikulum maupun guru ekonomi. Pertama hasil wawancara dengan waka kurikulum sebagai berikut:

“Ya sudah cukup baik, karena S1 semua sih.” (W.WK.24042019)

Kedua, hasil wawancara dengan guru ekonomi adalah sebagai berikut:

“Linier itu bahasanya ya. Sudah sih, dari ekonomi ya saya lulusan pendidikan ekonomi.” (W.GE.24042019)

Berkaitan dengan penilaian kompetensi keguruan guru, dilakukan melalui UKG, sertifikasi, dan sebagainya seperti yang diungkapkan oleh waka kurikulum sebagai berikut:

“Itu dari PKG (Penilaian Kinerja Guru), dari kepala sekolah”
(W.WK.24042019)

“UKG ya ada juga, dari sertifikasi UKG.” (W.WK.24042019)

Guru ekonomi juga mendukung pernyataan waka kurikulum terkait dengan sertifikasi. Beliau juga mengatakan bahwa pengembangan guru dilakukan melalui diklat maupun *workshop* seperti hasil wawancara berikut ini:

“Secara umum sih ya mereka sudah punya pengalaman mengajar, saya yakin ya sudah cukup lah. Didukung dengan adanya program sertifikasi, program PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru), program diklat, *workshop*.”
(W.GE.24042019)

Mengenai beban jam mengajar guru di SMA Negeri 1 Bantarsari juga sudah sesuai dengan Permendikbud No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Permendikbud tersebut mengatur bahwa beban mengajar dalam kegiatan pembelajaran minimal adalah 24 jam dan maksimal 40 jam kegiatan tatap muka per minggu. Hampir semua guru di SMA Negeri 1 Bantarsari sudah memenuhi syarat tersebut seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah sebagai berikut:

“24 ya lebih, hampir semuanya sudah memenuhi yang diharapkan minimal 24 jam mengajar dan maksimal 40 jam.” (W.KS.14052019)

Waka kurikulum juga menyampaikan pernyataan yang serupa dengan kepala sekolah sebagai berikut:

“Kalau normal kan 24, tapi kan maksimalnya 40.” (W.WK.24042019)

Begitupula dengan guru ekonomi SMA Negeri 1 Bantarsari yang memperkuat pernyataan kepala sekolah dan guru ekonomi dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Jam maksimal maksudnya 24? Ya sudah, terkait dengan program sertifikasi ya harus minimal mengajar 24 jam.” (W.GE.24042019)

Bagi beberapa guru yang beban mengajarnya belum ada 24 jam, pihak sekolah kemudian memberikan tambahan jam mengajar di mata pelajaran yang berbeda. Ada 5 guru yang merangkap mata pelajaran yang berbeda dari total 34 guru, sehingga sekitar 85% guru sudah mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang relevan dengan latar belakang pendidikannya. Jumlah tersebut cukup memadai dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program SKS. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Wahid (2016) terhadap penerapan SKS pada mata pelajaran PAI di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta yang menghasilkan temuan bahwa karakteristik sekolah yang boleh menerapkan SKS yaitu sumber daya manusia, dengan indikator persentase guru memenuhi kualifikasi akademik >75%, relevansi guru setiap mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan 90%. Berikut ini kutipan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Bantarsari yang menyatakan bahwa beberapa guru masih merangkap untuk mengampu mata pelajaran yang berbeda:

“Ya 99% sudah sesuai, masih ada beberapa yang kekurangan jam sehingga mengajarnya merangkap, terutama ini kewirausahaan (KWU). Itu kan sebenarnya belum ada guru khusus KWU ya, sehingga masih diampu oleh guru ekonomi akuntansi, kadang-kadang ada guru seperti saya (biologi) ngajar KWU.” (W.KS.14052019)

Pernyataan kepala sekolah di atas juga diperkuat oleh pernyataan guru ekonomi dalam hasil wawancara berikut ini:

“Saya merangkap, saya ngajarnya ekonomi dan kewirausahaan. Karena kurang jam saya, karena untuk misalnya mengajar diluar itu sekarang nggak bisa. Saya mengajar di SMA 1 Bantarsari dan SMA 1 Sidareja, itu nggak boleh, diharuskan terpenuhinya di sekolah sebenarnya.” (W.GE.24042019)

Guru-guru yang mengajarnya merangkap tersebut ternyata selain kekuarangan jam mengajar, ada juga yang disebabkan karena menggantikan guru lain yang sedang cuti. Misalnya cuti hamil dan cuti melahirkan, jadi untuk sementara waktu tugas mengajar guru yang bersangkutan diambil alih oleh guru lain. Hal tersebut disampaikan oleh waka kurikulum dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Iya ada yang rangkap karena ya mungkin ada yang cuti. Misalnya kalau yang rangkap kayaknya cuma seni budaya, karena saya di kurikulum jadi ada yang bantu, guru bahasa jawa, tapi *Insy Allah* tahun depan sudah sesuai semua, cuma satu yang rangkap.” (W.WK.24042019)

Pemberian tugas tambahan lain bagi guru sebagai wali kelas, pembina ekstrakurikuler ataupun menjadi pengelola sekolah itu akan ada ekuivalen. Maksudnya tugas-tugas tambahan tersebut dapat dikonversikan menjadi jam mengajar guru. Hal tersebut disampaikan oleh kepala sekolah dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Saat ini cukup jam walaupun merangkap menjadi pembina ekstrakurikuler ataupun pembina OSIS. Pembina ekstrakurikuler itu juga ada ekuivalennya. Ekuivalen misalkan pembina atau wali kelas itu ekuivalen dengan dua SKS. Misalnya nanti lab itu dengan kepala lab itu 12 SKS tambahan ya 12 SKS.” (W.KS.14052019)

Waka kurikulum juga memperkuat pernyataan kepala sekolah, bahwasanya guru yang sudah mendapatkan tugas tambahan, maka beban mengajar dikelasnya juga akan dikurangi. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Ya kalau sudah menjadi wali kelas itu nanti kan beban yang lain dikurangi ya, jadi ya tidak wali kelas, ya pembina ekskul, ya jadi kepala lab nggak. Jadi nanti yang jadi wali kelas tidak menjadi tugas tambahan yang lain. Jadi nanti semuanya ya rata-rata ya ada tugas tambahan, katakan biar satu guru itu bebannya banyak.” (W.WK.24042019)

SMA Negeri 1 Bantarsari dalam menunjuk guru untuk dijadikan sebagai wali kelas maupun pembina ekstrakurikuler memiliki beberapa pertimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh waka kurikulum berikut ini:

“Wali kelas, kalau untuk wali kelas jadi pertimbangannya adalah apakah guru tersebut mengajar di kelas yang dijadikan wali, pertimbangan pertama. Terus yang kedua itu pertimbangannya misalnya wali kelas kelas XI itu adalah melanjutkan wali kelas kelas X. Terus wali kelas yang sudah selesai menjadi wali kelas kelas XII, nanti menjadi wali kelas kelas X. Terus yang pembina ekskul yaitu sesuai dengan kemampuannya. Misalnya kemampuan bisa musik ya menjadi ekskul musik, kalau bisa nari, ya ekskul nari, kalau di olahraga misalnya bisa basket ya nanti di ekskul basket, misalnya tidak mempunyai kompetensi ya nanti ngambil dari luar, pelatih luar. Kan ada itu misalnya taekwon do, terus karate, itu pelatihnya dari luar.” (W.WK.24042019)

Peserta didik sebagai salah satu *input* pendidikan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan program. Program SKS ini memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajar peserta didik. Sekolah berharap dapat meluluskan banyak peserta didik dalam waktu dua tahun masa tempuh studi sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan program, oleh karena itu *input* peserta didiknya juga harus baik sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satu cara agar sekolah memiliki *input* peserta didik yang berkualitas dapat dilakukan dengan seleksi penerimaan peserta didik baru yang akan diterima di sekolah tersebut. Sejak adanya peraturan pemerintah mengenai sistem zonasi, proses seleksi tidak terlalu diperhatikan karena prioritas peserta didik yang diterima adalah sesuai zonasi tersebut. Proses seleksi hanya dilakukan dalam penempatan jurusan peserta didik dan itu dilakukan setelah peserta didik diterima di sekolah tersebut. Hal ini disampaikan oleh waka kurikulum dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau siswanya sendiri karena ini kan langsung dari pusat sih jadi nggak bisa, paling nanti ya setelah masuk lah baru di *test*, nanti kalau layak di IPA ya di IPA, kalau nggak layak ya pindah di IPS.” (W.WK.24042019)

Waka kurikulum juga menegaskan kembali bahwa peserta didik dari sistem zonasi tidak ada proses seleksi masuknya seperti dalam wawancara berikut ini:

“Ya kalau zonasi ya tidak ada. Paling seleksinya nanti sudah berjalan dua minggu, kalau misalnya nggak mampu mengikuti ya nanti pindah ke IPS.” (W.WK.24042019)

Jumlah peserta didik yang diterima dari sistem zonasi yaitu sebanyak 75% dari keseluruhan jumlah peserta didik yang diterima di sekolah. Informasi tersebut didapatkan dari pernyataan waka kurikulum dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Yang dari daerah sini loh, ini yang 25% nanti dari jalur prestasi.” (W.WK.24042019)

Kepala SMA Negeri 1 Bantarsari mengungkapkan hal yang senada dengan waka kurikulum bahwasanya tidak ada seleksi penerimaan peserta didik baru. Beliau juga menambahkan bahwa hal tersebut dikarenakan peserta didik yang mendaftar di SMA Negeri 1 Bantarsari masih lebih kecil dari daya tampung peserta didik di sekolah tersebut. Salah satu faktor penyebab pendaftar di SMA Negeri 1 Bantarsari tidak memenuhi kuota yaitu karena di lingkungan sekitar masih banyak sekolah-sekolah lain, sehingga calon peserta didik memiliki banyak pilihan sekolah untuk dimasuki. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan kepala sekolah sebagai berikut:

“Harapannya begitu, tapi SMA Bantarsari saja daya tampungnya belum bisa terpenuhi. Kita berharap bisa enam kelas nanti, ternyata belum bisa. Bisa mungkin ya di daerah banyak sekolah-sekolah lain disekitar sini sehingga untuk seleksi ya diterima semua.” (W.KS.14052019)

Faktor lain yang dapat menjadi penyebab sedikitnya calon peserta didik yang mendaftar di SMA Negeri 1 Bantarsari adalah karena mayoritas anak-anak di daerah tersebut jarang yang melanjutkan pendidikan. Biasanya anak-anak di daerah tersebut setelah lulus SMP (Sekolah Menengah Pertama), mereka lebih memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Kepala sekolah kemudian menambahkan bahwa untuk meminimalisir hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya pemerintah sudah menyediakan beberapa program bantuan pendidikan. Masyarakat tidak perlu takut lagi jika sampai tidak mampu membiayai pendidikan anaknya dikarenakan banyak bantuan yang tersedia. Berikut ini pernyataan kepala SMA Negeri 1 Bantarsari berkaitan dengan hal tersebut:

“Iya betul, mungkin salah satunya bisa *go public* melakukan sosialisasi kepada masyarakat, komite, kepala desa supaya anak-anak lulus SMP itu *nutuk* (selesai) sekolah. Tidak bisa melanjutkan dalam artian itu mereka sebenarnya takut biaya. Boleh dibilang sekolah mereka juga sudah membantu ya dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), PIP (Program Indonesia Pintar), BSM (Bantuan Siswa Miskin), cuma di masyarakat di desanya itu cukup SMP.” (W.KS.14052019)

6.4. Pembiayaan

Anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program Sistem Kredit Semester (SKS) pada dasarnya sama. Artinya tidak ada tambahan biaya yang dibutuhkan untuk program tersebut karena SKS itu sebenarnya merupakan salah satu program pengembangan sekolah yang masuk ke dalam kurikulum 2013. Hal tersebut diungkapkan oleh waka kurikulum dalam wawancara berikut ini:

“Ya anggarannya kan itu kalau anggaran kan per standar nasional. Jadi kalau di SKS kalau yang khusus ya tidak ada, jadi sudah melekat. Misalnya kalau standar nasional proses ya itu anggarannya sudah secara khusus. Kalau misalnya kita akan mengadakan studi banding misalnya untuk SKS, itu kan

sebenarnya sudah ada di anggaran untuk peningkatan mutu tenaga pendidikan dan pendidikan itu sudah ada. Terus nanti kalau misalnya ada acara SKS ya menggunakan itu.” (W.WK.24042019)

Kepala sekolah juga mendukung pernyataan waka kurikulum di atas bahwasanya anggaran sekolah tidak berubah. Hanya saja memang jika ternyata sewaktu-waktu pihak sekolah membutuhkan anggaran lebih untuk membiayai SKS terutama berkaitan dengan sarana prasarana, pihak sekolah mungkin akan menarik iuran dari orang tua peserta didik atau mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah. Berikut ini pernyataan kepala sekolah berkaitan dengan hal tersebut:

“Sama, selama ini SKS-nya sama. Ya mungkin kurikulum sama lah cuma kalau dibilang SKS lebih mahal atau lebih murah sama aja lah, kebutuhannya itu sama. Cuma nanti misalkan SKS membutuhkan sarana prasarana ini nanti kita ajukan kepada pemerintah ataupun masyarakat. Kalau dari masyarakat setuju ya *Alhamdulillah*, kalau tidak ya seadanya.” (W.KS.14052019)

Sumber anggaran untuk operasional SMA Negeri 1 Bantarsari berasal dari 3 sumber sebagaimana disebutkan oleh waka kurikulum sebagai berikut:

“Dari BOS, dari masyarakat, terus ada 3 sih sebenarnya, dari propinsi juga ada.” (W.WK.24042019)

Hasbullah (2015) dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif” disebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan pasal 2 ayat 1 juga disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal tersebut memungkinkan peluang adanya tarikan atau pungutan dari penyelenggara pendidikan kepada peserta didik.

6.5. Sarana dan Prasarana

Alam & Utami (2016) mengemukakan bahwa sekolah harus menyiapkan fasilitas yang cukup untuk dapat memberlakukan program SKS agar berjalan dengan lancar mulai dari tenaga pengajar hingga sarana prasarana sekolah. Wahid (2016) dalam penelitiannya terhadap program SKS PAI di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta menjelaskan secara rinci mengenai indikator kelengkapan sarana prasarana yang harus dimiliki sekolah agar dapat menjalankan program SKS dengan baik. Indikator tersebut yaitu sekolah harus memiliki ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang bimbingan, ruang unit kesehatan, tempat olahraga, tempat ibadah, laboratorium (bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, kimia, biologi, fisika, IPS, multimedia) dan perpustakaan yang memiliki koleksi buku semua mata pelajaran.

SMA Negeri 1 Bantarsari ketika akan menyelenggarakan SKS turut mempertimbangkan sarana prasarana yang dimiliki. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa sarana prasarana yang ada memang masih kurang, namun cukup memadai untuk penyelenggaraan SKS. Beliau mengungkapkan bahwa penambahan sarana prasarana dilakukan bersamaan seiring terselenggaranya SKS.

Pertimbangan tersebut dilakukan karena apabila sekolah hanya fokus pada kekurangan sarana prasarana, maka kemungkinan program SKS tidak akan terselenggara dengan segera. Pihak sekolah lebih memilih untuk memaksimalkan sarana prasarana yang ada, dan melengkapinya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan program. Berikut ini kutipan wawancara dengan kepala sekolah yang menyatakan hal tersebut:

“Iya memang, sempat sih berdiskusi dengan PPK (Program Pengembangan Kecamatan) ataupun dengan cabang tentang bagaimana sarana prasarananya

kurang. Tapi tidak masalah sambil berjalan nanti dilengkapi sarana prasarana yang kurang berkaitan dengan SKS. Jadi ya tetap dipertimbangkan itu, saya masih kurang ini kurang itu dan lain sebagainya. Nanti kalau tidak segera dicoba nanti ya lama lagi. Jadi ya *Bismillah* saja.” (W.KS.14052019)

Berkaitan dengan sarana prasarana apa saja yang masih kurang di SMA Negeri 1 Bantarsari disebutkan lebih lanjut oleh peserta didik kelas X dan XI. Pertama pernyataan peserta didik kelas X yang menyatakan bahwa sarpras di SMA Negeri 1 Bantarsari sudah cukup memadai namun masih kekurangan ruangan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Berikut ini pernyataan peserta didik kelas X tersebut:

“Sarprasnya sih ya lumayan. Sudah ada laboratoriumnya, terus sudah ada perpustakaan, musholla juga, paling ruang untuk ekstrakurikuler kak, yang ada cuma ruang OSIS sama pramuka.” (W.PD1.15052019)

Kedua, pernyataan peserta didik kelas XI yang lebih menyoroti sarana prasarana pendukung perangkat IT. Perangkat pertama yaitu berupa LCD Projector. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, pihak sekolah hanya mempunyai 5 buah LCD Projector. Jumlah tersebut dirasa kurang apalagi jika pembelajaran yang dilakukan pada jam pelajaran yang bersamaan membutuhkan LCD Projector. Berikut ini pernyataan peserta didik tersebut mengenai LCD Projector:

“Kalau misal itunya masih ada, pas nggak ada yang pakai, dipakai. Tapi kalau sudah habis semua ya nggak pakai, nggak jadi pakai. Cuma gurunya baca lewat laptop nggak jadi pakai LCD.” (W.PD2.15052019)

Peserta didik kelas XI tersebut menambahkan bahwa buku pelajaran yang tersedia masih belum lengkap. Jaringan internet berupa wifi sekolah juga memakai *password*, akan tetapi peserta didik tidak diberitahu *password*-nya apa sehingga tidak dapat memanfaatkan jaringan wifi sekolah. Ketersediaan komputer di

laboratorium komputer masih belum sepadan dengan jumlah peserta didik yang menggunakan. Informasi tersebut dapat diketahui dari pernyataan berikut:

“Yang pertama kalau misal bawa HP itu kan kadang HP pakai wifi, tapi kadang wifi-nya itu nggak kalau sudah dikasih *password* nggak dikasih tahu. Yang kedua itu bukunya belum lengkap. Terus kalau yang ketiga itu kalau misalnya pakai komputer nggak semua siswa itu pegang satu komputer, jadi kadang satu komputer bisa buat tiga siswa gitu, jadi susah.” (W.PD2.15052019)

Sebenarnya jumlah komputer di SMA Negeri 1 Bantarsari cukup memadai untuk digunakan oleh peserta didik meskipun nantinya ada komputer yang digunakan oleh dua orang peserta didik. Tetapi beberapa komputer berada dalam kondisi yang rusak dan tidak bisa digunakan jadi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembelajaran. Berikut ini pernyataan peserta didik berkaitan dengan hal tersebut:

“Kalau disini sih kira-kira 30 apa ya.”(W.PD2.15052019)

“Ya kan kadang ada yang rusak mbak.”(W.PD2.15052019)

Guru ekonomi SMA Negeri 1 Bantarsari mengungkapkan bahwa sarana prasarana yang ada di sekolah sudah cukup memadai. Sarana prasarana yang ada disana juga ada yang sudah menerapkan teknologi. Ketika peneliti melakukan observasi di SMA Negeri 1 Bantarsari presensi guru sudah menggunakan *finger print*, jadi presensinya tidak dilakukan secara manual. Berikut ini kutipan wawancara dengan guru ekonomi yang menyatakan bahwa sarana di SMA Negeri 1 Bantarsari sudah menggunakan teknologi:

“Sarpras sebenarnya sudah memadai lah. Kalau sarpras sendiri kan kaitannya dengan IT, ekonomi ya, cukup memenuhi lah. . .” (W.GE.24042019)

Pengadaan sarana prasarana di SMA Negeri 1 Bantarsari dibiayai dengan menggunakan anggaran yang diperoleh dari pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh kepala SMA Negeri 1 Bantarsari sebagai berikut:

“Iya biaya dari pemerintah kita setiap tahun mendapatkan bantuan, dari masyarakat juga walaupun kita tahu masyarakat disini ya memang rata-rata ekonomi menengah ke bawah.” (W.KS.14052019)

Pernyataan kepala sekolah tersebut juga diperkuat dengan pernyataan guru ekonomi bahwa pihak sekolah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Berikut ini cuplikan hasil wawancara dengan guru ekonomi berkaitan dengan hal tersebut:

“Kalau itu kan ada buku paket, dari pemerintah ada. . .” (W.GE.24042019)

Intinya ketersediaan sarana prasarana di SMA Negeri 1 Bantarsari masih kurang namun pihak sekolah berupaya melengkapinya kekurangan tersebut bersamaan dengan penyelenggaraan program SKS.

6.6. Layanan Kesiswaan

Layanan kesiswaan berhubungan dengan pelayanan yang diberikan sekolah kepada peserta didik di dalam maupun di luar jam pembelajaran. Layanan tersebut bertujuan untuk mendukung serta memfasilitasi pengembangan bakat dan minat peserta didik. Indikator layanan kesiswaan terdiri dari layanan konsultasi oleh pembimbing akademik maupun guru BK, tutor, dan pelaksanaan ekstrakurikuler.

Konsultasi yang berhubungan dengan akademik sangat diperlukan oleh peserta didik dengan program pembelajaran menggunakan SKS. Melalui layanan konsultasi ini, peserta didik dapat diberikan motivasi agar selalu semangat menyelesaikan beban belajarnya. Harapannya adalah peserta didik yang kecepatan belajarnya rendah tidak akan merasa minder dengan peserta didik lain yang

kecepatan belajarnya lebih cepat. Hal tersebut justru harus dijadikan sebagai pemantik semangat agar dapat menyelesaikan KD dengan cepat. Begitupula dengan peserta didik yang kecepatan belajarnya cepat juga membutuhkan konsultasi agar tetap konsisten dalam menyelesaikan KD. Motivasi harus selalu diberikan agar peserta didik dapat berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan KD agar bisa lulus dalam jangka waktu empat semester. Layanan konsultasi tersebut dilaksanakan oleh guru BK maupun pembimbing akademik yang dalam hal ini adalah wali kelas sebagaimana disampaikan oleh guru ekonomi sebagai berikut:

“Kalau pembekalan akademik itu karena ini kan ada terutama yang kelas XII yang sekarang entah bagaimanajadi BK itu mengarahkan siswa untuk misalnya pemilihan jurusan di perguruan tinggi negeri, bidikmisi, SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri), dan sebagainya. Kemudian masalah-masalah tentang konsultasi akademik, terus nanti masalah pembelajaran dan sebagainya itu guru BK. Jadi bukan PA yang ngurusi, kita masih ya itu tadi tumpang tindih, kita mau buat PA tapi ternyata menyelenggarakan layanan ke guru BP/BK. Karena memang BK dari dulu memang ya kan dulu di SMA begitu kan, aduan dari siswa, ketertiban, tentang perilaku siswa. Kalau PA kan lebih ke ini loh, kamu belajar fokus dimana, nanti raport atau nilai itu yang ngurusin PA semua.” (W.GE.24042019)

Waka kurikulum menyampaikan bahwa layanan konsultasi dilakukan secara rutin untuk kelas XII. Layanan konsultasi oleh pembimbing akademik atau wali kelas biasanya dilakukan ketika hari senin. Apabila pada hari senin tersebut ternyata wali kelas berhalangan hadir, dapat diisi dengan guru BK. Hal tersebut selaras dengan penelitian Rostika & Zulkarnain (2016) yang menghasilkan temuan bahwa peserta didik memperoleh layanan pembinaan rutin dari pembimbing akademik (PA) untuk pembinaan karier, konsultasi akademik, dan konsultasi yang

menyangkut permasalahan pribadi mereka. Berikut ini kutipan wawancara dengan waka kurikulum berkaitan dengan layanan konsultasi tersebut:

“Iya ada, walaupun nanti ya *Insyah Allah* untuk yang kelas XII itu ada, itu nanti sudah terjadwal nanti ada rutin. Misalnya katakanlah setiap hari senin misalnya kan ada wali kelas nanti bisa diganti guru BK kalau sedang kosong, yang ngisi guru BK. Tapi kan ada biasa untuk kelas XII itu ada jadwalnya.”
(W.WK.24042019)

Pengembangan bakat dan minat peserta didik dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat akademik maupun non-akademik. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Bantarsari ada yang bersifat wajib dan pilihan. Ekstrakurikuler wajib di sekolah tersebut adalah Pramuka yang wajib diikuti oleh peserta didik kelas X, sedangkan ekstrakurikuler lainnya bersifat pilihan. Pihak sekolah memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk menentukan ekstrakurikuler yang akan diikutinya sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Ekstrakurikuler untuk peserta didik kelas XII ditiadakan dikarenakan kelas XII diharuskan fokus kepada kegiatan pembelajaran untuk persiapan menghadapi ujian nasional maupun ujian sekolah dan ujian praktik. Hal tersebut diungkapkan oleh guru ekonomi dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau ekstrakurikuler itu kan biasanya tergantung dari minat bakat siswa. Misalnya kelas X dan kelas XI, jadi minat bakat kelas X dan XI itu yang diberikan minat ekstrakurikuler terbatas itu kelas XI. Kelas XII-nya mereka nggak ada kegiatan ekstrakurikuler, fokus ke kegiatan pembelajaran.”
(W.GE.24042019)

Guru ekonomi juga menyampaikan bahwa ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Bantarsari cukup beragam baik yang akademik maupun non-akademik, diantaranya ialah disebutkan dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Banyak, ada atletik, tae kwon do, silat, basket, kemudian ini hasil-hasil prestasi mereka. Terus sekarang saja ada yang berangkat ke propinsi kelas IPS 1, jadi banyak prestasi.” (W.GE.24042019)

Beliau menambahkan bahwa salah satu ekstrakurikuler yang bersifat akademik adalah KIR (Kelompok Ilmiah Remaja). Informasi tersebut diketahui dari hasil wawancara berikut ini”

“Oh iya ini kan tadi non-akademik ya, kalau yang akademik ada KIR (Kelompok Ilmiah Remaja), terus jurnalistik, dan lain sebagainya.” (W.GE.24042019)

Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Bantarsari sebenarnya banyak diminati oleh peserta didik, namun ketika peserta didik yang bersangkutan diminta untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tersebut, banyak peserta didik yang tidak datang. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan ekstrakurikuler banyak terhambat dan sering sekali kegiatannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini diungkapkan oleh peserta didik kelas X dalam kutipan wawancara berikut:

“Ikutnya banyak, cuma kalau misalnya disuruh kumpul itu jarang mau pada kumpul.” (W.PD1.15052019)

“Rutin kak, cuma kadang-kadang nggak ada siswanya jadi kadang pembinanya males.” (W.PD1.15052019)

Penerapan SKS dalam program pembelajaran di SMA Negeri 1 Bantarsari membuat setiap peserta didik memiliki pencapaian KD yang berbeda-beda. Peserta didik yang pencapaian KD-nya masih sedikit harus terus didukung dan motivasi agar segera menyelesaikan KD sehingga masa studi yang ditempuh tidak terlalu lama. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan yaitu dengan cara memfasilitasi proses belajar peserta didik melalui pengayaan materi. Pengayaan tersebut dapat dilakukan dengan tutor bagi peserta didik yang merasa kesulitan belajar. Program tutor di SMA Negeri 1 Bantarsari dilakukan oleh peserta didik

lain yang pencapaian KD-nya lebih tinggi sehingga disebut tutor sebaya. Kegiatan tutor sebaya tersebut tidak difasilitasi secara resmi oleh sekolah, jadi kegiatan tutor hanya sebatas belajar bersama diluar jam pelajaran. Berikut ini pernyataan waka kurikulum yang berkaitan dengan tutor sebaya tersebut:

“Ada. Ya tutor sebaya ya lebih belajar kelompok, misalnya kan yang pintar bisa mengajari teman-temannya bisa di dalam kelas maupun nanti diluar jam pelajaran.” (W.WK.24042019)

Guru ekonomi juga menyatakan bahwa tutor sebaya dilakukan antar peserta didik hanya saja pelaksanaannya belum maksimal. Berikut ini hasil wawancara dengan guru ekonomi berkaitan dengan hal tersebut:

“Tutor sebaya itu kan sebenarnya kayak semacam siswa ke siswa ya. Dalam praktiknya ya mungkin belum semua, programnya ada karena di RPP juga ada, penilaian teman sebaya, tutor sebaya, cuma tidak terlaksana kan, ya mungkin belum maksimal.” (W.GE.24042019)

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai aspek input, dapat disimpulkan bahwa aspek evaluasi input meliputi perencanaan pelaksanaan kurikulum, mekanisme pelaksanaan kurikulum, identifikasi sumber daya manusia yang dimiliki, melakukan pembiayaan program, melakukan identifikasi terhadap ketersediaan sarana prasarana, serta mengamati layanan kesiswaan yang diberikan pihak sekolah kepada peserta didik. Hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan pelaksanaan kurikulum adalah melakukan kajian terhadap program SKS, mendiskusikan hasil kajian program tersebut, penentuan keputusan untuk menyelenggarakan program SKS, melakukan studi banding/diklat/*workshop*/IHT, dan melakukan penunjukkan guru sebagai pembimbing akademik. Tahapan mekanisme pelaksanaan program meliputi kegiatan sosialisasi SKS kepada peserta didik dan orang tua wali serta menentukan jumlah beban belajar yang akan

diambil oleh peserta didik. Tahapan identifikasi sumber daya manusia bertujuan untuk menganalisis sumber daya manusia yang dimiliki, dalam hal ini adalah guru dan peserta didik agar dapat diberdayakan secara maksimal untuk keberhasilan program SKS. Tahapan selanjutnya yaitu mengenai pembiayaan program SKS pada dasarnya sama dengan sistem paket, sehingga anggarannya tidak banyak berubah karena anggaran SKS ini sudah termasuk ke dalam anggaran pengembangan sekolah. Selanjutnya adalah mengidentifikasi sarana prasarana yang tersedia di SMA Negeri 1 Bantarsari. Sarana prasarana di sekolah tersebut sudah cukup memadai, meskipun masih ada beberapa kekurangan namun pihak sekolah berupaya untuk terus melengkapinya melalui pembangunan secara bertahap. Evaluasi *input* yang terakhir adalah berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada peserta didik. Layanan tersebut yaitu berupa konsultasi akademik dan pelaksanaan ekstrakurikuler sudah berjalan cukup baik.

BAB VII

PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

DARI ASPEK *PROCESS*

Evaluasi *process* (proses) memiliki keunikan karena berkenaan dengan kegiatan utama pendidikan yang ditandai oleh adanya interaksi dan komunikasi yang terencana antara dua komponen pendidikan yang utama yaitu guru dan peserta didik dengan sumber belajar. Permasalahan proses menjadi semakin kompleks karena ketika guru melaksanakan proses implementasi kurikulum maka guru tersebut harus berhadapan dengan berbagai faktor yang berada di luar kendali dirinya dan di dalam dirinya. Kesenambungan antara perencanaan yang dibuat guru dengan apa yang dilaksanakan menjadi dasar evaluasi (Hasan, 2008). Evaluasi proses pada penelitian ini meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang akan dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut.

7.1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting agar pembelajaran berjalan secara efisien dan efektif demi tercapainya tujuan pembelajaran. Seorang guru sebelum melakukan pembelajaran tentunya memiliki hal-hal yang harus dipersiapkan. Persiapan tersebut biasanya dituangkan ke dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang akan dijadikan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pembelajaran di kelas. RPP tersebut mencakup alokasi waktu pembelajaran, tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, metode

pembelajaran, media pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, pedoman penilaian, dan lain sebagainya sebagaimana disampaikan oleh guru ekonomi sebagai berikut:

“Ya, yang jelas kan guru itu melayani siswa dalam proses pembelajaran, terus disesuaikan dengan RPP yang ada. Dan itu di RPP sudah ada, dari mulai proses apersepsi awal kemudian proses kegiatan inti sampai proses kegiatan evaluasi atau penilaian sampai kemudian kesimpulan. Jadi layanan seperti itu.” (W.GE.24042019)

Perangkat lain yang harus dipersiapkan adalah UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri). UKBM biasanya berisi uraian materi dan soal-soal latihan tentang KD yang akan dipelajari sehingga peserta didik dapat memahami materi secara lebih mendalam. Berikut ini pernyataan guru ekonomi berkaitan dengan hal tersebut:

“UKBM itu kan isinya KD tidak hanya satu pertemuan disitu ada. Jadi intinya UKBM itu satu sarana untuk menjabarkan RPP. RPP yang nanti itu mempermudah guru untuk menyampaikan suatu bentuk materi. Dan disitu ada namanya alokasi waktu yang beberapa kali pertemuan, kemudian penilaian, kemudian ada perilaku mengevaluasi dan terus nanti kesimpulan. Itu nanti untuk kepentingan siswa, nah itu nanti sebagai sarana pendukung, hampir sama dengan latihan-latihan soal supaya lebih, menjabarkan lebih baik.” (W.GE.24042019)

Berdasarkan wawancara dengan Pak Wahyu Eddy Purwoko, S. Pd selaku guru ekonomi SMA Negeri 1 Bantarsari, beliau menyatakan bahwa RPP sebenarnya hanya sebatas administrasi yang harus dipenuhi oleh guru. Kegiatan pembelajaran dilapangan tidak selalu sama dengan apa yang dicantumkan di RPP dikarenakan guru harus melakukan penyesuaian dengan kondisi peserta didik ketika pembelajaran berlangsung sehingga RPP itu harus diperbaharui sesuai dengan kondisi peserta didik. Berikut ini pernyataan guru ekonomi mengenai hal tersebut:

“Metodenya itu kan ya melihat situasi siswa. Kalau sesuai RPP ya metodenya sesuai dengan RPP, keinginannya sama. Kadang-kadang di lapangan harus kita ubah, makannya tadi bilang RPP harus diubah.”(W.GE.24042019)

Perubahan RPP tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan atas temuan-temuan guru dalam pembelajaran sebagaimana disampaikan oleh guru ekonomi dalam hasil wawancara berikut:

“Ya namanya RPP ya kadang kan kita sebagai formalitas, sebagai syarat. Teorinya kan begitu harus sebenarnya harus sama, kenyataannya ya sebisa mungkin harus sesuai dengan RPP dan RPP itu boleh diperbaharui. Misalnya untuk KD ini, KD satu RPP-nya tentang pengertian ilmu ekonomi misalnya, kemudian dikemudian hari kita juga melihat sumber-sumber yang ada. Kemudian diperjalanan ternyata ada materi-materi yang belum masuk ataupun perlu ditambahkan, makannya boleh kita ubah RPP-nya itu atau waktunya misalnya kurang, atau RPP-nya terlalu banyak, ya kita kurangi. Ternyata masih tetap kurang, ya kita ubah di alokasi waktunya, itu boleh. Atau penilaiannya misalnya ini nggak cocok, kita ubah pakai penilaian yang lain misalnya.”(W.GE.24042019)

RPP yang dibuat oleh guru juga mencakup program remidi bagi peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Selain remidi, ada pula pengayaan bagi peserta didik sebagaimana disampaikan dalam pernyataan berikut ini:

“Remidi itu bagi siswa yang belum tuntas, terus nanti yang sudah tuntas diberikan materi pengayaan. Melayani siswa itu nanti memberikan materi-materi yang atasnya atau mencari kegiatan yang lain yang berkaitan dengan materi siswa.” (W.GE.24042019)

KKM yang ada di SMA Negeri 1 Bantarsari ada dua macam, yakni KKM sekolah dan KKM mata pelajaran. Guru ekonomi menyampaikan bahwa KKM yang digunakan beliau adalah KKM sekolah, jadi syarat agar peserta didik tidak remidi adalah harus memenuhi KKM yang ditentukan oleh sekolah. Berikut ini pernyataan guru ekonomi berkaitan dengan hal tersebut:

“Bedanya kalau dulu kan target untuk guru mapel itu misalnya ekonomi KKM 75, KKM sekolah ternyata lebih rendah cuma 61 atau 60. Itu KKM mapel itu kemudian dihapus, fokusnya ke KKM sekolah semua.”(W.GE.24042019)

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap dokumen RPP, masih ditemukan beberapa kekurangan dalam RPP. Kekurangan tersebut yaitu format penilaian autentik kurang lengkap dan lampiran soal pengayaan serta remedial tidak sesuai dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang diajarkan adalah materi tentang manajemen, namun contoh soal pengayaan dan remedial yang tercantum dalam RPP merupakan salah satu KD mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam merencanakan pembelajaran, guru mempersiapkan perangkat berupa RPP, UKBM, dan perangkat pendukung lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Hardini (2016) terhadap implementasi SKS di SMA Negeri 1 Salatiga menghasilkan temuan bahwa guru dalam mempersiapkan pembelajaran dengan program SKS dilakukan dengan membuat rencana pembelajaran yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), silabus, program tahunan (prota), dan program semester (promes) yang dibuat disetiap awal tahun ajaran baru melalui rapat kerja (raker) dimana masing-masing Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bekerja bersama timnya untuk membuat persiapan pembelajaran.

7.2. Pelaksanaan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dikelas biasanya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan biasanya merupakan persiapan sebelum pembelajaran. Guru perlu

mengkondisikan peserta didik agar siap menerima materi yang akan diajarkan, selain itu juga diperlukan pengecekan kesiapan alat dan media pembelajaran yang akan digunakan.

Guru ekonomi SMA Negeri 1 Bantarsari menyampaikan dalam hasil wawancara berikut ini bahwa kegiatan yang dilakukan ketika pendahuluan adalah sebagai berikut:

“Pendahuluan ya seperti berdoa, kemudian apersepsi, kemudian menyampaikan stimulus/rangsangan, kemudian menyampaikan materi yang terdahulu, misalnya kita akan masuk materi yang berbeda. Kalau di RPP kan sudah ada, nah itu.” (W.GE.24042019)

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap kegiatan pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari, guru ekonomi tersebut memang sudah melakukan kegiatan pendahuluan seperti yang disampaikan di dalam wawancara. Mengacu kepada RPP disebutkan bahwa dalam kegiatan pendahuluan guru melakukan orientasi, apersepsi, pemberian motivasi, dan pemberian acuan. Penerapan dalam pembelajaran pada saat itu beliau tidak melakukan kegiatan berdoa sebelum memulai pembelajaran dan tidak memberikan motivasi kepada peserta didik terkait dengan manfaat mempelajari materi yang bersangkutan.

Mekanisme pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pola pembelajaran Kurikulum 2013. Bedanya, ketika pembelajaran yang dilaksanakan menerapkan SKS, maka dalam suatu kelas peserta didiknya heterogen. Artinya, pencapaian KD (Kompetensi Dasar) antar peserta didik dalam satu kelas itu berbeda-beda sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Guru ekonomi SMA Negeri 1

Bantarsari menyampaikan bahwa pembelajaran dengan SKS lebih menuntut peserta didik untuk aktif dan mandiri agar dapat segera menyelesaikan KD yang dipersyaratkan. Sedangkan peran guru hanya sebagai fasilitator dan hanya menyampaikan materi secara garis besar. Peserta didik dituntut aktif dan kreatif belajar mandiri seperti mahasiswa dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan KD. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa peran pendidik dalam pendekatan konstruktivisme adalah sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam memahami isi pembelajaran. Tugas pendidik sebagai fasilitator yaitu memberikan stimulus secara dua arah kepada peserta didik agar peserta didik mampu menyimpulkan sendiri. Pendapat tersebut diperkuat dengan pandangan teori humanistik bahwa pendekatan humanistik mempersyaratkan perubahan status pendidik dari individu yang lebih mengetahui dan terampil segala sesuatu menjadi individu yang memiliki status kesetaraan dengan peserta didik (Rifa'i & Anni, 2015). Berikut ini pernyataan guru ekonomi SMA Negeri 1 Bantarsari berkaitan dengan hal tersebut:

“Kalau pembelajaran dikelas itu kan banyaknya K13 ya, ya karena kita kan menggunakan K13, SKS kan hanya nempel saja. SKS itu hanya bahasanya kayak mengkompetisikan siswa agar tidak terpacu pada guru, mau mandiri untuk belajar sehingga nanti setiap KD selesai kemudian loncat ke KD berikutnya tanpa kita harus gurunya untuk menyampaikan materi. Ya menyampaikan materi hanya sekedar secara garis besar, siswa harus berkompetisi kayak kuliah gitu loh. Kuliah kan cuma kan ditarget misalnya kan empat semester, kalau kuliah kan sampai lima tahun makannya kan agak lama. . .” (W.GE.24042019)

Peserta didik memang dituntut untuk mandiri layaknya mahasiswa, namun program SKS di sekolah berbeda dengan SKS perguruan tinggi. Berikut ini

dijelaskan oleh guru ekonomi mengenai perbedaan SKS sekolah dan perguruan tinggi dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sistem Kredit Semester (SKS) sebenarnya berbeda dengan yang ada di perguruan tinggi. Kalau di SMA itu biar merasa adil, siswa yang belajar cepat bisa terakomodasi, yang lambat bisa dipacu untuk menyelesaikan KD (Kompetensi Dasar). Jadi kalau paket itu kan merata semuanya, SKS beda ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat tergantung dari kemampuan siswanya. Istilahnya itu nanti tuntasnya per KD, misalnya nanti KD-nya setiap semester ada empat, setahun misalnya ada delapan, satu semester bisa menyelesaikan delapan KD itu berarti kan sudah bisa naik ke KD berikutnya. Jadi kalau SKS itu kan sistemnya tuntas per KD, kalau KD satu sudah tuntas, bisa lanjut ke KD dua dan KD selanjutnya sampai KD semua mapel itu selesai. Jadi ya paling cepat itu bisa lulus dua tahun, kalau yang lambat atau yang agak lambat itu ya empat tahun. Ya sama saja seperti yang regular, kalau yang regular kan ada kenaikan kelas, kalau SKS itu tidak ada. Tergantung dari pencapaian KD terakhir.” (W.WK.24042019)

Saudari Restiana selaku peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Bantarsari juga menyampaikan hal yang senada dengan pernyataan guru ekonomi. Peserta didik tersebut menyampaikan bahwa guru ekonomi memang hanya menjelaskan secara garis besar, dan bahkan terkadang hanya memberikan tugas saja. Berikut ini kutipan wawancara yang disampaikan oleh Restiana mengenai hal tersebut:

“Langsung memberi tugas, tapi sekali-sekali njelasin.” (W.PD1.15052019)

Khanifatul Jannah yang merupakan peserta didik kelas XI juga menyampaikan hal yang serupa bahwa guru biasanya menjelaskan. Apabila ada peserta didik yang telah siap melakukan penilaian untuk naik ke KD berikutnya, maka tetap diperbolehkan melakukan penilaian pada saat itu juga, atau boleh minggu depan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kondisi peserta didik yang heterogen dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Berikut ini pernyataan peserta didik kelas XI yang menyatakan bahwa guru hanya menjelaskan sesekali dan bisa langsung maju penilaian apabila peserta didik telah siap:

“Awalnya iya dijelasin. Terus kalau sudah dijelasin, kalau misalnya belum selesai menjelaskan, kalau siswanya sudah niat pengen ulangan, boleh langsung maju. Misal sudah selesai ulangan boleh lanjut selanjutnya walaupun gurunya belum selesai di bab satu itu misalnya gitu.” (W.PD2.15052019)

Pak Wahyu selaku guru ekonomi menambahkan bahwa guru juga harus aktif mendorong dan memotivasi peserta didik agar segera menyelesaikan KD. Guru tersebut harus tetap melayani peserta didik meskipun pencapaian KD-nya masih dibawah peserta didik yang lainnya. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang memandang bahwa setiap peserta didik adalah individu yang bersifat unik. Keunikan tersebut berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda sehingga harus dihargai dan digunakan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Keunikan tersebut membuat materi pelajaran yang akan diajarkan menjadi hak peserta didik untuk memilih materinya sendiri, dalam artian capaian KD yang akan dipelajari. Pandangan tersebut terdapat dalam teori humanistik yang memandang bahwa pilihan materi pembelajaran yang hendak digunakan dalam proses pembelajaran merupakan hak peserta didik, dan bukan menjadi hak pendidik yang akan disampaikan kepada peserta didik atau perancang kurikulum (Rifa'i & Anni, 2015). Meskipun peserta didik SMA Negeri 1 Bantarsari belum diberikan wewenang untuk menentukan beban belajar yang akan diambil dan masih diberikan paket pembelajaran oleh sekolah karena pogram SKS disana masih dalam masa penjajakan. Berikut ini pernyataan guru ekonomi SMA Negeri 1 Bantarsari mengenai kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap peserta didik yang heterogen:

“Iya makannya ini peran guru kan dobel. Kalau gurunya dengan K13 itu pusing, ditambah dengan SKS, jadinya tambah mumet. Iya ternyata siswa

yang KD ini dari satu kelas misalnya 30 siswa, hanya empat siswa yang sudah selesai sampai KD empat, lainnya masih KD dua. Nah yang KD empat ini, yang tiga empat harus kita layani juga sampai selesai KD untuk memberikan materi. Materinya kapan waktunya untuk penilaian itu kesepakatan dengan para siswa. Jadi misalnya KD dua tentang permintaan penawaran, nanti tiga empat sudah sampai koperasi, sudah sampai manajemen, belum lagi kesana kita harus layani, nah gurunya juga harus aktif juga.” (W.GE.24042019)

Karakteristik lain dari pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) adalah adanya UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri). UKBM ini biasanya berisi ringkasan materi dan latihan-latihan soal yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dan dijadikan sebagai salah satu bentuk penilaian untuk menentukan kelulusan KD peserta didik dan berhak lanjut ke KD berikutnya.

“Itu kan jadi dilihat pertemuannya bagaimana. Kalau pertemuannya kira-kira materi yang disampaikan cukup kemudian nanti tinggal kan penilaian, penilaian itu kan melihat kondisi siswa juga, kan harus ada secara mandiri, nah itu nanti kalau siswa telah menyelesaikan UKBM, itu kan nanti melangkah ke UKBM berikutnya. Kan hampir selesai melaksanakan lulusan KD dengan didukung oleh UKBM kemudian untuk persiapan ataupun perencanaan untuk KD berikutnya dengan UKBM yang berbeda.” (W.GE.24042019)

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap proses pembelajaran ekonomi yang berlangsung di SMA Negeri 1 Bantarsari, guru sudah menerapkan metode yang sesuai dengan kurikulum 2013. Ketika penelitian berlangsung, guru menerapkan metode *discovery learning* dengan cara diskusi kelompok. Kegiatan tersebut sesuai dengan teori konstruktivisme dan teori humanistik. Belajar pada pendekatan konstruktivisme menekankan pada bekerja secara kelompok, misalnya dengan memecahkan masalah secara terbuka, *discovery*, dan eksperimen, sedangkan praktik pembelajaran dalam pendekatan humanistik mengkombinasikan metode pembelajaran individual dan kelompok

kecil. (RC & Anni, 2015). Selain itu, pembelajaran yang berlangsung sudah menerapkan UKBM yang dibagikan kepada setiap kelompok. Hanya saja langkah pembelajaran yang dilakukan belum sesuai dengan RPP dikarenakan beberapa hal berikut: 1) pertemuan pertama dalam pembelajaran membahas materi pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan bidang-bidang manajemen, sedangkan dalam RPP hanya dicantumkan bahwa pembahasan pada pertemuan pertama mencakup pengertian dan unsur-unsur manajemen; 2) dalam RPP dicantumkan bahwa terdapat kegiatan menayangkan dan mengamati foto/gambar/video/*slide*, namun media yang digunakan hanya berupa *print out* UKBM; 3) kegiatan *collaboration* (kerjasama) antara peserta didik dan guru untuk membahas contoh-contoh materi yang terdapat di dalam buku paket tidak dilakukan; 4) ketika kegiatan penutup, guru hanya menginstruksikan kepada peserta didik untuk mengumpulkan hasil diskusi, sedangkan dalam RPP disebutkan bahwa guru memeriksa pekerjaan peserta didik dan memberinya paraf.

7.3. Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian dalam kurikulum 2013 ditekankan pada penilaian autentik. Penilaian dilakukan ketika proses pembelajaran hingga *output* atau hasil pembelajaran. Penilaian pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bantarsari sudah menggunakan penilaian autentik dengan menilai ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagaimana disampaikan oleh guru ekonomi sebagai berikut:

“Ya itu tadi penilaian sikap, penilaian psikomotor dan penilaian pengetahuan. Itu kaitannya dengan penilaian otentik.” (W.GE.24042019)

Berhubungan dengan mekanisme penilaiannya dijelaskan lebih lanjut oleh guru ekonomi dalam pernyataan berikut:

“Kalau ulangan sikap kan kita cenderung mengamati, ulangan tertulis biasanya ke pengetahuan dan keterampilan. Jadi anak mempresentasikan suatu materi, suatu paparan, itu dinilai.” (W.GE.24042019)

Beliau juga menyampaikan bahwa peserta didik yang pencapaian KD-nya sudah lebih dari materi yang akan diujikan ketika Penilaian Tengah Semester (PTS) maupun Penilaian Akhir Semester (PAS), maka peserta didik yang bersangkutan diperbolehkan untuk tidak mengikuti PTS/PAS tersebut. Berikut ini pernyataan guru ekonomi berkaitan dengan hal tersebut:

“Nah makannya itu tadi ngejanya bagaimana siswanya tadi. Ya mereka kita paksakan untuk berkompetisi, harus berkompetisi benar. Jadi mungkin berikutnya kalau pas UAS, ini nanti besok UAS-nya KD ini, kalau kamu KD ini belum selesai, KD yang kamu ikuti ya KD ini. Yang tadinya sudah selesai KD ini ya sudah nggak ikut ulangan.” (W.GE.24042019)

Peserta didik kelas X juga mendukung pernyataan guru ekonomi dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Itu tergantung sih kak. Misalnya sudah mepet sama Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) itu ikutnya tertulis. Tapi misalnya KD-nya sudah selesai ya sudah nggak ikut tertulis.” (W.PD1.15052019)

Mengenai teknis penilaian yang dilakukan oleh guru menyesuaikan kesiapan peserta didik. Ketika peserta didik sudah siap melakukan penilaian pada KD tertentu, maka peserta didik yang bersangkutan dapat menghubungi guru untuk melakukan penilaian. Penilaian dapat dilakukan di ruang kelas ataupun di ruang guru dan waktunya pun fleksibel seperti yang disampaikan oleh guru ekonomi dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau siswa sebenarnya lebih banyak evaluasinya, mereka siapnya apa tergantung individunya. Terserah mau kapan, mau ulangan di depan ruang guru juga nggak papa. Sistemnya siswa sudah baca apa, sampai KD berapa kemudian menyampaikan ke gurunya.” (W.GE.24042019)

Peserta didik kelas XI juga menyampaikan hal yang serupa dengan guru ekonomi sebagai berikut:

“Oh nggak tergantung guru, kalau ini tergantung siswa. Kalau pas misal kelas XII lagi ujian kan pas itu libur, ya boleh maju.” (W.PD2.15052019)

“Mendekat ke guru, di ruang guru.” (W.PD2.15052019)

Guru ekonomi SMA Negeri 1 Bantarsari menyampaikan bahwa bentuk penilaiannya adalah lisan dan tertulis seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Ada yang hafalan, ada yang hitung-hitungan, ada yang nulis juga, tugas mandiri. Anak ini penyelesaiannya harus dilatih sampai materi remidi.” (W.GE.24042019)

“Ya evaluasi hitung-hitungan kita belajar tentang studi masalah, tentang perhitungan PPh, tentang PBB, kemudian menghitung permintaan penawaran misalnya.” (W.GE.24042019)

Peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Bantarsari kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai penilaian lisan dan tertulis dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau tertulis itu biasanya bareng-bareng, tapi kalau lisan sendiri.” (W.PD2.15052019)

“Kalau lisan pak gurunya nyimak hasil *resume*-an siswa yang dari LKS (lembar kerja siswa).” (W.PD2.15052019)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bantarsari menggunakan penilaian autentik yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian kognitif dilakukan dengan tes tertulis dan lisan. Penilaian sikap peserta didik dilakukan secara kondisional ketika pembelajaran berlangsung. Penilaian tersebut sesuai

dengan penelitian Hardini (2016) bahwa pelaksanaan penilaian hasil belajar di SMA Negeri 1 Salatiga dilakukan sesuai dengan panduan dari BSNP, dimana penilaian meliputi penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Pelaksanaan penilaian hasil belajar di SMA Negeri 1 Salatiga mengalami perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan sekolah, dimana dalam penilaian kompetensi pengetahuan terutama dalam tes tertulis, bagian kurikulum membuat tes ulangan harian yang dilakukan secara serempak.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai aspek *process* penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari, dapat disimpulkan bahwa proses SKS terdiri dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP dan UKBM. Pelaksanaan pembelajaran dengan SKS dilakukan menggunakan metode ataupun pendekatan dalam kurikulum 2013, serta penilaian pembelajaran dalam program SKS tersebut ialah menggunakan penilaian autentik.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

DARI ASPEK *PRODUCT*

Menurut Tseng et al. (2010) evaluasi *product* adalah penilaian hasil pembelajaran. Tujuan evaluasi *product* adalah untuk mengetahui apakah ide yang direncanakan membawa perubahan terhadap siswa. Evaluasi *product* dapat berupa keputusan apakah kurikulum harus diperbaiki, dilanjutkan atautkah dihentikan dan juga mengevaluasi *output* yang dihasilkan kurikulum.

8.1. Ketercapaian Tujuan Program Sistem Kredit Semester (SKS)

Tujuan diselenggarakannya Sistem Kredit Semester (SKS) tentu agar peserta didik dapat menempuh pendidikan dalam kurun waktu yang lebih singkat yakni dua tahun atau empat semester. Penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari nampaknya belum mampu mencapai tujuan tersebut dikarenakan masih dalam tahap penjajakan program, serta adanya berbagai kendala yang dihadapi. Kendala yang paling utama muncul terkait keberhasilan program SKS adalah dari peserta didiknya. Peserta didik di SMA Negeri 1 Bantarsari dinilai masih kurang memiliki semangat belajar yang tinggi untuk segera menyelesaikan KD agar dapat

lulus lebih cepat sebagaimana yang disampaikan oleh guru ekonomi sebagai berikut:

“ . . . Ya itu tadi kemampuan untuk dorongan membaca itu lemah sehingga kita harus *press* dulu. Makannya anak itu membaca KD ini, sudah selesai kemudian maju ke saya. Kita harus tahu lah, misalnya baca KD dua, nanti maju ke saya. Nah itu yang sangat butuh untuk mengejar KD, kita terlalu banyak teori, memberikan pembelajaran kemudian dideskripsinya kita mengejar KD itu selesai untuk kejar target. Makannya kedepannya kalau KD, tiga empat semester belum untuk meluluskan SKS, tetap tiga tahun.” (W.GE.24042019)

Selain karena kurangnya semangat belajar, terkadang peserta didik sering menunda-nunda untuk melakukan penilaian. Peserta didik cenderung menunggu temannya dalam menyelesaikan KD, sehingga tidak kunjung melakukan penilaian untuk KD berikutnya. Hal ini disampaikan oleh waka kurikulum dalam kutipan wawancara berikut ini:

“ . . . Nah nanti lama-lama sampai sekarang kan sudah SKS walaupun belum ada yang bisa lulus dua tahun, masih sulit untuk mencari itu. Terutama kalau siswanya sudah diterapkan ingin dua tahun, tapi karena pengaruh temannya jadi ikut. Misalnya sudah mencapai KD empat tapi harus menunggu temannya di KD tiga. . .” (W.WK.24042019)

Sementara itu dari perspektif peserta didik yang peneliti wawancarai, peserta didik tersebut sebenarnya ingin segera melakukan penilaian untuk lanjut ke KD berikutnya, namun dikarenakan guru masih fokus kepada peserta didik yang sedang mengejar ketertinggalan KD, sehingga peserta didik tersebut harus menunggu giliran untuk maju penilaian. Ketika melakukan penilaian, guru memang lebih memprioritaskan peserta didik yang pencapaian KD-nya masih kurang agar dapat segera menyetarakan KD dengan teman lainnya. Berikut ini pernyataan peserta didik kelas X mengenai pandangannya terkait dengan ketercapaian program SKS:

“Malah ngelambatin loh kak. Jadi, misalnya saya sudah cepat tapi gurunya itu ada yang fokus sama yang di belakang, jadi bingung juga kak. Kayaknya kalau untuk benar-benar bisa lulus dua tahun kayaknya nggak bisa.” (W.PD1.15052019)

Peserta didik kelas XI juga memperkuat pernyataan peserta didik kelas X tersebut bahwasanya guru lebih terfokus kepada peserta didik yang tengah mengejar ketertinggalan KD. Berikut ini pernyataan peserta didik kelas XI berkaitan dengan hal tersebut:

“Yang diprioritasin ya yang belum, soalnya kan biar termotivasi untuk maju.”(W.PD2.15052019)

Peserta didik kelas XI tersebut juga menambahkan bahwa kendala berupa buku mata pelajaran lanjutan untuk KD berikutnya belum tersedia, terutama untuk buku-buku kelas XII. Kondisi tersebut membuat peserta didik merasa bingung untuk mengejar KD selanjutnya sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“Nggak pahamnya kan kalau khususnya anak IPS, sistem SKS sih sudah ada yang menerapkan, sejarah sama ekonomi. Tapi kalau sudah selesai itu nggak ada bukunya jadi bingung, katanya kan sistem SKS itu bisa ngebut. Tapi kalau nggak ada buku lanjutan ya jadi bingung.” (W.PD2.15052019)

Tujuan program SKS pada dasarnya adalah untuk meluluskan peserta didik dalam kurun waktu dua tahun, oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antara guru, peserta didik, maupun sumber daya pendukung lainnya. Hal ini dikarenakan SKS merupakan program pembelajaran tersistem yang membutuhkan keterpaduan yang baik antar komponen-komponennya. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan guru ekonomi pada kutipan wawancara berikut:

“. . . karena SKS itu juga butuh kemampuan guru, kemampuan siswa yang istilahnya juga dapat mengimbangi. Jadi sebenarnya kalau hasil SKS ini nanti

ending-nya di harappannya pemerintah kan cepat lah, dua eh empat semester selesai semua. . .” (W.GE.24042019)

8.2. Keberlanjutan Program Sistem Kredit Semester (SKS)

Penentuan keberlanjutan program Sistem Kredit Semester (SKS) dilakukan melalui tahap evaluasi program terlebih dahulu. Program yang sudah berjalan selama dua tahun kemudian dievaluasi, diidentifikasi hambatan-hambatan program untuk kemudian dilakukan perencanaan strategi dalam melanjutkan ataukah memberhentikan program SKS. Evaluasi terhadap penyelenggaraan program SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari dilakukan oleh pihak internal dan eksternal sekolah. Sejauh ini pelaksanaan evaluasi masih dilakukan oleh pihak sekolah dikarenakan pihak eksternal yang berasal dari propinsi belum sampai ke Bantarsari karena masih banyak penyelenggara pendidikan SKS yang harus dievaluasi. Berikut ini pernyataan waka kurikulum berkaitan dengan hal tersebut:

“Ya sementara ini dari pihak sekolah, kalau eksternal ada dari Jawa Tengah tapi kan belum sampai sini, masih banyak sih.” (W.WK.24042019)

Evaluasi program SKS yang dilakukan oleh pihak internal sekolah dilakukan melalui rapat antar pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Bantarsari. Evaluasi tersebut dilakukan untuk menilai pelaksanaan program SKS serta mengidentifikasi apa saja kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, waka kurikulum menyampaikan akan mengambil tindakan lebih lanjut dengan melakukan IHT (*In House Training*) berkaitan dengan kendala tersebut agar dapat diperbaiki. Berikut ini kutipan wawancara dengan waka kurikulum yang menyatakan mengenai hal tersebut:

“Iya, rapat. Jadi kalau misalnya tiap semester, akhir semester ya itu rapat. Nanti semester awalnya mengadakan IHT tentang apa yang masih kurang.” (W.WK.24042019)

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh sekolah, ternyata banyak ditemukan hambatan/kendala dalam penyelenggaraan program SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari. Rata-rata kendala yang dihadapi adalah berupa sarana prasarana dan juga *input* peserta didik. Ada pula kendala yang berasal dari pihak guru dikarenakan masih cenderung menerapkan sistem paket sebagaimana disampaikan oleh waka kurikulum sebagai berikut:

“Yang pertama ya dari guru itu sendiri ya karena masih menerapkan pola paket, terus dari sarana dan prasarana itu kan masih kurang.” (W.WK.24042019)

Beliau menambahkan dalam wawancaranya bahwa sarana prasarana yang dimaksud utamanya berkaitan dengan perangkat elektronik sebagai berikut:

“Ya terutama dalam kaitannya dengan perangkat IT, iptek lah seperti proyektor itu kan masih beberapa.” (W.WK.24042019)

Kendala lainnya yaitu berkaitan dengan akses internet, daya listrik yang masih rendah serta faktor kondisi geografis sekolah yang berada ditengah persawahan menyebabkan alas kaki peserta didik cepat kotor dan mengharuskan mereka untuk melepas alas kaki ketika memasuki ruang kelas. Berikut ini pernyataan waka kurikulum berkaitan dengan hal tersebut:

“Nggak ada, belum ada. Terus untuk jaringan internet, jaringan internetnya kan belum ada jaringan wifi, jadi masih menggunakan radio. Terus terutama tanah kan masih kotor ya, jadi kalau mau masuk kelas sepatunya harus dilepas. Terus listrik, listriknya dayanya masih kurang, jadi kalau misalnya menggunakan semua anjlok.” (W.WK.24042019)

Waka kurikulum menyampaikan kendala lain yang muncul ialah dari segi *input* peserta didik khususnya yang berasal dari jalur zonasi. Penerimaan peserta

didik dari sistem zonasi tidak memperhatikan nilai peserta didik, jadi berapapun nilainya tetap akan diterima. Kondisi tersebut menyebabkan ketika peserta didik sudah masuk sekolah ternyata kesulitan untuk mengikuti kegiatan di sekolah tersebut. Berikut ini pernyataan waka kurikulum berkaitan dengan hal tersebut:

“Iya, terus dari input juga. Karena input dari siswa, kalau siswa sekarang kan milih zonasi. Jadi yang penting daftar disini mau pilih apa saja IPA, misalnya nemnya cuma 11 atau 12, bisa masuk. Setelah masuk kelas tidak bisa mengikuti.” (W.WK.24042019)

Beliau juga menambahkan bahwa kesadaran peserta didik untuk belajar semakin berkurang dikarenakan pengaruh teknologi berupa android. Peserta didik cenderung malas mengerjakan tugas dan harus diingatkan oleh guru. Berikut ini penjelasan waka kurikulum mengenai hal tersebut:

“Ya dari siswa disini itu mungkin kesadarannya sejak ada android itu lah, kesadaran belajarnya kurang jadi kalau nggak dioprak-oprak, dikejar-kejar itu nggak mau mengumpulkan, ya rata-rata kayak gitu kalau dulu kan tidak, sekarang sudah beda.” (W.WK.24042019)

Guru ekonomi SMA Negeri 1 Bantarsari turut mendukung pernyataan waka kurikulum bahwa kendala penyelenggaraan SKS di sekolah tersebut ialah *input* peserta didik sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut ini:

“... Sebenarnya yang jadi masalah bukan sarpras tapi *input* siswanya. Karena input siswa SMA 1 Bantarsari itu kan lemah, *kudu* (harus) di *press*, disuruh membaca saja tidak mau, mending baca *whatsapp* daripada membaca, kan gitu. Padahal bawa HP sendiri kan untuk kepentingan pembelajaran, ya kemampuan kadang-kadang faktor namanya siswa sih. Membaca saja nggak mau, susah.” (W.GE.24042019)

Kepala SMA Negeri 1 Bantarsari juga mendukung pernyataan waka kurikulum dan guru ekonomi terkait kendala penyelenggaraan SKS. Kepala sekolah tetap optimis bahwa SKS merupakan salah satu inovasi pendidikan yang baik sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Alhamdulillah ya pelan-pelan, sekali lagi memang sarana prasarana dan SDM (Sumber Daya Manusia) itu sangat berpengaruh sehingga ya belum kalau dikatakan maksimal sekali ya. Tapi mencoba yang terbaik untuk berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara, metode sehingga nanti mudah-mudahan kedepan sistem SKS ini memang salah satu inovasi pendidikan yang membantu masyarakat bersama peserta didik untuk bisa menyelesaikan, bisa belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing.” (W.KS.14052019)

Kendati terdapat kendala dari segi sarana prasarana dan sumber daya manusia, pihak SMA Negeri 1 Bantarsari memilih untuk tetap melanjutkan penyelenggaraan SKS. Pihak sekolah menilai bahwa SKS merupakan salah satu program yang baik sehingga perlu dilanjutkan pelaksanaannya. Hal ini dinyatakan oleh waka kurikulum bahwa program SKS tetap dilanjutkan dalam kutipan wawancara berikut:

“Dilanjutkan.” (W.WK.24042019)

Kepala sekolah menyampaikan bahwa sistem paket maupun SKS sebenarnya adalah suatu sistem yang baik. Lebih lanjut lagi, beliau menambahkan bahwa masih lebih baik SKS dikarenakan pada dasarnya tidak ada sistem kenaikan kelas sehingga apabila peserta didik tidak naik kelas tidak harus mengulang mata pelajaran seluruhnya selama satu tahun layaknya sistem paket. Peserta didik tersebut hanya perlu mengulang mata pelajaran yang tidak lulus. Berikut ini pernyataan kepala sekolah berkaitan dengan hal tersebut:

“Semua sistem sebenarnya baik, tapi kalau menurut saya itu SKS sebenarnya lebih baik ya. Karena disitu contohnya begini, anak kelas X misalkan ya itu satu mata pelajaran dia misalkan PKn ya dia nggak lulus, maka anak itu harus nggak naik ya, maka besok tahun berikutnya harus mengulang seluruh mata pelajaran. Kalau SKS kan tidak, mungkin yang belum selesai itu diselesaikan. Jadi ya beban sebenarnya karena kalau nggak lulus satu, harus mengulang lagi setahun, itu kalau sistem paket seperti itu kan kasihan anak-anak itu mengulang lagi, pelajaran lagi, sebanyak itu lagi. Kalau SKS kan ya yang nggak lulus mana nanti diulang, jadi bisa cepat.” (W.KS.14052019)

Pernyataan kepala sekolah tersebut juga didukung oleh waka kurikulum dalam kutipan wawancara berikut ini:

“ . . . Tapi kalau yang SKS kan karena dalam satu kelas itu masih ada yang belum selesai di KD ini ya harus menambah lagi harus diselesaikan yang anak itu. Kalau SKS nggak ada siswa yang ngulang sebenarnya.” (W.WK.24042019)

Menurut penilaian peserta didik, diantara SKS dan sistem paket juga masih lebih baik SKS dikarenakan sistem tersebut memungkinkan peserta didik untuk menyelesaikan masa studinya dalam kurun waktu empat semester. Masa studi yang lebih cepat tersebut dapat membantu meringankan beban orang tua dalam hal pembiayaan pendidikan. Berikut ini pernyataan peserta didik berkaitan dengan hal tersebut:

“Kalau menurut saya sih lebih baik yang SKS. Karena kan itu siswa jadi bisa mengembangkan bakatnya kalau mereka sebenarnya mampu, jadi nanti bisa melanjutkan ke kuliahnya lebih cepat, bisa membantu orang tua juga karena lebih cepat.” (W.PD2.15052019)

Penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari memang masih banyak kekurangannya dikarenakan sekolah tersebut masih dalam tahap penjajakan. SMA Negeri 1 Bantarsari secara perlahan menerapkan SKS meskipun belum sempurna dan terus berusaha membenahi penyelenggaraan program SKS tersebut menyesuaikan dengan peraturan pemerintah dan tujuan program. Rencana pengembangan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari salah satunya adalah akan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kecepatan belajarnya sejak kelas X. Rencana tersebut disampaikan oleh waka kurikulum dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Untuk pengembangan SKS rencananya besok mulai tahun ajaran baru 2019/2020 itu kayak akan dikelompokkan. Jadi mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan lebih mulai dari kelas X.” (W.WK.24042019)

Pengelompokkan tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan peraturan pemerintah yang baru yang mengharuskan pengelompokkan peserta didik sejak kelas X. Hal tersebut juga disampaikan oleh waka kurikulum dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Ya belum, karena kan ada pembaruan lagi peraturannya, pedomannya berbeda lagi jadi dikelompokkan langsung dari kelas X.” (W.WK.24042019)

Informasi yang didapatkan dari guru ekonomi SMA Negeri 1 Bantarsari, apabila ada peserta didik yang mampu lulus dalam kurun waktu dua tahun, maka peserta didik yang bersangkutan harus menunggu waktu satu tahun untuk mengikuti ujian nasional sebagaimana disampaikan oleh guru ekonomi sebagai berikut:

“... Kalau SKS kan dua tahun selesai dia harus menunggu setahun lagi baru ikut ujian. Nah selama setahun ini untuk pengayaan, untuk penekanan materi-materi yang sudah. Tapi semester ini belum ada, kalau materi justru malah yang lebih pro-aktif adalah siswa, kalau guru terlalu banyak menyampaikan mereka malah nggak ada kompetisi.” (W.GE.24042019)

Kepala sekolah menyampaikan bahwa mulai tahun ajaran 2019/2020, peserta didik dapat langsung mengikuti ujian nasional pada tahun yang bersamaan.

Berikut ini pernyataan kepala sekolah berkaitan dengan hal tersebut:

“Iya. Misalkan dua tahun itu sudah menyelesaikan enam semester, terus kita usulkan untuk mengikuti ujian lanjutan.” (W.KS.14052019)

Kesimpulannya adalah penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari tetap dilanjutkan meskipun menemui berbagai macam kendala. Kendala-kendala yang dihadapi SMA Negeri 1 Bantarsari dalam penyelenggaraan SKS memang

lebih banyak terjadi pada ketersediaan sarana prasarana. Pihak sekolah tetap melanjutkan pelaksanaan program tersebut dengan tetap mengusahakan perbaikan-perbaikan pada program tersebut. Penelitian Hardini (2016) terhadap implementasi SKS di SMA Negeri 1 Salatiga juga menemukan bahwa walaupun dalam penerapan SKS di SMA Negeri 1 Salatiga masih mengalami beberapa kendala, namun kendala-kendala tersebut dapat teratasi seiring berjalannya program. Pihak penyelenggara program juga tetap akan terus melakukan perbaikan agar program SKS yang dijalankan semakin baik untuk kedepannya, dan semakin meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi (Hardini, 2016).

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai aspek *product* pada penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari, dapat disimpulkan bahwa tujuan program SKS belum dapat tercapai. Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga belum ada peserta didik yang bisa menyelesaikan masa studinya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Pihak sekolah memutuskan untuk tetap melanjutkan program tersebut sembari melakukan perbaikan terhadap kendala yang dihadapi.

BAB IX PENUTUP

9.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyelenggaraan program SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari pada aspek *context* didasarkan atas Permendikbud No. 22 Tahun 2006 dan Permendikbud No. 158 Tahun 2014; kebutuhan sekolah akan inovasi pendidikan di bidang pembelajaran; upaya sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penyelenggaraan program SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari pada aspek *input* meliputi identifikasi terhadap rencana pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan program, sumber daya manusia, sarana prasarana pembiayaan, layanan kesiswaan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala dalam hal sarana prasarana, pemahaman guru terhadap program, dan kualitas *input* peserta didik.
3. Penyelenggaraan program SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari pada aspek *process* berupa perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan rencana namun peserta didik terkendala dengan buku pelajaran lanjutan untuk KD berikutnya.
4. Penyelenggaraan program SKS di SMA Negeri 1 Bantarsari pada aspek *product* yaitu pada ketercapaian tujuan program untuk meluluskan peserta didik dalam waktu dua tahun belum dapat terlaksana dikarenakan masih

banyak kendala yang dihadapi dan SMA Negeri 1 Bantarsari memutuskan untuk melanjutkan program tersebut dengan berusaha memperbaiki kendala-kendala yang ada.

9.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengadakan pelatihan teknologi kepada guru senior agar dapat mengoperasikan perangkat teknologi dengan baik.
2. Memberikan lebih banyak diklat, seminar, dan *workshop* kepada guru mengenai SKS agar lebih memahami SKS.
3. Sekolah sebaiknya memfasilitasi pengayaan yang terjadwal secara rutin bagi peserta didik untuk membantu mengatasi kesulitan belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Aithal, S., & Kumar, S. (2016). Analysis of Choice Based Credit System in Higher Education.
- Alam, P. W., & Utami, W. S. (2016). *Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) ditinjau dari Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan pada Jenjang SMA di Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya.
- Amin, M. M., & M, Y. (2016). *Manajemen Mutu: Aplikasi dalam Bidang Pendidikan* (I). Yogyakarta: Media Akademi.
- Anwar, R. (2014). Hal-Hal yang Mendasari Penerapan Kurikulum 2013. *Humaniora*, 5(45), 97–106.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2010). *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*. Jakarta.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *MEMAHAMI PENELITIAN KUALITATIF*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baysha, M. H., & Astuti, E. R. P. (n.d.). Evaluasi CIPP (Context Input Process Product): Penerapan Kurikulum SMK, 23–39.
- Bhakti, Y. B. (2017). Evaluasi Program Model CIPP pada Proses Pembelajaran IPA. *JIPFRI: Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika Dan Riset Ilmiah*, 1(2), 75–82.
- Bungin, B. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Cheung, A. C. K., & Wong, P. M. (2012). Factors Affecting the Implementation of Curriculum Reform in Hong Kong. *International Journal of Education Management*, 26(1), 39–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/09513541211194374>
- Diektorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. (2017). *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Ekasari, E. N., Pitoewas, B., & Nuralisa, Y. (2013). Pengaruh Kesiapan Sekolah terhadap Pelaksanaan Program Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. *Pendidikan*, (2), 1–13.
- Fadlillah, M. (2014). *Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, & SMA/MA*. (R. KR, Ed.) (Cet. 1). Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Garba, S. A., Byabazaire, Y., & Busthami, A. H. (2015). Toward the Use of 21st Century Teaching-Learning Approaches: The Trend of Development in Malaysian Schools Within the Context of Asia Pacific. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 10(4), 72–79. <https://doi.org/10.3991/ijet.v10i4.4717>
- Hamalik, O. (2009a). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Cet. 3). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, O. (2009b). *Kurikulum dan Pembelajaran* (Cet. 9). Jakarta: Bumi Aksara.
- Hardini, A. T. A. (2016). Evaluasi Program Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Salatiga. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(20), 246–264.
- Hasan, H. (2008). *Evaluasi Kurikulum* (Cet. 1). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah, H. M. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Laely, D. F. (2016). *Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 di SD N Petompon 01 Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Latifah, N. (2017). *Analisis Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Akuntansi di SMKN 1 Kebumen*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Loko, E. H. L. (2016). *Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Mayasari, N. C. (2014). *Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Ekonomi pada SMA Negeri di Kabupaten Sleman*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

- Mir, S. R. (2017). Issues and Challenges of Choice Based Credit System : Insights from University of Kashmir. *International Journal of Education Technology*, 7(December), 57–63. <https://doi.org/10.5958/2249-5223.2017.00006.7>
- Moesthafa, I. (2018). *Manajemen Kurikulum Sistem Kredit Semester Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Probolinggo*. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Muhlis, A. (2016). Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum dengan Model Sistem Kredit Semester di Madrasah, *11*.
- Muhlis, A. (2017). Pengembangan Pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester di MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan. *Nuansa*, 14(Januari-Juni 2017), 140–184.
- Mukminan. (2014). *Tantangan Pendidikan di Abad 21*.
- Mulyasa. (2009). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. (F. Yustianti, Ed.) (Ed. 1). Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa. (2014). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. (A. S. Wardan, Ed.) (Cetakan Ke). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muyana, S. (2017). Context Input Process Product (CIPP): Model Evaluasi Layanan Informasi, *1(1)*, 342–347.
- Nafia, M. I. (2017). *Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Kudus*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Nasution, S. (2008). *Asas-Asas Kurikulum* (Cet. 9). Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. (2009). *Kurikulum dan Pengajaran* (Cet. 5). Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013*. 2014. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. 2014. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi*. 2006. Jakarta.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (M. Sandra, Ed.) (III). Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.

- Rifa'i, A., & Anni, C. T. (2015). *Psikologi Pendidikan*. Semarang: UNNES Press.
- Rostika, D., & Zulkarnain, W. (2016). Analisis Implementasi Kurikulum 2013 dengan Sistem Kredit Semester. *Manajemen Pendidikan*, 25(September 2016), 191–199.
- Sadiyah, H. (2012). Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Mata Pelajaran Sejarah dengan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 2 Malang Tahun Ajaran 2011/2012. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1.
- Santoso, J. T. B. (2013). *Pengembangan Kurikulum*. (P. Raharjo, Ed.) (Mar. 2013). Semarang: Yayasan Studi Bahasa Jawa (YSBJ) “KANTHIL.”
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Cetakan ke). Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2009). *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*. (F. Yustianti, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. (Mukhlis, Ed.) (Cet. 11). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sunarti, & Rahmawati, S. (2014). *Penilaian dalam Kurikulum 2013 Membantu Guru dan Calon Guru Mengetahui Langkah-Langkah Penilaian Pembelajaran*. (Maya, Ed.) (Ed. 1). Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Tilaar, H. A. R. (2006). *Standarisasi Pendidikan Nasional (I)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Triana, E. (2018). *Analisis Pelaksanaan Implementasi Kurikulum 2013 Edisi Revisi pada Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Se-Kabupaten Wonosobo*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Tseng, K. H., Ray Diez, C., Lou, S. J., Tsai, H. L., & Tsai, T. S. (2010). Using the Context, Input, Process and Product Model to Assess an Engineering Curriculum. *World Transactions on Engineering and Technology Education*, 8(3), 256–261.
- Wahid, A. (2016). Penerapan Program Sistem Kredit Semester (SKS) Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(September 2016), 21–37.
- Wahyudin, A. (2015). *Metodologi Penelitian: Penelitian Bisnis dan Pendidikan* (Cet. 1). Semarang: UNNES Press.

- Winarni, L. M., Judistiani, T. D., Ruslami, R., Husin, F., Sutedja, E., Herawati, D. M. D., & Idjradinata, P. S. (2014). Penggunaan Model CIPP dalam Evaluasi Kurikulum Inti Pendidikan D-III Kebidanan. *IJEMC*, 1(1), 8–15.
- Zubaidah, S. (2016). Keterampilan Abad ke-21: Keterampilan yang diajarkan melalui Pembelajaran (pp. 1–17).